



Keputusan Dewan Kerjasama Negara Arab Teluk Menetapkan Hizbullah
Sebagai Organisasi Teroris.

*Gulf Cooperation Council (GCC) Decision To Classify Hezbollah As
Terrorist Organization.*

Oleh:

M. Taufik Qurrahman

120910101034

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2017



Keputusan Dewan Kerjasama Negara Arab Teluk Menetapkan Hizbullah
Sebagai Organisasi Teroris.

*Gulf Cooperation Council (GCC) Decision To Classify Hezbollah As
Terrorist Organization.*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

M. Taufik Qurrahman

120910101034

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2017



“Untuk Segenap Nafas &
Semangatku, Bapak dan Ibu.”

MOTTO

*“Ahlubayt al-Mustafa Thuhuri Hum Amani al-Ardhi Fa adz-Dzakiri”*¹

*“One man’s terrorist is another man’s freedom fighter (Gerald Seymour)”*²



¹ Abdullah bin Alwi al-Haddad

² Craig A. Snyder, *Contemporary Security and Strategy*. New York, Palgrave Macmillan. second edition 2008. hal.171-172

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Taufik Qurrahman

NIM : 120910101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan Dewan Kerjasama Negara Arab Teluk Menetapkan Hizbullah sebagai Organisasi Teroris” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2017

Yang Menyatakan

M. Taufik Qurrahman
NIM 120910101034

SKRIPSI

**KEPUTUSAN DEWAN KERJASAMA NEGARA ARAB TELUK
MENETAPKAN HIZBULLAH SEBAGAI ORGANISASI TERORIS**

Oleh

M. Taufik Qurrahman
NIM 120910101034

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Keputusan Dewan Kerjasama Negara Arab Teluk Menetapkan Hizbullah sebagai Organisasi Teroris**” telah diuji dan di sahkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Oktober 2017
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si
NIP. 197212041999031004

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP. 195904231987021001

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP. 196802291998031001

Anggota I

Anggota II

Fuat Albayumi, S.IP, M.A
NIP. 197404242005011002

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP. 19580317198513100

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Keputusan Dewan Kerjasama Negara Arab Teluk Menetapkan Hizbullah Sebagai Organisasi Teroris; M. Taufik Qurrahman; 120910101034; 2017; 135 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Seiring terjadinya fenomena *Arab Spring* yang melanda kawasan Timur Tengah, Hizbullah muncul sebagai elemen pergerakan yang progresif di regional tersebut. Progresifitas Hizbullah tersebut ditunjukkan dengan keterlibatan serta peran aktif Hizbullah dalam konstelasi politik di regional ini. *Arab Spring* juga turut memperluas ruang lingkup pergerakan Hizbullah yang semula hanya sebatas teritorial Lebanon dan terbatas isu internal politik pemerintahan serta konflik Israel-Palestina, kini Hizbullah tampil sebagai elemen progresif yang melingkupi area konstelasi politik pada level regional (Suriah, Irak, Yaman). Ekspansi ruang lingkup pergerakan Hizbullah tersebut sekaligus merupakan ancaman bagi Dewan Kerjasama Arab Teluk (*Gulf Cooperation Council (GCC)*). Maka dari itu dalam upaya merespon ancaman yang disebabkan oleh Hizbullah, GCC memerlukan sebuah manuver khusus (agenda keamanan) untuk menetralsir instabilitas yang ditimbulkan. Agenda keamanan yang dilakukan oleh GCC tersebut diwujudkan dengan penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris.

Penjelasan agenda keamanan yang dilakukan oleh GCC untuk menetralsir ancaman yang ditimbulkan oleh Hizbullah secara spesifik akan ditinjau melalui teori sekuritisasi. Asumsi dasar dari teori sekuritisasi tersebut adalah upaya pengamanan suatu pihak (*securitizing actors*) terhadap suatu objek (*referent object*) yang tengah mendapatkan ancaman (*existential threat*). Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh *Copenhagen School* ini akan menjadi landasan penulis dalam mengulas mekanisme sekuritisasi yang dilakukan oleh negara anggota GCC sehingga pada akhirnya muncul keputusan untuk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam proses sekuritisasi tersebut peran *securitizing actors* yang direpresentasi oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar menempati posisi signifikan untuk menyuarakan (*speech act*) agenda keamanan terhadap anggota GCC secara keseluruhan dalam merespon eksistensi Hizbullah. Agenda keamanan GCC terhadap Hizbullah tersebut memiliki kaitan erat dengan eksistensi Republik Islam Iran dalam konstelasi geopolitik Timur Tengah. Ekspansi pengaruh Iran pada saat fenomena *Arab*

Spring merupakan ancaman geopolitik bagi negara Arab Teluk. Dalam konteks ini, Hizbullah merupakan salah satu instrumen Teheran dalam memainkan agenda geopolitiknya di kawasan. Posisi tersebut ditunjukkan oleh Hizbullah dengan keterlibatannya di beberapa negara Timur Tengah (Suriah dan Irak) untuk mendukung agenda politik Teheran di regional Timur Tengah. Oleh karena itu, posisi Hizbullah menduduki level ancaman yang krusial bagi negara Arab Teluk GCC.

Mekanisme agenda keamanan tersebut ditunjukkan oleh para *securitizing actors* dengan mengkonstruksikan Hizbullah sebagai ancaman terhadap *referent objects*, yakni ancaman berupa kedaulatan *status quo* nasional, stabilitas geopolitik kawasan, serta ideologi negara anggota GCC. Dalam proses agenda keamanan tersebut, Arab Saudi merupakan *securitizing actor* utama dalam proses konstruksi Hizbullah. Bersama dengan Bahrain, Arab Saudi mengkonstruksi Hizbullah sebagai ancaman bagi *status quo* monarki negara Arab Teluk. Sedangkan bersama dengan Qatar, Arab Saudi menggunakan isu stabilitas geopolitik kawasan sebagai respon progresifitas Hizbullah di regional Timur Tengah. Selain mengkonstruksi Hizbullah sebagai ancaman *status quo* dan geopolitik, Arab Saudi juga memainkan isu sektarian untuk menanamkan persepsi bahwa Hizbullah dengan *partner*-nya di Teheran tengah melakukan ekspansi ideologi Syiah di negara Arab Teluk.

Pada dasarnya, penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris bukanlah hal yang baru, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lain. Akan tetapi dalam konteks dunia Arab, label teroris yang ditujukan kepada Hizbullah masih menjadi perdebatan antar negara-negara di Timur Tengah. Di dalam internal negara GCC pun, sebelumnya masih belum memiliki suara yang bulat dalam konteks organisasi regional untuk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Segera setelah Arab Saudi melakukan konstruksi ide (*shared understanding*) tentang ancaman yang ditimbulkan, isu penanganan Hizbullah bergeser dari yang semula hanya agenda keamanan per negara, kini menjadi isu sekuritisasi GCC secara keseluruhan. Keberhasilan proses sekuritisasi yang dilakukan GCC tersebut didukung dengan tindakan kongkrit negara anggotanya untuk menerapkan kebijakan yang menyudutkan pemerintah Lebanon dalam upaya mengisolasi Hizbullah.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., Shalawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para Ahlubayt-Nya. Berkat rahmat, petunjuk serta karunia yang diberikan Allah Swt., sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keputusan Dewan Kerjasama Negara Arab Teluk Menetapkan Hizbullah Sebagai Organisasi Teroris”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si, Ph. D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Bapak Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si selaku dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si, Ph. D, selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, membantu penulis menyusun skripsi selama ini.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, Khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan segala ilmu dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama belajar di jurusan ini.
7. (Alm.) Ayahanda Mustafa yang selalu menjadi sosok inspirasi, Ibunda Harsini tercinta, Kakak-Kakakku David Zulkarnaen, Lina Febriliani dan Leni Septri Ariany beserta segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik doa maupun nasehat dan juga semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2012. *Special regard* kepada Saudara Ali Hashemi Bin Syaikh Abu Bakar (Yek Ali), Firdausi Nasruli Abtian (Bang Joyo), Ayu Farida Fitria Maghfiroh (Mbak Ayuk), Arini Firdausiyah (Riffy), Resha Sirtia (Reza), Lutfia Khorida (Fia), Hilman Thontowi (Itok) dan Rizaldy Yudhistira (Rizal) yang bersedia menjadi *partner* diskusi selama perkuliahan dan telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI), Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UNEJ dan segenap pengurus inti IR-Progress yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, pengembangan talenta dan pembelajaran kehidupan yang sangat berkesan dan berguna bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, terima kasih kepada berbagai pihak yang telah disebutkan. Penulis menyadari setiap pribadi manusia berbeda dan tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.2.1 Batasan Materi.....	8
1.2.2 Batasan Waktu.....	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Landasan Teoritis	9
1.5.1 Definisi Terorisme.....	10
1.5.2 Teori Sekuritisasi.....	15
1.6 Argumen Utama	24
1.7 Metodologi Penelitian	24
1.7.1. Metode Pengumpulan Data.....	25
1.7.2. Metode Analisis Data.....	26
1.8 Sistematika Penelitian	27
BAB 2. HIZBULLAH DAN KONSTELASI POLITIK TIMUR TENGAH	29
2.1 Arab Saudi & Iran dalam Rivalitas Geopolitik Timur Tengah (New Middle East Cold War)	31

2.2 Genealogi Hizbullah dan Komunitas Syiah di Lebanon Selatan.....	38
2.1.1 Embrio Resistansi Lebanon “AMAL”	39
2.2.2 Latarbelakang Kemunculan Hizbullah.....	40
2.2.3 Hizbullah, Isu Israel-Palestina, dan Politik Lebanon	43
2.2.4 Aktifitas Sosial Hizbullah	47
2.3 Hizbullah dan Counter-terrorism	51
BAB 3. HIZBULLAH DALAM BINGKAI KONSTRUKSI GULF COOPERATION COUNCIL	59
3.1 Dua sisi Hizbullah sebagai Elemen Perlawanan Lebanon	61
3.2 Hubungan Hizbullah dengan Negara Arab Teluk.....	63
3.3 Arab Spring, Posisi Hizbullah dalam Babak Baru Rivalitas Iran dan GCC	66
3.4 Hizbullah Melawan Kepentingan GCC	69
3.4.1 Bahrain.....	69
3.4.2 Yaman.....	73
3.4.4 Lebanon.....	76
3.4.5 Suriah.....	78
BAB 4. SEKURITISASI GULF COOPERATION COUNCIL MENETAPKAN HIZBULLAH SEBAGAI ORGANISASI TERORIS.....	82
4.1 Hizbullah: sebuah Existential Threat bagi Gulf Cooperation Council.....	83
4.2 Sekuritisasi Gulf Cooperation Council terhadap Hizbullah.....	98
4.2.1 Proses Sekuritisasi Hizbullah.....	100
BAB 5. KESIMPULAN.....	110
Daftar Pustaka.....	112

DAFTAR SINGKATAN

GCC	<i>Gulf Cooperation Council</i> (Dewan Kerjasama Arab Teluk)
UEA	Uni Emirat Arab
AMAL	<i>Afwaj al-Muqawamah al-Lubnaniyyah</i> (Batalion Perlawanan Lebanon)
SLA	<i>South Lebanese Army</i> (Tentara Lebanon Selatan)
IDF	<i>Israeli Defence Force</i> (Pasukan Pertahanan Israel)
HAMAS	<i>Harakat Muqawamah al-Islamiyah</i> (Gerakan Resistansi Islam)
JBDG	<i>Jihad al-Bina Development Group</i> (Kelompok Pembangunan Jihad al-Bina)
IHO	<i>Islamic Health Organization</i> (Organisasi Kesehatan Islam)
IRGC	<i>Iranian Revolutionary Guard Corps</i> (Korps Garda Revolusi Iran)
ISI	<i>Islamic State of Iraq</i> (Negara Islam Irak)
ISIS	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i> (Negara Islam Irak dan Suriah)
FSA	<i>Free Syrian Army</i> (Tentara Pembebasan Suriah)
OKI	Organisasi Kerjasama Islam
OPEC	<i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i> (Organisasi Negara Pengekspor Minyak)
CIA	<i>Central Intelligence America</i> (Pusat Intelejen Amerika)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

DAFTAR BAGAN

Halaman

1.1 Sekuritisasi *Gulf Cooperation Council* (GCC) terhadap Hizbullah107



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme dalam beberapa dekade terakhir ini merupakan ancaman bagi peradaban dunia dan umat manusia. Penanganan isu terorisme tersebut kini bukan lagi agenda keamanan aktor-aktor tertentu saja, akan tetapi sudah mencapai tingkat urgensi global. Artinya, penanganan isu terorisme kini telah menjadi tanggung jawab bersama bagi dunia internasional. Dalam perkembangannya, secara konseptual definisi terorisme itu sendiri masih belum mencapai kesepakatan atau lebih tepatnya memiliki makna dan perspektif yang beragam bergantung pada latar belakang pihak yang ingin menginterpretasi istilah terorisme tersebut. Tidak mengherankan apabila konsep/definisi mengenai terorisme yang masih menuai perdebatan tersebut belakangan memunculkan sebuah ungkapan *'one man's terrorist is another man's freedom fighter'* (Snyder, 2008:171-172). Sehingga konsekuensinya, seringkali masih terjadi subjektifitas yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu khususnya dalam lingkup internasional dalam menjustifikasi suatu kelompok untuk dikategorikan dalam daftar terorisme global. Sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Kerjasama Negara Teluk (*Gulf Cooperation Council (GCC)*) pada 2 Maret 2016 menyatakan bahwa Hizbullah merupakan sebuah organisasi terorisme (Al-Jazeera, 2016a).

GCC yang merupakan organisasi regional di Timur Tengah ini beranggotakan beberapa negara Semenanjung Arab, yakni Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan Hizbullah sebagai kelompok teroris yang membahayakan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Pada umumnya, penetapan status teroris oleh sebuah negara ditujukan untuk mendapatkan keuntungan politik secara langsung, yakni merasionalisasi negara justifikator sebuah dukungan dan legitimasi dari negara-negara yang memiliki visi yang serupa dengan mereka. Tujuannya adalah untuk dapat bersama-sama melawan dan mengeliminir kelompok yang telah ditetapkan sebagai teroris.

Dalam poin ini, penetapan status teroris terhadap Hizbullah oleh GCC dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang sama. Namun, berbeda dengan penetapan kelompok teroris pada umumnya, keputusan GCC untuk menetapkan Hizbullah sebagai teroris mendapatkan respon yang negatif dari beberapa negara yang menilai keputusan tersebut memuat suatu kepentingan yang tendensius (Rizk, 2016). Respon negatif tersebut muncul di kalangan beberapa negara-negara di Timur Tengah seperti pemerintah Tunisia, Aljazair, Suriah, Lebanon, Iran dan segenap elemen perlawanan pada beberapa negara di regional Timur Tengah yang ditunjukkan dengan sikap tidak setuju bahkan mengecam keputusan tersebut (Press TV, 2016). Perbedaan respon antara GCC dengan beberapa negara ini menunjukkan adanya kontraversi antar pihak terhadap eksistensi Hizbullah itu sendiri.

Justifikasi teroris tersebut pada kenyataannya berbanding terbalik dengan rekam jejak Hizbullah. Sebab pada kenyataannya kelompok ini cenderung mendapatkan respon positif masyarakat yang bukan hanya dari negara asalnya Lebanon, akan tetapi juga di beberapa negara di Timur Tengah. Respon positif tersebut muncul dikarenakan kontribusi positif yang diberikan oleh Hizbullah dalam menghadapi permasalahan, baik secara khusus dalam lingkup domestik Lebanon maupun secara umum bersifat lintas batas negara meliputi negara-negara Timur Tengah. Kontribusi positif tersebut diwujudkan oleh peran aktif Hizbullah dalam membebaskan Lebanon dari invasi Israel, memberi bantuan kepada masyarakat Lebanon melalui aktifitas sosial di berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur), bahkan merespon isu terorisme.

Secara resmi Hizbullah muncul pada tahun 1982 sebagai gerakan yang berlandaskan prinsip ideologi Islam di Lebanon. Pergerakan Hizbullah berdiri pada awal 80-an hingga era kontemporer secara signifikan disokong oleh Republik Islam Iran. Pasca berhasilnya revolusi Iran di tahun 1979, Ayatullah Khomeini selaku pemimpin revolusi tersebut memberikan instruksi untuk membantu pembentukan Hizbullah. Instruksi tersebut dilakukan atas latarbelakang invasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon (Devore, 2012).

Sejak awal pendiriannya, implementasi kebijakan luar negeri Republik Islam Iran secara jelas ditunjukkan dengan pembelaannya terhadap Palestina (otomatis sebagai musuh Israel) (Sadjadpour and Taleblu, 2015). Fakta yang tak dapat ditolak bahwa, invasi Israel di wilayah Lebanon tersebut menorehkan bekas yang mendalam bagi rakyat Lebanon, lantaran menimbulkan kerugian material berupa infrastruktur sosial serta jatuhnya korban jiwa akibat penggusuran dan bombardir yang dilakukan Israel (Shahid, 2002)

Invasi teritorial Israel tersebut menyebabkan rakyat Lebanon tidak memiliki pilihan lain kecuali dengan memberikan perlawanan bersenjata. Perlawanan tersebut secara dominan direpresentasi oleh Hizbullah. Melalui suplai logistik yang dikirim dari Iran baik berupa pendanaan, persenjataan, maupun kebutuhan lain, Hizbullah berhasil mengalahkan Israel pada beberapa *front* pertempuran dan sekaligus mampu memaksa Israel untuk mundur dari wilayah Lebanon (Kazim, 2012:24-29). Perlawanan Hizbullah terhadap invasi yang dilakukan Israel tersebut kemudian memberikan popularitas tersendiri di hadapan rakyat Lebanon. Corak ideologi Islam yang mendasari pergerakan Hizbullah semakin menguat dan mendapatkan dukungan dari rakyat Lebanon seiring dengan gagalnya gerakan-gerakan yang condong terhadap ideologi kiri dan nasionalis sekuler dalam merespon invasi Israel di teritori Lebanon bagian selatan (Shalabi, 2015:17). Popularitas tersebut memperluas pengaruh Hizbullah bukan hanya pada konteks perlawanan bersenjata akan tetapi juga pada lingkup pengaruh politik domestik Lebanon (Kazim, 2012:94).

Masih berkaitan dengan isu Israel, Hizbullah juga memperluas lingkup perlawanannya dengan mendukung kelompok jihad di Palestina. Didukung oleh Iran dan Suriah yang tergabung dalam *Axis of Resistance* (poros perlawanan), perlawanan Hizbullah terhadap Tel Aviv digencarkan dengan merangkul pihak-pihak yang memiliki tujuan serupa (Boroujerdi, 2014). Fakta tersebut direalisasikan dengan distribusi persenjataan, logistik dan finansial serta pelatihan militer yang diberikan Hizbullah kepada *Al-Qassam Brigades* (Hamis) untuk mendukung perjuangan melawan Israel di wilayah Palestina tanpa memandang

perbedaan ideologi Islam di antara keduanya (Cohen and White, 2009). Sehingga, dengan model pendekatan tersebut, Hizbullah dapat meraih simpati dan popularitas dari masyarakat yang tidak hanya terbatas pada internal Lebanon, namun telah meluas pada regional Timur Tengah. Bagaimanapun, pendirian negara Zionis di tanah Palestina merupakan isu yang krusial bagi dunia Arab maupun umat muslim secara global, karena eksistensi Israel merupakan simbol penjajahan terhadap bangsa Arab dan umat Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian Hizbullah dianggap sebagai pahlawan Arab oleh sebagian besar komunitas di Timur Tengah atas perhatiannya terhadap isu Palestina (Khatib, 2012).

Popularitas serta dukungan masyarakat terhadap Hizbullah, pada akhirnya menyebabkan organisasi tersebut juga terlibat dalam pentas politik nasional. Kepercayaan politik masyarakat Lebanon oleh Hizbullah kemudian diwujudkan dalam bentuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Melalui sub-organisasinya, Hizbullah berhasil mendirikan fasilitas dan pelayanan publik Lebanon seperti sekolah, rumah sakit, hunian penduduk, keringanan biaya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, bahkan restorasi hunian masyarakat akibat imbas konflik dengan Israel (Kazim, 2012:95-96). Melalui kegiatan sosial tersebut Hizbullah muncul sebagai organisasi yang memiliki rekam jejak progresif, responsif, populis dan profesional dengan lembaga penunjang yang terkonsolidasi. Akan tetapi pada lain sisi, fakta tersebut ditepis oleh tuduhan negara Barat yang sejak lama memandang Hizbullah sebagai entitas teror global. Pandangan yang bersifat generalisir tersebut mencoba untuk menyamakan eksistensi Hizbullah dengan jaringan kelompok teroris internasional seperti Al-Qaeda. Tentu generalisasi tersebut tidak berdasarkan pada realita perbedaan kontras kedua kelompok tersebut. Pasalnya, eksistensi Hizbullah memiliki rekam jejak, kontribusi sosial, dan prinsip-prinsip dasar ideologi pergerakan yang tidak sama apabila disejajarkan dengan standar kelompok gerakan Islam sebagaimana Al-Qaeda.

Pada dasarnya, Al-Qaeda mendasarkan pergerakannya dengan berbasis ideologi Islam dan memiliki level militansi yang cenderung sepadan (walaupun berbeda orientasi) dengan Hizbullah di ranah Internasional. Semenjak peristiwa 9/11 tahun 2001 hingga pada deklarasi negara Islam oleh ISIS pada tahun 2014, dunia internasional disibukkan dengan isu keamanan global untuk perang melawan terorisme. Fenomena tersebut sekaligus mengangkat nama Al-Qaeda sebagai induk dari beberapa organisasi jaringan teroris internasional (Caruso, 2001). Terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil antara Hizbullah dengan Al-Qaeda yang pada nantinya akan membedakan haluan pergerakan antara kedua organisasi tersebut, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut partisipasi sosial. Perbedaan ini perlu diketahui untuk membedakan Hizbullah dengan spesifikasi standar teroris global yang telah ditetapkan oleh dunia internasional.

Misalnya dalam konteks ideologis, landasan ideologi dan strategi jihad menurut pandangan Al-Qaeda beserta segenap organisasi yang berafiliasi dengannya adalah dengan menggunakan ideologi *takfir* atau metode pengkafiran (justifikasi bagi pihak yang menolak ajaran Islam) terhadap entitas selain dirinya (Byman, 2015). Melalui prinsip jihad ala takfirisme inilah kemudian menjadi legitimasi Al-Qaeda bersama organisasi lain yang berafiliasi dengannya untuk melancarkan strategi jihad yang bersifat agresif tanpa sedikitpun celah kompromistis dalam tiap aksi yang dilakukannya (Byman, 2015). Singkatnya, dasar legitimasi organisasi Al-Qaeda untuk melakukan tindakan teror dan berbagai macam kriminalitas dalam lingkup global lainnya adalah dikarenakan kekafiran lawannya, bukan dengan pertimbangan yang rasional dan proporsional.

Apabila ditinjau melalui konsep pergerakannya, implementasi pergerakan yang dilakukan Al-Qaeda hanya dalam lingkup ekspansi pengaruh dan terbatas pada dimensi militeristik. Berbeda dengan Al-Qaeda, implementasi jihad Hizbullah cenderung luwes bekerjasama dengan pihak-pihak seperti elemen pemerintahan dan tidak sesederhana menerapkan konteks jihad dalam istilah militer saja, akan tetapi konteks jihad yang sifatnya lebih luas seperti intelektual, sosial dan politik. Dalam perspektif Al-Qaeda pun tidak akan dijumpai dalam

struktur organisasinya yang secara khusus berfungsi memberdayakan perempuan (Kazim, 2012:75). Bahkan dalam beberapa kasus sebagaimana yang dilakukan ISIS (sayap Al-Qaeda di wilayah Irak) pada beberapa wilayah yang dikuasainya, jangkakan memberdayakan perempuan, kelompok ISIS justru menjual wanita yang dianggapnya sebagai properti rampasan perang (Warrick, 2016). Berbeda dengan ISIS, Hizbullah memiliki divisi pemberdayaan perempuan yang aktif dalam menyediakan proyek kesejahteraan sosial dan memperjuangkan hak-hak perempuan (Love *et al.*, 2010:22). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Hizbullah merupakan organisasi yang tidak kaku, emansipatif serta fleksibel dalam sosial masyarakat. Apalagi selama ini praktik militer Hizbullah cenderung menerapkan taktik *defensif* (bertahan dari serangan lawan), berbeda apabila dibandingkan dengan Al-Qaeda yang menggunakan taktik *ofensif* (menyerang terlebih dahulu). Oleh karena itulah, Hizbullah lebih pantas diistilahkan dengan sebutan *muqawamah* (perlawanan, *resistance*) dibandingkan dengan sebutan teroris (Kazim, 2012:62).

Ketika dunia internasional digemparkan dengan munculnya deklarasi negara khilafah ISIS dan segenap kelompok afiliasi Al-Qaeda di Suriah, isu terorisme kembali menempati posisi tertinggi ancaman global. Peralpnya, disamping menjadi ancaman bagi regional Timur Tengah, aksi teror yang dilakukan ISIS dan para afiliasi Al-Qaeda tersebut telah banyak menimbulkan krisis humanitarian (pengungsi) yang berdampak terhadap stabilitas dunia internasional. Merespon ancaman teror tersebut, Hizbullah berkomitmen untuk memberantas kelompok teroris afiliasi Al-Qaeda (Jabhat al-Nusrah & ISIS) di Suriah dan Irak (Holmquist, 2015). Keterlibatan Hizbullah di Suriah dan Irak semakin kuat menunjukkan akan kontribusi organisasi tersebut dalam memberantas jaringan terorisme global. Peran Hizbullah di medan konflik Suriah dan Irak secara kongkrit dilakukan demi membendung berkembangnya kelompok teroris seperti ISIS dan Jabhat al-Nusrah yang mengancam keamanan Lebanon (Shalabi, 2015:17).

Kenyataan tersebut sekaligus memposisikan justifikasi teroris GCC terhadap Hizbullah sebagai sebuah hal yang bersifat paradoks. Sebab asumsinya, sebuah fenomena aneh apabila organisasi seperti Hizbullah yang memiliki kontribusi dalam memberantas jaringan teroris global, namun justru dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh GCC. Bahkan dalam pidatonya, Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah menegaskan bahwa ;

“Jika tanpa peran Hizbullah dalam membantu *Hasyad Sya’bi* (milisi rakyat Irak) melawan ISIS yang menjadi ancaman bagi kawasan negara-negara teluk, niscaya saat ini ISIS sudah berada di istana kalian, menawan wanita kalian dan menistakan kehormatan kalian. Dan kami (Hizbullah) tidak meminta sedikitpun bantuan kalian untuk itu. Namun, bukannya mengucapkan terima kasih, justru kalian (negara teluk) menyebut kami sebagai teroris” (Maula TV, 2016).

Negara Arab teluk seharusnya juga turut memberikan apresiasi terhadap Hizbullah yang berkontribusi positif mewujudkan keamanan di kawasan Timur Tengah dari bahaya kelompok teroris. Selain rekam jejak Hizbullah yang patut dibanggakan di dalam internal Lebanon, Hizbullah juga pantas diapresiasi lantaran kegigihan perlawanannya membela Palestina serta rangkaian keberhasilannya melawan Israel pada beberapa pertempuran strategis. Keberhasilan Hizbullah melawan Israel sepatutnya menjadi kebanggaan serta simbol perlawanan bangsa Arab melawan invasi Zionis yang dalam beberapa dekade sebelumnya berujung pada kegagalan (Brittanica, tanpa tahun). Prestasi serta rekam jejak yang telah ditorehkan oleh Hizbullah dibantah oleh negara Arab yang tergabung dalam GCC dengan menuding Hizbullah sebagai kelompok pemicu kerusuhan di wilayah Timur Tengah. Logisnya, keputusan yang dilakukan GCC terhadap Hizbullah menandakan adanya subjektifitas pandangan dan pertimbangan tendensius yang mendasari penetapan status teroris Hizbullah. Dari latarbelakang tersebut, maka penulis mengangkat judul:

**“KEPUTUSAN DEWAN KERJASAMA NEGARA ARAB TELUK
MENETAPKAN HIZBULLAH SEBAGAI ORGANISASI TERORIS”.**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu batasan materi dan batasan waktu. Ruang lingkup materi membatasi cakupan pembahasan yang nantinya juga akan menentukan tingkatan analisis pada konsep dan teori yang akan digunakan dalam karya ini. dengan menetapkan ruang lingkup pembahasan, maka penulis secara komprehensif dapat menjelaskan fokus bahasan pada titik tertentu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan dalam suatu penulisan untuk memfokuskan garis besar pembahasan masalah yang akan diteliti. Batasan materi dalam tulisan ini, penulis membatasi materi penelitian terkait penjelasan tentang proses sekuritisasi yang dilakukan oleh GCC dalam merespon ancaman yang ditimbulkan oleh Hizbullah.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam suatu penulisan ilmiah ditujukan untuk menegaskan rentan waktu peristiwa atau objek yang dianalisis. Batasan waktu tersebut diperlukan agar peristiwa atau objek yang dikaji tetap dalam lingkup waktu yang relevan dengan fokus pembahasan karya tulis ilmiah. Batasan waktu yang ditentukan dalam tulisan ini dimulai sejak tahun 2011 sampai 2016. Relevansi batasan waktu tersebut dipilih karena bertepatan dengan dimulainya peristiwa *Arab spring* yang terjadi di Timur Tengah pada awal 2011. Bertolak dari peristiwa *Arab Spring* yang menyebabkan konflik pada negara-negara Timur Tengah, menyebabkan Hizbullah untuk juga terlibat ke dalam konstelasi politik regional. Keterlibatan serta progresifitas Hizbullah dalam konstelasi politik *Arab Spring* dipersepsikan oleh GCC sebagai ancaman yang kemudian berujung pada penetapan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris pada Maret tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperoleh dari sebuah latar belakang penelitian. Dari latar belakang tersebut, kemudian muncul permasalahan yang harus di cari penyelesaiannya melalui proses penelitian, sehingga pada akhirnya diperoleh sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana proses penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh *Gulf Cooperation Council (GCC)*?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk menjawab rumusan masalah dengan menggabungkan fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk memastikan kedudukan argumen. Secara spesifik tujuan penelitian ini menjelaskan proses sekuritisasi yang dilakukan Arab Saudi sehingga pada akhirnya Hizbullah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh negara-negara GCC secara keseluruhan. Namun, sebelum menjelaskan proses sekuritisasi tersebut, terlebih dahulu penulis akan mengidentifikasi agenda keamanan para *securitizing actors* dalam merespon eksistensi Hizbullah di regional Timur Tengah khususnya di negara Arab Teluk.

1.5 Landasan Teoritis

Suatu penelitian yang bersifat ilmiah memerlukan adanya teori ataupun konsep yang berfungsi sebagai instrumen analisa. Fungsi dari adanya instrumen analisa tersebut yakni sebagai acuan yang membantu peneliti untuk menyederhanakan realita permasalahan yang kompleks berdasarkan definisi para ahli. Dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan Definisi Terorisme dan Teori Sekuritisasi. Ulasan tentang Definisi Terorisme diperlukan untuk memahami kategori standar dari sebuah entitas teror, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur menilai eksistensi Hizbullah. Sedangkan teori Sekuritisasi diperlukan untuk menjelaskan proses pengamanan yang dilakukan negara anggota GCC terhadap eksistensi Hizbullah sehingga muncul penetapan organisasi tersebut sebagai teroris.

1.5.1 Definisi Terorisme

Penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh GCC menuai kontroversi dari beberapa negara di Timur Tengah. Perbedaan pandangan terhadap eksistensi Hizbullah tersebut mengindikasikan akan samarnya sebuah pengertian tentang standar definisi terorisme. Maka dari itu diperlukan sebuah pemahaman terkait diskursus terorisme, sehingga pembaca dapat memahami benang merah terkait perbedaan pandangan antar pihak mengenai keberadaan Hizbullah. Sebenarnya, Terorisme merupakan diskursus ilmu sosial dan kemanusiaan yang secara definitif masih belum mendapatkan konsensus secara universal. Sejauh ini, walaupun telah mengalami riset yang mendalam dan perdebatan yang cukup komprehensif, definisi terorisme terbukti masih mengalami pertentangan yang cukup substansial di kalangan para ahli (McConaghy, 2017:12). Berkaitan dengan diskursus terorisme ini, secara umum banyak analisis dari para pakar terorisme tersebut sampai pada kesimpulan bahwa istilah teroris itu meliputi pengertian sebagai berikut; “*One man’s terrorist is another man’s freedom fighter*”. Selain itu, dalam perkembangan definisi tersebut masih seringkali terbiaskan (termasuk oleh kepentingan tertentu yang sarat tujuan politik) dan cenderung hanya sebuah bentuk pengulangan dari definisi pada era sebelumnya sehingga masih belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan diskursus terorisme (Archetti, 2013:13).

Secara historis, upaya mendefinisikan istilah terorisme dalam lingkup global dimulai pada era 1930an. Akan tetapi dalam aspek dunia modern, definisi terorisme kembali menjadi perhatian dunia ketika terdapat kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap atlet Israel di *Olympic Games* tahun 1972. Pasca penyerangan tersebut, isu terorisme menempati *top issue level* di PBB (Herschinger, 2013). Dalam merespon tragedi tersebut, majelis umum PBB membentuk *Ad Hoc Committee on International Terrorism* yang memiliki tugas utama yakni membentuk definisi legal tentang terorisme global sebagai bentuk perjanjian internasional kala itu. Walaupun telah menjadi *top issue level* di PBB, akan tetapi komite tersebut masih belum mencapai kesepakatan terkait definisi terorisme, dan perdebatan pun masih berkembang hingga era kontemporer

(Herschinger, 2013). Berdasarkan keputusan PBB, secara esensial mendeskripsikan definisi terorisme sebagai “*one of the most dangerous challenges to humanity*”.³ Sejak saat itu, terorisme dianggap sebagai ancaman bagi komunitas global, keamanan dan perdamaian internasional atau bahkan umat manusia (Herschinger, 2013).

Menurut Alex Schmid dalam bukunya *Political Terrorism* (1984), mengulas setidaknya terdapat seratusan definisi terkait istilah terorisme yang sekaligus membuktikan bahwa diskursus tersebut masih belum mendapatkan kesepakatan dalam pendefinisian secara universal. Bahkan pasca 20 tahun kemudian riset untuk mencari definisi yang pas untuk istilah terorisme pun masih dalam proses yang tak kunjung usai (Archetti, 2013:14). Kerancuan dalam mendefinisikan istilah terorisme menimbulkan sebuah skeptisme dari kalangan ahli tentang siapa yang sebenarnya berhak mendefinisikan istilah tersebut. Schmid lebih lanjut mengidentifikasi empat ranah perspektif dalam diskursus terorisme, yakni; perspektif akademik, perspektif pemerintah negara, perspektif debat publik, dan perspektif kelompok anti-pemerintah.⁴ Schmid juga menambahkan bahwa pada dasarnya perbedaan ranah perspektif tersebut juga akan menghasilkan tipologi yang berbeda terkait isu terorisme, karena pada dasarnya definisi terhadap suatu objek terorisme memiliki tendensi untuk merefleksikan kepentingan pihak-pihak yang mencoba untuk mendefinisikan istilah terorisme. Menurut Schmid, situasi tendensial tersebut banyak dilakukan oleh pihak pemerintah dalam tiap konflik yang mereka alami. Tindakan dan eksistensi pemerintah secara prinsipil oleh Schmid disebut sebagai “*defining agency*” (Richards, 2015:12).

Bagaimanapun, harus diakui bahwa definisi terorisme itu sendiri pada dasarnya merupakan sebuah konstruksi sosial sehingga menimbulkan kesimpulan yang bersifat paradoks dalam upaya untuk mendefinisikan istilahnya. Disebut sebuah konstruksi sosial, yakni karena teori tentang terorisme ini rentan terhadap subjektivitas pihak-pihak tertentu yang memiliki otoritas untuk memformulasikan

³ entitas berbahaya yang mengancam kemanusiaan

⁴ Alex Schmid menyebut kelompok ini dengan “*Those ‘who oppose many of our societies’ values and support or perform acts of violence against what they consider repressive states*”.

definisi teroris atau berdasarkan konstruksi suatu kelompok yang berhasil membentuk persepsi masyarakat luas tentang eksistensi sebuah entitas tertentu sebagai teroris (Richards, 2015:8). Mekanisme *labelling* teroris terhadap suatu entitas tertentu tidak terlepas dari sebuah konstruksi sosial, membuat komunitas internasional mengalami hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam mendefinisikan entitas terorisme. Faktanya, seringkali definisi terorisme terkonsentrasi sebagai upaya untuk menyudutkan para pihak yang dianggap kontra *status-quo* dan sekaligus sebagai legitimasi pemegang otoritas untuk merespon ancaman teror dengan menggunakan kekerasan (Richards, 2015:68). Kongkritnya, pengertian terorisme sejatinya merupakan konstruksi yang bersifat peyoratif untuk mendukung kepentingan dan *status-quo* otoritas kelompok yang berkuasa. Oleh sebab itu, ketidakpastian definisi terorisme membuat proses *labelling* terhadap suatu kelompok masih bertumpu pada subjektivitas perspektif dari kelompok kepentingan.

Absennya objektivitas dalam konseptualisasi istilah teroris mengindikasikan bahwa implementasi dari definisi terorisme rentan terhadap praktik manuver politik yang sengaja dipilih untuk menjustifikasi kekerasan terhadap pihak lain. Dalam konteks tersebut, sebuah label yang dijustifikasi kepada kelompok tertentu pada dasarnya masih mengundang polemik dan bersifat propagandistik (Richards, 2015:144). Apabila kembali merujuk pada istilah “*One man’s terrorist is another man’s freedom fighter*”, disimpulkan bahwa ‘terorisme’ hanyalah sebuah kata yang dibentuk menurut pada kepentingan suatu pihak tertentu dibandingkan sebuah analisis konseptual yang jelas membedakan dengan manuver politik (Richards, 2015:145). Perlu difahami bahwa perspektif dari para pembuat kebijakan (pemerintah) ini pada dasarnya memang bertujuan untuk menargetkan hal yang dianggap mengancam eksistensi mereka walaupun memang dalam praktiknya pun terkadang masih seringkali terdirtorsi dan cenderung bersifat *double standard* (Richards, 2015:27)

Diluar asumsi bernuansa politis tersebut, juga terdapat perspektif independen yang mencoba untuk mendefinisikan istilah terorisme dengan

perspektif yang lebih netral. Perspektif independen ini yang kemudian dikembangkan oleh kalangan akademisi untuk menjelaskan definisi terorisme yang bebas akan intervensi pemerintah atau *status-quo* kelompok tertentu. Perspektif ini menitik beratkan pada pendekatan yang lebih fleksibel dan bervariasi dalam memandang fenomena terorisme. Dalam perspektif ranah akademik, studi tentang terorisme tidak hanya terbatas pada aspek sains politik saja, akan tetapi multi-disiplin ilmu lainnya meliputi ilmu hubungan internasional, psikologi, filosofi, kriminologi, ekonomi, studi perdamaian dan konflik, komunikasi dan lain sebagainya. Dengan seperti itu, seseorang dapat menginterpretasikan definisi terorisme dengan kerangka berfikir yang beragam, sehingga definisi terorisme tidak melulu diartikan melalui persepsi kelompok tertentu yang menganggap terorisme hanya dapat diatasi dengan *military action*. Dalam ranah akademik, definisi terorisme dapat diartikulasi sebagai aksi kriminal, manuver politik, atau bahkan sebagai media komunikasi suatu kelompok yang ingin menyampaikan pesan kepada suatu rezim berkuasa (Richards, 2015:31). Dengan demikian, berdasarkan perspektif akademik ini keputusan para *policymakers* dalam upaya memberantas terorisme dapat memberikan solusi yang tidak terbatas pada upaya militeristik dan dalam perspektif *state*-sentris semata.

Upaya dunia internasional dalam mendefinisikan istilah terorisme terbukti belum mencapai kesepakatan secara universal, khususnya bagi kelompok yang menggunakan pendekatan *state*-sentris. Seiring munculnya perdebatan tersebut, definisi terorisme juga tengah mengalami perkembangan yang signifikan dalam ranah akademik. Terdapat beberapa narasi konseptual yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai parameter yang relevan dalam mendefinisikan istilah terorisme. Narasi konseptual yang diformulasikan oleh para ahli bidang terorisme tersebut pada dasarnya memiliki pola yang hampir sama dalam pendefinisian istilah teroris, namun terkadang memiliki standing position yang berbeda dalam arena metodologis. Sebagai permulaan, penulis mengadopsi definisi terorisme menurut Richard English dalam karyanya "*Terrorism: How to Respon*", beliau mendefinisikan terorisme sebagai berikut :

“Terrorist involves heterogenous violence used or threatened with a political aim; it can involve a variety of acts, of targets, and of actors; it possesses an important psychological dimension, producing terror or fear among a directly threatened group and also a wider implied audience in the hope of maximizing political communication and achievement; it embodies the exerting and implementing of power, and the attempted redressing of power relations; it represent a subspecies of violent and non-violent attempts at political leverage (McConaghy, 2017:13).”

Secara literal, Richard mendefinisikan bahwa terorisme merupakan tindakan kekerasan maupun ‘non-kekerasan’ yang bertujuan untuk mengancam suatu pihak tertentu demi mewujudkan tujuan politik. Dalam praktiknya, terorisme dapat dilancarkan melalui berbagai macam aksi, yang melibatkan berbagai sasaran dan aktor pelaksana. Tujuannya, sebagai upaya penyampaian pesan politik kepada *Auidence* (pihak yang dituju). Sehingga, dengan mencoba untuk memberikan dampak psikologis, diharapkan tindakan terorisme pada titik tertentu dapat memberikan rasa takut diantara para targetnya untuk kemudian memberikan *result* yang lebih luas terhadap pencapaian tujuan politik para pelaku teror. Definisi terorisme menurut Richard English juga diafirmasi oleh pendapat akademisi di bidang terorisme lainnya, Anthony Richards. Sedikit berbeda dengan Richard English, walaupun masih tetap fokus dengan dampak psikologis yang ditimbulkan, Anthony tidak membatasi tindakan terorisme hanya pada ranah *non-state actors*, akan tetapi juga mencakup pada *state-actors* yang juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan metode teror dalam mencapai tujuan politik. Berikut pendapat Anthony Richards terkait definisi terorisme : *“Terrorism is a method that entails the use of violence of force or the threat of violence or force with the primary purpose of generating a psychological impact beyond the immediate victims or object of attack for a political motive (Richards, 2015:146).”*

Masih tetap mengacu pada aspek *“psychological impact”*, Anthony Richards mendefinisikan istilah terorisme merupakan metode yang bertujuan untuk menciptakan dampak psikologis terhadap korban atau objek tertentu dalam upaya mewujudkan motif politik kelompoknya. Namun, subjek kajian yang

dibahas melingkupi antara *state* dan *non-state actors*. Karena faktanya, diluar pemahaman *mainstream* yang selama ini mendeskripsikan bahwa tindakan terorisme (dipersepsikan) dilakukan oleh kelompok/golongan yang merepresentasi agama, ideologi, maupun haluan politik tertentu, juga terdapat pemahaman bahwa tindakan teror yang sengaja dilakukan oleh pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk melenyapkan kelompok/pihak oposisi atau untuk memaksa komunitas masyarakat agar tunduk di bawah instruksi penguasa. Anthony juga mengulas bahwa tidak jarang ditemui pemerintah negara justru berperan sebagai sponsor terorisme itu sendiri dengan menyediakan asistansi (termasuk diantaranya finansial dan sumberdaya material) kepada individu atau kelompok yang bertujuan untuk melakukan aksi teror (Richards, 2015:146).

Definisi terorisme yang masih sarat akan subjektifitas dari intervensi pemegang otoritas kekuasaan memiliki relevansi dengan fenomena penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh GCC. Pasalnya, dalam konteks GCC, penetapan tersebut dilandasi oleh pertimbangan negara Arab Teluk yang menganggap Hizbullah merupakan entitas yang mengancam *status-quo* mereka. Oleh karena itu, dalam konteks GCC *vis-à-vis* Hizbullah ini istilah terorisme masih mengacu pada perspektis *state* sentris yang bertumpu pada definisi otoritas yang berkuasa. *Labelling* teroris tersebut merupakan agenda keamanan GCC dalam melindungi *status-quo* mereka dari eksistensi Hizbullah. Untuk menjelaskan lebih spesifik terkait agenda keamanan GCC tersebut, penulis akan menjelaskan lebih lanjut dengan teori sekuritisasi.

1.5.2 Teori Sekuritisasi

Dalam upaya menjelaskan agenda keamanan GCC, diperlukan sebuah landasan teoritik agar dalam proses penulisan skripsi ini peneliti memiliki acuan yang sistematis dalam mengartikulasikan *study case* pembahasan. Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan teori sekuritisasi. Teori sekuritisasi pada dasarnya memiliki pengertian sebuah proses pengamanan negara dari sesuatu isu yang dianggap sebagai ancaman keamanan negara tersebut. Oleh karena disandarkan pada anggapan (konstruksi) sebuah negara, sebagaimana yang

dikemukakan oleh Barry Buzan, teori sekuritisasi memiliki asumsi dasar bahwa isu keamanan sejatinya merupakan hasil konstruksi subjektif dari aktor tertentu terhadap suatu entitas ancaman. Konstruksi tersebut berupa wacana akan wujud ancaman (*existential threat*) suatu entitas yang dimaksud. Jadi isu keamanan merupakan pengaruh konstruksi yang disimpulkan oleh subjek-subjek tertentu; antara wacana yang di keluarkan oleh aktor tertentu dan kemudian di setuju oleh *audience*. Pola tersebut di istilahkan dengan *securitization* (sekuritisasi) (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:31).

Lebih lanjut Barry Buzan mengulas bahwa dalam perkembangannya teori sekuritisasi mengalami perubahan yang lebih dinamis (terkait persepsi ancaman dari sebuah entitas tertentu) bahwa keamanan tersebut diartikan tidak hanya sekedar berupa isu yang bersifat militeristik (Snyder, 2008:60-62). Perubahan dinamis ini terjadi karena dalam beberapa kasus terbukti bahwa penanganan yang bersifat militeristik tidak selalu dapat menyelesaikan permasalahan, contohnya adalah penanganan isu terorisme yang masih belum terselesaikan dengan hanya mengandalkan pendekatan militer. Oleh karena itu studi sekuritisasi modern memiliki interpretasi yang lebih luas dan fleksibel mengenai status keamanan. Dalam penelitian ini, asumsi dasar sekuritisasi tersebut akan diterapkan dalam upaya menjelaskan alasan penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh GCC.

Secara teoritis, sekuritisasi menurut Buzan merupakan wujud tindakan ekstrim dari proses politik yang diterapkan berdasarkan kondisi darurat yang mengancam eksistensi negara. Pada dasarnya setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga klasifikasi berdasarkan urgensinya. Pertama adalah *non-politicized*, yang berarti bahwa pemerintah suatu negara tidak merespon isu ini dikarenakan tidak memiliki tingkat urgensi yang signifikan dalam perdebatan ranah publik. Kedua adalah *politicized*, yang berarti bahwa suatu isu yang muncul telah memasuki ranah kebijakan publik yang secara signifikan membutuhkan respon pemerintah khususnya dalam kebutuhannya akan alokasi sumberdaya atau kebijakan-kebijakan lain. Ketiga adalah *to securitized*, yang berarti bahwa sebuah

isu yang terjadi telah dimunculkan sebagai ancaman (*existential threat*) bagi suatu negara, sekaligus membutuhkan tindakan bersifat darurat yang membolehkan prosedur politik lebih dari prosedur politik sebagaimana mestinya (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:23-24). Dengan mengacu pada kategori-kategori tersebut, pemerintahan suatu negara mengartikulasikan perspektif keamanan dengan memulai tindakan dari fakta-fakta yang sifatnya umum sebelum kemudian merambah pada konteks yang sifatnya lebih spesifik sampai pada akhirnya mengambil manuver untuk menanggapi fakta-fakta tersebut. Berangkat dari kategori terakhir (*to securitized*), praktik sekuritisasi itulah yang kemudian dikaitkan dengan perlunya upaya khusus dalam membendung suatu ancaman.

Dalam proses analisa sekuritisasi, Buzan mengklasifikasi beberapa aspek yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan sekuritisasi negara dari suatu objek ancaman, antara lain yakni:

1. *Existential Threat* : pihak yang dianggap mengancam keberadaan *referent object*.
2. *Referent Object* : sesuatu yang dipandang sebagai entitas yang eksistensinya terancam dan sekaligus memiliki klaim legitimasi untuk *survive* (bertahan hidup).
3. *Securitizing Actors* : merupakan pihak-pihak yang melakukan sekuritisasi isu dengan mendeklarasikan *referent object* sebagai entitas yang mengalami ancaman.
4. *Significant Audience* : merupakan pihak-pihak yang coba untuk dipengaruhi oleh *securitizing actors* untuk mendapatkan legitimasi dalam menindak lanjuti ancaman.
5. *Extraordinary Measures* : adalah tindak lanjut kongkrit dari para *Securitizing Actors* dalam upaya menetralsir ancaman yang ditimbulkan oleh *existential threat*.

Dalam upayanya menciptakan sekuritisasi (*securitizing move*), beberapa aspek tersebut memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan sebuah agenda sekuritisasi. Ketika sebuah isu dimunculkan (dikonstruksikan) sebagai sebuah ancaman (*existential threat*) bagi *referent object* (negara, teritori dan masyarakat), maka akan terjadi serangkaian proses yang melibatkan beberapa aspek diatas untuk menetapkan suatu objek sebagai ancaman, hingga pada akhirnya muncul sebuah tindakan kongkrit untuk mewujudkan stabilitas keamanan (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:26).

Dengan kata lain, yang menjadi dasar sebuah tindakan sekuritisasi (*securitizing move*) itu dapat dikatakan berhasil adalah ketika wacana yang diusung oleh *securitizing actors* (figur-figur “baik individu maupun kelompok” yang berpengaruh dalam negara) untuk menetapkan suatu objek sebagai ancaman (*existential threat*) mendapatkan persetujuan oleh *significant audience* (pihak yang hendak diyakinkan) (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:36). Setelah wacana sekuritisasi yang diusung oleh para aktor yang berpengaruh mendapat persetujuan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *emergency action* (aksi darurat) sebagai wujud nyata para aktor yang terlibat untuk menerapkan pengamanan dari objek (*existential threat*) yang mengancam stabilitas mereka (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:27).

Namun, dalam penerapan wacana sekuritisasi khususnya dalam mekanisme praktik penetapan sebuah objek sebagai *existential threat*, terdapat hal menarik yang perlu digaris bawahi. Sebagaimana disebutkan oleh Buzan, Weaver dan Jaap de Wilde dalam karyanya *Security : A New Framework for Analysis* ;

“Thereby, the actor has claimed a right to handle the issue through extraordinary means, to break the normal political rules of the game. “Security” is thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue becomes a security issue—not necessarily because a real existential threat exist but because the issue is presented as such a threat” (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:24).

Hal menarik ketika praktik penetapan objek sebagai *existential threat* oleh para *securitizing actors* adalah terkait pendekatan yang cenderung konstruktif

dalam proses mengidentifikasi sebuah objek ancaman. Pendekatan konstruktif tersebut dilakukan oleh *securitizing actors* agar wacana yang diusung lebih mudah diterima dan memiliki tempat dalam ruang diskusi publik (*audience*). Jadi apabila implementasi wacana ancaman direpresentasikan dengan menggunakan pendekatan sekuritisasi, para aktor sekuritisasi memiliki hak untuk melakukan kategorisasi suatu objek sebagai suatu *existential threat* walaupun tidak berdasarkan pada nilai-nilai standar indikator ancaman yang pada umumnya berlaku, akan tetapi lebih pada nilai subjektif bagaimana isu tersebut dideklarasikan sebagai sebuah ancaman. Konsekuensinya adalah, penetapan objek *existential threat* dengan menggunakan mekanisme sedemikian rupa dapat memberikan celah kemungkinan bagi aktor untuk melakukan pelanggaran standar aturan internasional yang berlaku.

Berangkat dari titik itulah kemudian menjadi legitimasi sebuah negara untuk melakukan tindakan sekuritisasi berupa keabsahan untuk melakukan mobilisasi khusus dalam menangani *existential threat*. Dalam konteks sekuritisasi, mobilisasi khusus dan tindakan (kebijakan) negara yang lebih dari biasanya ini di wujudkan untuk mengatasi *emergency condition*, yang memberikan kemungkinan bagi sebuah negara untuk melakukan tindakan rekayasa politik demi menghalangi (yang menurut klaim konstruksi mereka) perkembangan ancaman bagi stabilitas negara (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:26).

Elemen lain yang turut mendukung berhasilnya sebuah wacana sekuritisasi, adalah serangkaian upaya verbal yang dikondisikan untuk mendiskripsikan suatu objek sebagai sebuah ancaman. Upaya ini dapat di sebut dengan istilah "*speech act*". Secara praktis, *speech act* ditujukan kepada publik (lingkup nasional maupun internasional) dengan memberikan pemahaman akan dampak buruk, seberapa bahaya, maupun solusi & tindakan darurat yang harus dilakukan untuk menghadapi sebuah ancaman. Pengkondisian tata bahasa serta poin penggambaran urgensi penanganan sebuah ancaman kepada publik akan mempengaruhi kesuksesan penerapan sekuritisasi (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:33).

Sebagaimana dalam konteks penelitian ini, asumsi dasar sekuritisasi memiliki relevansi dengan penetapan teroris yang dilakukan oleh GCC terhadap Hizbullah. Hizbullah dikonstruksikan oleh GCC sebagai *existential threat* di wilayah regional Timur Tengah. Konstruksi teroris tersebut dilakukan karena Hizbullah dinilai sebagai pengacau stabilitas negara-negara teluk (*referent object*). Dengan Arab Saudi sebagai *securitizing actors*, penetapan Hizbullah sebagai teroris dikonfirmasi oleh para *significant audience* yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Country* (GCC). Pada sidang khusus kawasan tanggal 2 Maret 2016, GCC yang didominasi oleh Arab Saudi memberikan *speech act* untuk melegitimasi wacana sekuritisasi terhadap Hizbullah, sebagaimana disampaikan oleh Sekjen GCC Abdullatif al-Zayani ;

“Hezbollah recruits youths of the GCC countries to carry out terrorist acts, smuggles arms, incites sedition and provokes chaos and violence in a blatant violation of GCC states sovereignty, security and independence (France 24, 2016), their terrorist acts and incitement in Syria, Yemen and in Iraq were threatening wider regional security (Sikimic, 2016).

Bertolak dari statement yang disampaikan oleh Sekjen GCC tersebut, kemudian menjadi landasan bagi negara-negara teluk untuk menindaklanjuti ancaman Hizbullah dengan implementasi praktis (aksi nyata). Sebagai tindak lanjut kongkrit (*emergency action*) dalam mengatasi ancaman tersebut, disamping menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris, Arab Saudi yang bertanggung jawab sebagai aktor sekuritisasi melakukan pembatalan bantuan finansial kepada militer pemerintah Lebanon disusul instruksinya kepada negara-negara GCC untuk melarang warga negaranya melakukan kunjungan pariwisata ke Beirut.

Untuk memperoleh pemahaman lebih detail mengenai ancaman yang dimaksudkan oleh GCC terhadap Hizbullah, perlu difahami lebih lanjut terkait *statement* yang disampaikan oleh Sekjen GCC tersebut. Dalam memahami detail tersebut, *speech act* yang disampaikan lebih lanjut akan diterjemahkan dengan didukung fakta-fakta internasional yang memiliki korelasi dengan poin-poin pernyataan *securitizing actors*. Buzan kemudian juga memberikan eksplanasi

lebih lanjut tentang kategori sebuah *existential threat* kedalam beberapa faktor utama yang menjadi konsentrasi proses sekuritasi terhadap stabilitas keamanan *referent object*, yakni meliputi, faktor militer, politik, sosial, dan lingkungan.

Militer (*Military*) ; dalam konteks ini suatu negara harus melindungi diri dari ancaman yang bersifat militeristik dari pihak-pihak yang mengancam *referent object*. Ancaman tersebut memiliki urgensi yang dapat mempengaruhi eksistensi kekuatan pemerintah.

Politik (*Politic*) ; pada sektor politik, deskripsi ancaman tersebut ditujukan dengan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kenegaraan, dan mengancam stabilitas kekuasaan maupun ideologi politik pemerintahan. Dalam konteks ini ancaman yang dimaksud adalah apapun yang mengusik kredibilitas legitimasi serta otoritas pemerintah.

Ekonomi (*Economic*) ; ancaman yang muncul dalam hal perekonomian merujuk pada entitas yang mempengaruhi stabilitas dan membendung ekspansi pendapatan perekonomian suatu negara. Dengan alasan ancaman tersebut, akan memberikan otoritas bagi pemerintah suatu negara untuk melakukan klaim proteksi terhadap ancaman yang menghalangi laju pertumbuhan ekonomi mereka.

Sosial (*Societal*) ; pada lingkup sosial, objek yang harus di lindungi bersifat abstrak yang menyangkut nilai-nilai identitas kolektif suatu negara (bangsa & agama). identitas kolektif tersebut berkaitan dengan efektifitas serta fungsi khusus dalam suatu negara sehingga memiliki urgensi yang pantas untuk dipertahankan dari pihak-pihak yang mengancam eksistensi identitas tersebut.

Lingkungan (*Environment*) ; lingkup sekuritisasi dalam konteks lingkungan memiliki pemahaman berupa upaya untuk melakukan konservasi terhadap isu-isu lingkungan. Isu yang dimaksud mencakup hal yang bersifat kongkrit seperti keberlangsungan hidup fauna yang hampir punah, rusaknya habitat makhluk hidup, atau bahkan isu global yang mengancam keberlangsungan hidup seluruh umat manusia seperti isu pemanasan global yang membutuhkan tindakan

sekuritisasi untuk menghadapi ancaman tersebut (Buzan, Wæver and Wilde, 1998:22-23).

Hal yang perlu diperhatikan dalam kategori ancaman tersebut adalah masih dalam bingkai konstruksi *securitizing actor*. Konsekuensinya adalah, kategori ancaman tersebut tidak melulu mengacu pada standar umum dunia dan lebih pada kepentingan para aktor sekuritisasi. disamping itu pula, faktor-faktor tersebut memiliki fungsional yang berbeda bergantung pada kasus dan tingkatan analisis yang akan diterapkan. Apabila faktor-faktor tersebut diterapkan dalam ruang lingkup penulisan ini, urgensi penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh GCC memiliki relevansi dengan beberapa faktor diatas. Walaupun tidak semua faktor tersebut menjadi fokus pembahasan penulis, akan tetapi dengan adanya faktor Militer, Politik, dan Sosial akan cukup mendeskripsikan alasan yang mendorong GCC melakukan tindakan sekuritisasi terhadap Hizbullah.

- Militer ; intervensi militer Hizbullah dalam konflik di Suriah dan Yaman merupakan alasan bagi GCC mengkategorikan Hizbullah sebagai *existential threat* militer. Keberpihakan Hizbullah terhadap presiden Bashar Al-Assad secara signifikan berhasil memukul oposisi pemerintah. Pasalnya, oposisi pemerintah tersebut (diantaranya berafiliasi dengan Al-Qaeda) (Sulaeman, 2013) merupakan pion *proxy-war* negara-negara anti Assad yang didanai oleh negara-negara Teluk (MONIQUET, 2013). Begitu pula di Yaman, keterlibatan Hizbullah yang memberikan pelatihan militer kepada kelompok Ansarullah (Houthi) berhasil membendung invasi koalisi militer Arab Saudi untuk kembali merebut Sana'a (Sobelman, 2015).
- Politik ; secara historis, salah satu alasan pendirian GCC pada 1981 merupakan respon untuk membendung pengaruh revolusi Islam Iran tahun 1979. Semenjak pasca revolusi tersebut, Iran merupakan suatu ancaman politik bagi negara-negara Teluk (Koch, 2010). Konstruksi negatif negara Arab Teluk terhadap Iran juga berlaku terhadap Hizbullah yang merupakan *proxy* Iran di Timur Tengah, karena pada dasarnya setiap

manuver yang dilakukan Hizbullah juga berarti turut memperluas pengaruh politik Iran di kawasan Teluk. Terbukti ketika *Arab Spring* terjadi di Bahrain, rezim al-Khalifa menuduh Hizbullah terlibat dalam memberikan pelatihan kepada pihak oposisi pemerintah untuk melakukan tindakan sabotase yang bertujuan mendestabilisasi pemerintah Bahrain (Solomon, 2011). Persaingan politik tersebut semakin panas ketika diplomasi Arab Saudi dengan Iran semakin memburuk pada awal tahun 2016 yang berujung dengan putusannya hubungan diplomatik kedua negara (Al-Jazeera, 2016b).

- Sosial ; posisi bersinggungan Hizbullah dengan negara-negara GCC tidak hanya terjadi sebatas dalam konteks yang bersifat *hard politic* saja, akan tetapi juga sampai pada faktor ideologis. Berhasilnya revolusi Iran tahun 1979, Arab Saudi beserta negara-negara GCC lainnya memandang keberhasilan tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatan negara mereka. Tanpa terkecuali dalam konteks ideologis, Iran yang dipandang sebagai representasi Islam Syiah merupakan ancaman bagi eksistensi Arab Saudi dan negara-negara GCC yang notabene menggunakan ideologi Islam (Wahabi) sebagai identitas pemerintah. Maka salah satu cara untuk menetralsir pengaruh tersebut, GCC (Arab Saudi secara khusus) yang mengklaim entitas diri mereka sebagai representasi dunia Islam menciptakan wacana '*Shia Threat*' (ancaman Syiah) (Saefullah, 2015). Faktanya, Hizbullah yang merupakan organisasi *underbow* Iran, secara ideologis pun memiliki kesamaan dengan ideologi resmi di Iran (Islam Syiah). Selain faktor-faktor geopolitis dan ekonomis, wacana '*Shia Threat*' menempati posisi yang cukup signifikan dalam proses justifikasi Hizbullah sebagai teroris dalam perspektif GCC.

Dengan demikian, asumsi dasar teori sekuritisasi menjadi relevan jika diaplikasikan dalam kasus konstruksi penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh GCC. Sebagaimana dipaparkan penulis pada sub bab sebelumnya, bahwa tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi wacana GCC yang berkaitan

dengan penetapan Hizbullah sebagai teroris. Dengan mengacu pada identifikasi wacana tersebut, pembahasan dilanjutkan dengan analisa terhadap fakta-fakta internasional untuk mendukung penjelasan proses sekuritisasi yang dilakukan GCC dalam mengkonstruksi Hizbullah sebagai organisasi teroris. Kategori ancaman yang ditawarkan oleh Buzan dapat memperjelas secara rinci klasifikasi ancaman Hizbullah terhadap negara-negara Teluk GCC.

1.6 Argumen Utama

Sekuritisasi yang dilakukan oleh GCC terhadap Hizbullah pada dasarnya merupakan agenda keamanan yang diinisiasi oleh Arab Saudi. Dalam proses sekuritisasi tersebut, para *Securitizing Actors* (Arab Saudi, Bahrain, Qatar) melakukan konstruksi terhadap Hizbullah yang mempersepsikan kelompok ini sebagai ancaman regional bagi setiap anggota GCC. Konstruksi tersebut mempersepsikan Hizbullah sebagai sebuah entitas yang mengancam eksistensi *status-quo* monarki, hegemoni geopolitik dan ideologi resmi negara anggota GCC. Dengan menggunakan manuver sekuritisasi tersebut, para *Securitizing Actors* pada akhirnya berhasil membentuk opini negara anggota GCC yang lain sehingga kemudian secara kongkrit direalisasikan melalui penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris.

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya digunakan untuk membantu proses penelitian akademik dalam konteks menguji hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara definitif, metode kualitatif merupakan sistematika penelitian yang digunakan untuk membantu seorang peneliti dalam menganalisa proses pembuatan karya ilmiah. Metode kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman (*understanding*) akan suatu fenomena, aktifitas-aktifitas, serta proses sosial kepada pembaca (Bakry, 2016:62). Fokus metode penelitian ini terletak pada interpretasi makna dan pemahaman terhadap suatu objek kajian.

Pengertian terkait metode kualitatif tersebut didukung oleh beberapa akademisi ilmu sosial. Menurut spesialis sosiologi Ms. Liz Spencer, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, sejarah orang dalam konteks dan sering ditandai dengan concern untuk menemukan perspektif aktor, metode konteks-sensitif dan semi terstruktur, kaya dengan data, penjelasan, di tingkat maknanya bagaimana dan mengapa pertanyaan diajukan (Spencer *et al.*, 2003:3). Sedangkan menurut akademisi Hubungan Internasional Dr. Christopher Lamont, metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap sebagai masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2013:4). Metodologi ini berbasis pada data yang bersifat deskriptif atau non-numerik. Data tersebut dapat berupa dokumentasi kenegaraan (*institutional documents*) seperti pidato resmi, foto, video, wawancara. Lebih lanjut data tersebut kemudian dianalisis sehingga pada akhirnya ditampilkan dengan narasi tertulis untuk memperkuat validitas argumentasi sebuah karya ilmiah (Klotz and Prakash, 2008:87-88). Metode kualitatif ini digunakan dalam menganalisa proses sekuritisasi GCC dalam merespon ancaman yang ditimbulkan oleh Hizbullah.

1.7.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya menguji kebenaran ilmiah sebuah objek kajian, peneliti diharuskan memiliki data untuk mendukung argumentasi yang dipaparkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur yang menggunakan data sekunder sebagai sumber kajian. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi lapang secara langsung, akan tetapi cukup merujuk pada informasi yang sudah ada dari hasil penelitian lain yang dianggap paling relevan terhadap isu atau fenomena yang akan dianalisa.

Sedangkan menurut jenis data yang didapatkan, peneliti menggunakan data sekunder sebagai dokumen referensi. Menurut Kenneth D. Bailey, data sekunder adalah dokumen yang diperoleh orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan

membaca dokumen primer (*original archive*) (Bailey, 1994:294). Data sekunder tersebut didapatkan melalui literatur buku, jurnal, artikel, dan ragam informasi faktual lainnya yang terdapat di media internet. Dengan demikian metode pengumpulan data yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan tersebut diperoleh melalui:

1. Koleksi Pribadi (Buku, *e-book*)
2. Jurnal, *Report*, Publikasi Ilmiah
3. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
4. Situs resmi pemerintahan maupun organisasi Internasional
5. Data *Audio Visual* (Video, Film Dokumenter)

Dengan data sekunder yang telah diperoleh, pada bagian pembahasan tulisan ini peneliti mencoba menjelaskan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh GCC terhadap Hizbullah. Penjelasan tersebut secara umum berisi tentang pemaparan akan rekam jejak Hizbullah serta dinamika hubungannya dengan negara Arab Teluk, dan secara khusus meliputi pernyataan resmi GCC sebagai langkah *speech act* untuk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris.

1.7.2. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa proses sekuritisasi serta agenda keamanan GCC terhadap Hizbullah, penulis menggunakan metode analisa deskriptif, yang bertumpu pada upaya penggambaran (*to describe*), menjelaskan (*to explain*), serta menginterpretasikan (*to interpret*) suatu objek penelitian yang menjadi konteks pembahasan. Penerapan metode kualitatif dalam penulisan ini akan banyak digunakan dalam menganalisa data sekunder yang telah didapatkan. Proses analisa tersebut selanjutnya diproses lebih lanjut untuk mengolah data sesuai dengan objek kajian serta tujuan penulisan yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini. Proses ini secara spesifik dilakukan untuk menginterpretasi *speech act* yang dilakukan oleh GCC untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam kategori ancaman teori sekuritisasi milik Buzan

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyusunnya mejadi beberapa bab, yaitu:

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada Bab 1 penulisan karya ilmiah ini menjelaskan tentang latar belakang secara umum hal-hal yang mendasari penetapan status teroris Hizbullah oleh GCC. Disamping itu, pada Bab 1 juga dijelaskan metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan teknik analisa deskriptif serta teknik teknik pengumpulan data dengan metode *Library Research*. Dalam Bab 1 ini pula akan di jelaskan mengenai kerangka konseptual yang memiliki fungsi untuk mendukung analisa penulis terkait agenda keamanan negara Arab Teluk dengan menggunakan teori Sekuritisasi.

BAB 2. HIZBULLAH DAN KONSTELASI POLITIK TIMUR TENGAH

Pada Bab 2 dalam tulisan ini akan menjelaskan tentang rivalitas geopolitik Timur Tengah antara Arab Saudi dan Iran. Bagaimanapun rivalitas geopolitik antara Riyadh dan Teheran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi Hizbullah dalam konstelasi politik di Timur Tengah. Posisi itu pula yang nantinya akan mempengaruhi sikap negara-negara Arab untuk menjustifikasi Hizbullah sebagai ancaman regional. Lebih jauh, dalam Bab ini juga akan dijelaskan mengenai profil dan rekam jejak Hizbullah, khususnya peran organisasi tersebut dalam merespon isu terorisme.

BAB 3. HIZBULLAH DALAM BINGKAI KONSTRUKSI GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)

Bab 3 dalam tulisan ini secara umum akan memaparkan tentang pandangan negara-negara GCC terhadap Hizbullah. Lebih spresifik bab ini juga akan mengulas tentang antara relasi Hizbullah dengan negara-negara Teluk. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang posisi Hizbullah dalam rivalitas antara GCC dan Iran (dalam konteks *Arab Spring*). Manuver dan posisi Hizbullah

(sebagai instrumen Iran) yang *vis-à-vis* dengan kepentingan GCC membuat organisasi tersebut dikonstruksikan sebagai ancaman.

BAB 4. SEKURITISASI GULF COOPERATION COUNCIL MENETAPKAN HIZBULLAH SEBAGAI ORGANISASI TERORIS

Pada Bab 4 ini pada intinya yakni menjelaskan secara keseluruhan fakta-fakta yang telah dipaparkan pada Bab-bab sebelumnya terkait eksistensi dan *track record* Hizbullah yang digambarkan (setidaknya melalui perspektif penulis) sebagai sebuah prestasi dan pencapaian positif, namun dalam artikulasi perspektif GCC dianggap sebagai tindakan yang mengancam stabilitas keamanan negara Arab Teluk. Lebih spesifik lagi, dalam Bab ini akan menjelaskan ancaman tersebut kedalam klasifikasi tertentu dengan mengacu standar ancaman menurut teori sekuritisasi. Klasifikasi tersebut mempengaruhi proses sekuritisasi GCC terhadap Hizbullah sehingga pada akhirnya muncul keputusan resmi untuk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Proses sekuritisasi tersebut didasari atas wacana keamanan negara-negara GCC dalam mendefinisikan Hizbullah sebagai ancaman.

BAB 5. PENUTUP

Dalam Bab 5 ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tiap Bab sebelumnya. Bab ini fokus memberikan kesimpulan dan saran penulis terhadap objek kajian yang dibahas.

BAB 2. HIZBULLAH DAN KONSTELASI POLITIK TIMUR TENGAH

Pada awal pembahasan tulisan ini, terlebih dahulu penulis akan memaparkan kondisi geopolitik Timur Tengah. Konstelasi peta geopolitik Timur Tengah beberapa dekade terakhir mengindikasikan adanya dominasi dua *state-actor* berpengaruh yang saling menjadi rival satu sama lain, yakni rivalitas antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Dalam perkembangannya, hubungan diplomatik kedua negara ini mengalami dinamika yang fluktuatif. Dinamika hubungan diplomatik antara Riyadh dan Teheran memiliki posisi yang penting dalam pembahasan tulisan ini karena bagaimanapun atmosfer hubungan bilateral kedua negara juga mempengaruhi tatanan geopolitik di kawasan, sekaligus juga berpengaruh signifikan terhadap eksistensi Hizbullah.

Disamping kondisi geopolitik yang memuat dinamika hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran, poin utama dalam bab ini juga bertujuan untuk memaparkan profil, rekam jejak, serta posisi Hizbullah dalam konstelasi politik di Timur Tengah. Profil serta *Track Record* Hizbullah yang berkaitan erat dengan eksistensi Iran tentu menjadi salah satu pertimbangan negara Arab GCC untuk kemudian memosisikan kelompok tersebut sebagai sebuah ancaman. Keputusan GCC untuk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris tidak dapat difahami dengan perspektif parsial semata. Penetapan kelompok tersebut ke dalam daftar kelompok terorisme dunia juga harus difahami secara utuh yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh di regional Timur Tengah.

Kebijakan GCC untuk menetapkan Hizbullah sebagai anggota teroris, secara signifikan memiliki keterkaitan dengan aspek historis dan tatanan geopolitik Timur Tengah. Penetapan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan rivalitas aktor dominan Timur Tengah, yakni (secara umum) antara negara anggota GCC dengan Republik Islam Iran. Sejak awal pendiriannya, GCC merupakan organisasi politik yang secara khusus bertujuan untuk menangkal pengaruh –dalam konteks ekonomi, sosial maupun politik– Iran pasca revolusi 1979 (Jahner, 2012). Piagam pendirian GCC ditanda tangani oleh enam

anggotanya dari negara teluk yang terdiri atas Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman dan Kuwait di Abu Dhabi pada 25 Mei 1981.

Keenam negara GCC tersebut baik dalam konteks individual negara maupun berkelompok memiliki peran masing-masing dalam perkembangan konflik di Timur Tengah. Khususnya Arab Saudi, yang memiliki pengaruh dan peran aktif dalam perkembangan hubungan internasional di regional Timur Tengah. Terkait dengan GCC, Arab Saudi melihat organisasi negara Teluk tersebut sebagai instrumen untuk menanamkan dominasi kepentingannya, baik secara politik maupun ekonomi (Joffe, 2009). Hegemoni yang dimiliki Arab Saudi di Arab teluk, membuat kerajaan tersebut menggunakan GCC sebagai instrumen pendukung dalam mengangkat kepentingannya baik dalam lingkup regional Timur Tengah maupun Internasional. Dengan fungsi GCC sebagai payung pelindung, kepentingan Arab Saudi memiliki *Bargaining Position* (posisi tawar) yang signifikan (setidaknya) di kawasan kawasan semenanjung Arab.

Keputusan GCC menetapkan Hizbullah ke dalam organisasi teroris internasional juga perlu difahami pula dengan konteks historis. Aspek historis tersebut secara khusus mengulas tentang dinamika hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Republik Islam Iran. Karena bagaimanapun, wajah konstelasi geopolitik Timur Tengah di era kontemporer tidak luput dari pengaruh kedua aktor dominan tersebut. Pada satu sisi, Arab Saudi secara khusus dibahas dikarenakan pengaruhnya yang dominan terhadap GCC dapat mempengaruhi dinamika keputusan institusi regional tersebut. Sedangkan di sisi lainnya, eksistensi Hizbullah beserta rekam jejaknya tidak terlepas dari dukungan serta pengaruh dari Republik Islam Iran. Oleh karena itu, keputusan GCC dalam menetapkan Hizbullah sebagai teroris secara signifikan dipengaruhi oleh dinamika rivalitas antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran (Farmanfarmaian, 2012).

2.1 Arab Saudi & Iran dalam Rivalitas Geopolitik Timur Tengah (New Middle East Cold War)

Relasi antara Arab Saudi dan Iran beberapa tahun terakhir ini dicirikan dengan permusuhan ideologi keagamaan, kompetisi politik dan kepentingan geopolitik, serta perebutan hegemoni di kawasan Timur Tengah (Jahner, 2012). Diperlukan pendekatan historis untuk memahami perkembangan konstelasi politik dalam regional Timur Tengah (khususnya antara Arab Saudi dan Iran). Narasi sejarah yang bersifat dinamis memiliki posisi signifikan dalam membentuk sebuah fenomena pada era kontemporer. Konteks sejarah ini dianggap perlu untuk menjelaskan kondisi situasi terkini pada kawasan Timur Tengah dan sekaligus juga dapat digunakan sebagai acuan perkembangan pada era selanjutnya dalam kawasan tersebut. Dengan meneliti sejarah rivalitas Arab Saudi dan Iran, baik itu peristiwa sejarah yang melibatkan individu tertentu, kebijakan domestik dan luar negeri, serta serangkaian momen penting, akan muncul sebuah pemahaman bahwa rangkaian peristiwa tersebut secara signifikan membentuk peta konstelasi politik pada era kontemporer saat ini yang menurut beberapa analis Timur Tengah sebagai '*New Middle East Cold War*' (Gause, 2014:6).

Istilah *New Middle East Cold War* tersebut merujuk pada era pasca perang dunia II, dimana dunia terbagi menjadi dua kubu (antara Amerika Serikat dan Uni Soviet) dengan ideologi yang saling kontras satu dengan yang lain. Walaupun pada faktanya kedua kubu negara tidak melakukan konflik terbuka secara langsung, akan tetapi tensi kedua kubu negara terjadi di negara lain tempat mereka menanamkan pengaruh. Sehingga dalam proses persaingan tersebut, maka muncul sebuah wacana akan 'ancaman' yang diciptakan sebagai strategi untuk mengantisipasi pengaruh antar kedua negara adidaya tersebut. Apabila menggunakan perspektif Amerika Serikat, muncul istilah '*Red Menace*' (Ancaman Merah) sebagai bentuk antisipasi atas ancaman ideologi komunis Uni Soviet (Saefullah, 2015). Sebagaimana era perang dingin, Timur Tengah pasca tahun 1979 hingga era kontemporer saat ini mengalami nuansa persaingan yang serupa.

Aktor yang berperan dalam perang dingin ala Timur Tengah ini dimainkan oleh Arab Saudi dan Iran. Pada awal Februari tahun 1979, terjadi sebuah peristiwa penting yang kemudian menjadi titik tolak perang dingin ala Timur Tengah tersebut, yaitu Revolusi Islam Iran. Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini sekaligus memunculkan konsep pemerintahan baru yang menjadikan kaidah agama Islam sebagai landasan fundamental. Konsep pemerintahan tersebut menggantikan pemerintahan dinasti Pahlevi yang sebelumnya menggunakan model kerajaan dengan pemerintahan sekuler dan pro-barat. Konsep pemerintahan baru tersebut merupakan gagasan langsung dari Khomeini yang dikenal sebagai '*Wilayah Al-Faqih*' (Anis, 2015). Konsep yang memformulasikan antara nilai demokrasi dengan kaidah agama Islam ini meniscayakan kepemimpinan seorang fakih (ahli syariat agama Islam) dalam sebuah pemerintahan (Anis, 2015).

Segera setelah terbentuknya pemerintahan teodemokrasi tersebut, kebijakan luar negeri Iran yang sebelumnya pro-Amerika, berbalik *vis-à-vis* dengan negara paman Sam berikut dengan sekutunya negara-negara Arab teluk di Timur Tengah, khususnya Israel dan Arab Saudi (Goodarzi, 2002:22). Berubahnya haluan politik Iran tersebut juga sekaligus mengubah tatanan geopolitik Timur Tengah. Lebih spesifik revolusi tersebut lebih jauh juga memantik permusuhan antara Arab Saudi dan Iran yang menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara semakin memanas dalam koridor rivalitas geopolitik pada kawasan Timur Tengah. Hubungan diplomatik kedua negara yang sebelumnya cenderung stabil dan harmonis, kini pasca revolusi hubungan kedua negara berada dalam nuansa persaingan di berbagai lini.

Pada dasarnya revolusi Islam Iran merupakan ancaman bagi Arab Saudi dan negara-negara monarki Arab pada umumnya. Secara politis, keduanya memiliki sistem pemerintahan yang saling bersinggungan. Pada satu sisi, Iran sebagai representasi blok revolusioner yang menentang imperialisme, di sisi lain Arab Saudi dan negara-negara teluk sebagai representasi negara monarki yang mencoba mempertahankan *status quo* mereka. Terlebih ketika pertengahan 1979 ketika

Khomeini mulai menegaskan peran Iran untuk meluaskan pengaruhnya yang dikenal dengan istilah ‘ekspor revolusi’ di negara-negara tetangga Iran (Karsh, 2002:12). Arab Saudi melihat manuver ekspor revolusi yang bermula di Teheran tersebut sebagai ancaman bagi *status quo* kerajaan mereka.

Tensi konflik antara kedua negara tersebut juga meluas sampai pada ranah ideologis. Arab Saudi dan Republik Islam Iran merupakan dua negara yang menerapkan *syariah* (hukum) Islam dalam setiap implementasi kebijakan pemerintahan mereka. Dengan alasan penerapan nilai *syariah* itulah lantas kedua negara itu masing-masing mendeklarasikan (klaim) sebagai ‘*the true Islamic state*’ (pemerintahan Islam sejati) (Tadjbakhsh, 2013). Namun perlu difahami bahwa Arab Saudi dan Iran memiliki perbedaan fundamental dalam interpretasi agama Islam yang sekaligus mempengaruhi bentuk pemerintahan mereka. Untuk memahami kondisi politik dalam *New Middle East Cold War*, perspektif sektarianisme memiliki posisi yang cukup signifikan dalam menjelaskan eskalasi konflik antara kedua negara (Gause, 2015:16-20). Dalam konteks regional Timur Tengah, istilah sektarianisme secara sederhana merujuk pada dua sekte Islam yaitu Sunni dan Syiah.

Terdapat hal yang perlu digaris bawahi dalam konflik sektarian tersebut. Dalam konteks rivalitas antara Arab Saudi dan Iran, perlu dicermati bahwa penggunaan istilah Sunni secara *general* tidak relevan dengan bentuk pemahaman Islam yang diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Maka dari itu, dalam mendeskripsikan perselisihan Arab Saudi dan Iran dalam nuansa sektarian, penulis menggunakan istilah *Wahabi* sebagai representasi pemahaman Islam Arab Saudi. Merujuk pada konferensi Islam Ahlusunnah wal Jamaah (baca: Sunni) di Grozny Chechnya, terdapat karakteristik fundamental yang kemudian membedakan dan sekaligus mengeliminasi paham Wahabisme dari pemahaman Islam Sunni pada *mainstream* nya (Freer, 2016). Paham ideologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1740 di Basrah Irak ini mendasarkan pemahaman syariat (hukum) Islam hanya bersumber dari Al-Quran dan *Sunnah* (tradisi sosial dan contoh dari Nabi

Muhammad) tanpa memberikan ruang penafsiran terhadap kedua sumber hukum tersebut (skriptualisme) (Schanzer and Miller, 2012:7). Konsekuensinya, Wahabisme mengabaikan penafsiran hukum, teologi serta tradisi Islam yang telah dirumuskan oleh generasi sebelumnya dengan menganggap rumusan tersebut merupakan tindakan pembaruan ajaran agama tanpa berpedoman kepada Al-Quran dan *Sunnah (Bid'ah)* (Schanzer and Miller, 2012:7). Kongkritnya, Wahabisme menolak pemahaman kelompok Islam lain yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, khususnya adalah kelompok Syiah.

Pada tahun 1744, Syaikh Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad ibn Saud, seorang pemimpin klan di pedalaman jazirah Arab. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momen kesepakatan antara misi religius Muhammad bin Abdul Wahhab dengan ekspansi politik Muhammad ibn Saud (Commins, 2006:19). Dalam perkembangannya, kolaborasi Saudi-Wahabi tersebut berhasil meluaskan pengaruhnya serta menjadikan Wahabisme sebagai ideologi yang cukup berpengaruh di jazirah Arab. Dengan asistensi yang diberikan oleh Inggris, klan al-Saud dan loyalis Wahabi mengklaim wilayah Turki Utsmani di semenanjung Arab dan secara resmi mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada 23 September 1932 (Yamani, 2006:10).

Secara aspek pemerintahan, Arab Saudi merupakan negara dengan pemerintahan monarki yang menerapkan ideologi Islam Wahabi. Sedangkan Iran adalah negara berasaskan konsep republik yang menerapkan Islam Syiah sebagai konsep dasar pemerintahannya. Menurut beberapa analisis Timur Tengah, terlepas dari historis hubungan antara Sunni dan Syiah yang dinamis, sektarianisme dianggap sebagai instrumen politik yang efektif bagi penguasa dalam kontestasi geopolitik di Timur Tengah (Malmvig, 2015:32). Oleh karena itu (setidaknya dalam perspektif Arab Saudi), jika pada perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebelumnya muncul istilah *Red Menace*, pada perang dingin versi Timur Tengah antara Arab Saudi dan Iran muncul pula istilah '*Shia Threat*' (ancaman Syiah) (Saefullah, 2015). Istilah tersebut digunakan Arab Saudi untuk ditujukan kepada Iran secara umum, dan secara khusus merujuk pada ideologi

Islam Syiah yang menjadi asas fundamen konsep pemerintahan teodemokrasi di Iran (*Wilayah Al-Faqih*). Dalam konstruksi tersebut, ideologi Syiah dianggap kontras dengan identitas keislaman pemerintah Arab Saudi disamping sebagai potensi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan (Saefullah, 2015).

Dalam merespon ancaman rezim revolusioner Iran dan isu yang muncul pada era 80an (khususnya revolusi islam Iran tahun 1979), Arab Saudi membangun aliansi dengan negara-negara teluk yang kemudian melahirkan *Gulf Cooperation Council* (GCC). Fokus tujuan pendirian GCC selain untuk mewujudkan koordinasi antara negara-negara Arab Teluk dalam kerjasama politik dan ekonomi (perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur), GCC juga merespon isu-isu sosial seperti pendidikan dan lingkungan (Young, 2013). Disamping kerjasama ekonomi, politik dan sosial, aspek terpenting dari pendirian GCC tersebut adalah sebagai tindakan reaktif dari negara-negara teluk untuk mewujudkan keamanan wilayah mereka dari konstelasi politik kawasan kala itu, seperti Perang Iran-Irak September 1980, invasi Soviet di Afghanistan, termasuk juga Revolusi Islam Iran tahun 1979 (Koch, 2010).

Selain membangun aliansi di kawasan, persaingan Arab Saudi dan Iran juga berlangsung dalam konteks *Proxy War*. Istilah *proxy war* secara luas dikenal pada era perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Definisi khas tentang *proxy war* adalah perang yang berlangsung sebagai pengganti konfrontasi secara langsung antar negara *superpower* (Bar-Siman-Tov, 1984). *Proxy* ini dapat secara kongkrit diwujudkan dalam konflik lokal dalam suatu negara maupun antar negara dalam satu regional tertentu (Bar-Siman-Tov, 1984). Dalam *proxy* ini, negara yang *superpower* memberikan dukungan kepada simpatisan nya di regional tertentu baik itu *state actor* maupun *non-state actor* untuk melawan aktor *proxy* kepentingan negara lain. Dukungan kepada simpatisan tersebut dapat diwujudkan dalam intervensi kekuatan militer secara langsung atau hanya sebatas memberikan suplai logistik, finansial dan persenjataan maupun dukungan diplomatik (Bar-Siman-Tov, 1984).

Dalam *New Middle East Cold War*, nuansa *war by proxy* tersebut juga terimplementasi secara signifikan. Rivalitas Arab Saudi dan Iran yang terjadi hampir di setiap negara-negara Timur Tengah ini juga ditunjukkan melalui strategi *war by proxy*. Keduanya saling menanamkan pengaruh dan memberikan dukungan kepada negara maupun kelompok yang sejalan dengan kepentingan mereka. Antara Riyadh dan Teheran saling unjuk kekuatan dan menunjukkan menuvernya yang agresif untuk menanamkan pengaruh masing-masing di negara-negara kawasan seperti di Afghanistan, Lebanon, Palestina, Yaman, dan Suriah.

Persaingan dalam konteks *proxy war* tersebut terjadi baik dalam lingkup penggunaan *state actor* maupun *non-state actor*. Dalam lingkup *proxy by state actor*, Arab Saudi pernah memanfaatkan Saddam untuk berusaha menjatuhkan Khomeini di perang Irak-Iran tahun 80an. Strategi *proxy war* antara Riyadh dan Teheran juga ditunjukkan dengan dukungan terhadap *non-state actor*. Seperti Arab Saudi misalnya, ketika Uni Soviet melancarkan invasi di Afghanistan, bersama dengan Amerika Serikat, Arab Saudi menjadi salah satu aktor (Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan) penting dalam memberikan *support* terhadap Mujahidin Afghanistan (Ganji, 2014a). *Join effort* para aktor tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan finansial, persenjataan, serta propaganda Wahabisme kepada para personel jihadis yang didatangkan dari berbagai negara (Ganji, 2014b).

Tujuan utama dukungan Arab Saudi terhadap mujahidin tersebut sebagai *proxy* melawan hegemoni Uni Soviet di Afghanistan pada era perang dingin. Pasca kekalahan Soviet, perubahan situasi politik di Afghanistan mengubah para eks-Mujahidin tersebut menjadi fraksi jihadis (teroris) seperti Taliban dan Al-Qaeda (Weiss, 2016). Munculnya kelompok Taliban dan Al-Qaeda itulah dikemudian hari memberikan permasalahan baru dunia dengan ancaman terorisme. Walaupun para fraksi eks mujahidin Afghanistan tersebut pada akhirnya berbalik arah menjadi ancaman bagi negara sponsor mereka, namun dalam beberapa isu tertentu eksistensi para jihadis tersebut masih kooperatif untuk melayani kepentingan *proxy war* para *founding fathers* mereka.

Sebagaimana Arab Saudi yang membangun jaringan *proxy* di kawasan Timur Tengah, Iran juga menanamkan gaung pengaruhnya pada regional tersebut. Modus operandi yang diterapkan Iran secara sistematis melakukan penetrasi di negara yang memiliki otoritas sentral pemerintahan yang lemah. Di dalam negara-negara yang tengah tidak stabil tersebut, Iran seringkali menjalin kerjasama dengan para kelompok minoritas atau termajinakan oleh pemerintah pusat (Juneau, 2016). Kelompok tersebut umumnya adalah elemen yang menentang dominasi rezim pemerintahan di negara mereka atau eksistensi Amerika beserta aliansinya (khususnya Arab Saudi dan Israel) di regional Timur Tengah. Seperti, mayoritas Syiah di Irak, Perlawanan komunitas Syiah di Lebanon Selatan, fraksi anti-Taliban di Afghanistan, milisi Kurdi di Irak, dan pejuang resistansi Palestina (Leverett and Mann, 2015). Hampir sama dengan pola *proxy* Arab Saudi, disamping memfasilitasi keperluan resistansi (dukungan finansial dan militer) untuk bertahan dari serangan lawan, dukungan Iran terhadap *proxy* nya lebih memprioritaskan upaya partisipasi politik pada pemerintahan negara mereka (Leverett and Mann, 2015). Namun, diantara sekian aktor *proxy* tersebut, terdapat *non-state actor* yang memiliki progresifitas paling efektif dalam mendukung strategi *war by proxy* Iran, yakni Hizbullah.

Kelompok perlawanan rakyat Lebanon ini merupakan kartu emas Iran dalam percaturan politik di Timur Tengah. Bersama dengan Suriah, Iran menggunakan Hizbullah sebagai aktor *proxy* untuk melawan hegemoni Israel dan kepentingan Amerika beserta aliansi negara Arab di Timur Tengah. Eksistensi Hizbullah memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. Seringkali kedua negara terlibat konflik di beberapa peristiwa penting dan front pertempuran dengan menggunakan jasa aktor *proxy* dukungan mereka. Eksistensi Hizbullah beserta Iran dan Suriah yang menjadikan Israel sebagai *common enemy*, menempatkan ketiganya dalam satu poros perlawanan terhadap kepentingan barat yang salah satunya bermuara di Tel Aviv. Poros perlawanan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *The Axis Of Resistance* (Boroujerdi, 2014). Pembahasan peran Hizbullah dalam konstelasi

politik Timur Tengah sekaligus sebagai *proxy* Iran nantinya akan menjadi *main concern* dalam bab ini.

2.2 Genealogi Hizbullah dan Komunitas Syiah di Lebanon Selatan

Awal rekam jejak Hizbullah muncul ke permukaan konstelasi politik Timur Tengah dapat ditelusuri sejak terjadinya invasi Israel kedua di Lebanon pada tahun 1982. Pada masa awal kemunculannya, perlawanan Hizbullah terhadap Israel dilakukan tanpa struktur organisasi yang efektif. Hingga pada tahun 1985, kelompok perlawanan masyarakat Lebanon tersebut menerbitkan sebuah manifesto politik yang juga sekaligus secara resmi menamakan diri mereka sebagai Hizbullah (Alagha, 2011:33). Secara genealogis, munculnya gerakan Hizbullah terpaut erat dengan kultur sosial masyarakat serta dinamika yang terjadi di Lebanon.

Lebanon merupakan negara dengan mekanisme sistem politik pemerintahan yang terkait erat dengan keragaman kultur komunitas sosial di dalamnya. Sejak mendapatkan kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1943, distribusi kekuasaan di Lebanon berada diantara komunitas sosial tersebut. Secara berurutan dari kelompok yang terbesar, komposisi komunitas sosial yang terdapat di Lebanon terdiri dari komunitas Kristen Maronit, disusul komunitas muslim Sunni dan Syiah (Judith, 2004:17). Akan tetapi dalam perkembangannya, komunitas Syiah yang merupakan komunitas terbesar ketiga di Lebanon cenderung mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di dalam sistem politik pemerintahan Lebanon. Secara geografis, pusat populasi komunitas Syiah terletak di daerah kaki gunung Lebanon Selatan dan lembah Bekaa (*Beqaa Valley*) yang menempatkan mereka terisolasi dari ibukota Lebanon dimana pusat administrasi kenegaraan berlangsung (Azani, 2011:49). Diskriminasi dan tata letak geografis tersebut membuat komunitas Syiah Lebanon secara umum kurang mendapatkan hak layanan publik yang memadai seperti lapangan pekerjaan, layanan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah pusat.

Selain keadaan yang dibawah garis standar rata-rata, keadaan sulit yang menimpa komunitas Syiah di Lebanon selatan semakin diperparah dengan datangnya pengungsi Palestina pada tahun 1948. Para pengungsi Palestina tersebut membangun kamp pemukiman pada kota-kota di Lebanon khususnya di wilayah Lebanon selatan. Dengan munculnya para aktifis militan dan keberadaan para pengungsi Palestina tersebut, Lebanon menjadi lokasi episentrum baru bagi aktivitas slogan anti-Israel mereka. Situasi tersebut mengubah Lebanon menjadi arena pertempuran baru antara Israel dan Palestina. Israel melihat wilayah pemukiman para pengungsi tersebut sebagai kesempatan untuk meluaskan ekspansi wilayah mereka atas dasar dalih meredam aksi terorisme militan Palestina yang bersarang di Lebanon. Segera setelah konflik antara Israel dan Palestina memuncak, situasi keamanan di Lebanon (khususnya bagian selatan) semakin tak menentu (Azani, 2011:53). Kondisi tersebut memicu adanya perlawanan masyarakat Lebanon yang nantinya mendorong munculnya kelompok perlawanan seperti Hizbullah.

2.1.1 Embrio Resistansi Lebanon “AMAL”

Situasi memprihatinkan yang menimpa komunitas Syiah di Lebanon selatan pada dekade 1960-1970an sekaligus menjadi pemicu kelompok tersebut untuk berusaha melakukan transformasi keadaan yang lebih baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi transformasi tersebut adalah munculnya tokoh karismatik, Musa Al-Sadr (Azani, 2011:53). Segera setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1963, ia harus kehilangan hak kewarganegaraan Iran yang ia miliki akibat aktivitas protes yang ia lakukan terhadap rezim Pahlevi. Hal tersebut menyebabkan Musa Al-Sadr harus pergi dari Iran dan menetap menjadi warga negara Lebanon. Berbekal kecakapan dalam beretorik, kemampuan berorganisasi serta didukung *background* keagamaan yang kental, Musa Al-Sadr berhasil menarik simpati serta menggalang dukungan komunitas Syiah di Lebanon.

Secara umum, pola yang menjadi karakteristik situasi politik pemerintah Lebanon pada periode tahun 1970an adalah mulai munculnya aktifisme

komunitas-komunitas masyarakat Lebanon yang sekaligus melemahkan kontrol hegemoni pemerintah pusat. Fenomena tersebut menyebabkan naiknya tingkat kekerasan bertajuk kepentingan politik atau klan antar komunitas yang mengantarkan Lebanon menuju kemelut perang sipil (Azani, 2011:55). Menanggapi fenomena tersebut, Musa Al-Sadr menyadari bahwa tidak mungkin untuk dapat eksis dalam lingkungan politik di Lebanon yang penuh kekerasan tanpa adanya elemen militeristik sebagai instrumen pelindung organisasi. Maka dari itu, pada 6 Juli tahun 1975, Musa Al-Sadr meresmikan sebuah kelompok milisi yang diberi nama *Afwaj Al-Muqawamah Al-Lubnaniyyah* (Batalion Perlawanan Lebanon) atau dikenal/disingkat dengan “AMAL” (Kazim, 2012:20). Selain pecahnya perang sipil di Lebanon pada tahun 1976, ancaman yang ditimbulkan oleh Israel menjadi alasan signifikan akan hadirnya pergerakan milisi tersebut. Milisi AMAL inilah yang merupakan institusi alternatif bagi munculnya gerakan Hizbullah di Lebanon di kemudian hari.

2.2.2 Latarbelakang Kemunculan Hizbullah

Terdapat beberapa rangkaian peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pecahnya milisi AMAL yang kemudian memicu munculnya Hizbullah. Rangkaian peristiwa yang dimaksud adalah, yakni invasi Israel pada tahun 1978 (Operasi Litani), hilangnya tokoh karismatik AMAL Musa Al-Sadr, dan terjadinya Revolusi Islam Iran tahun 1979. Rangkaian peristiwa tersebut memicu munculnya kelompok Hizbullah.

Invasi Israel terhadap Lebanon pada 14 Maret tahun 1978 yang diberi nama dengan kode Operasi Litani. Invasi yang menggunakan *pretext* untuk membubarkan sarang teroris Palestina beserta Infrastruktur yang mereka bangun, Israel bertujuan menganeksasi sungai Litani di Lebanon untuk digunakan sebagai pendukung sektor pertanian mereka. Invasi Israel tersebut memberikan dampak kerugian material serta jatuh korban Jiwa terhadap komunitas Syiah di Lebanon selatan. Operasi militer Israel tersebut memaksa komunitas Syiah Lebanon untuk membentuk sebuah milisi bersenjata yang dapat diandalkan dalam menjaga kepentingan serta keamanan eksistensi komunitas mereka (Azani, 2011:56).

Peristiwa penting selanjutnya yang mempengaruhi munculnya Hizbullah adalah hilangnya tokoh Karismatik AMAL Musa Al-Sadr secara misterius. Ketika hendak melanjutkan kunjungannya dari Libya menuju kota Roma ibukota Italia pada 31 Agustus 1978, dikabarkan bahwa tokoh karismatik AMAL tersebut menghilang tanpa diketahui penyebab kehilangannya (Hajjar, 2002:5). Hilangnya Musa Al-Sadr secara misterius tersebut menyebabkan perpecahan dalam organisasi AMAL yang kemudian membagi organisasi tersebut menjadi kelompok *Al-hala Al-Islamiyya* (Milieu Islam)⁵ dan kelompok moderat sekuler (Azani, 2011:56).

Peristiwa berikutnya yang memicu munculnya Hizbullah adalah revolusi Islam Iran pada Februari tahun 1979. Keberhasilan revolusi Islam Iran tersebut merupakan titik tolak peristiwa yang berhasil mengubah konstelasi perpolitikan di kawasan Timur Tengah sekaligus membawa angin perubahan bagi komunitas Syiah di Lebanon. Secara historis, hubungan antara komunitas Syiah Lebanon dengan Iran telah terjalin bahkan jauh sebelum terjadinya revolusi Islam tersebut. Pada awal dekade 1960an sampai 1970an, merupakan era hubungan kedua negara mulai bersemi. Kedatangan kader revolusioner serta aktifis keagamaan dari Iran ke Lebanon pada akhir dekade 60an tersebut banyak memberikan kontribusi dalam mobilisasi dan pembangunan struktur keorganisasian komunitas Syiah Lebanon. Jalinan intra antara kedua komunitas tersebut kemudian memanifestasi sebuah kerjasama dalam menghadapi isu sosial kala itu, seperti revolusi Islam Iran, perjuangan atas kasus Palestina dan proses mobilisasi komunitas Syiah di Lebanon (Alagha, 2006:28).

Kemelut internal politik pemerintahan Lebanon yang mengantarkan kepada perang sipil, diperparah dengan Invasi Israel yang memperkeruh insekuritas keamanan Lebanon (khususnya komunitas Syiah), munculnya bibit perpecahan di dalam organisasi AMAL serta suksesnya revolusi islam Iran tahun 1979, semakin mempercepat munculnya kelompok perlawanan Hizbullah. Terlebih ketika keputusan ketua kelompok moderat sekuler AMAL untuk

⁵ Komunitas masyarakat bernuansa Islami

bergabung dengan *Lebanese National Salvation Front* pada 1982. Keputusan tersebut sekaligus dinilai sebagai tindakan tidak revolusioner dan tidak sesuai dengan nilai keislaman oleh para kelompok *Al-hala Al-Islamiyya* AMAL, sehingga menyebabkan semakin renggangnya hubungan beberapa senior dalam organisasi tersebut. Kelompok milieu Islam AMAL yang menjadikan nilai autentik Islam sebagai ideologi perlawanan terhadap Israel, menentang keras langkah kelompok moderat yang membangun afiliasi dengan elemen bentukan pemerintah Lebanon yang cenderung menggunakan pendekatan kompromistis dalam merespon invasi Israel. Kerenggangan tersebut berujung pada keluarnya beberapa tokoh sentral dalam AMAL yang kemudian menjadi titik awal jaringan gerakan sosial untuk menandingi peran fungsi AMAL karena dianggap telah keluar nilai revolusioner dan ideologi keislaman (Azani, 2011:60). Langkah tersebut dipercepat dengan simpati dan dukungan Iran terhadap pembentukan milieu Islam tersebut. Iran memandang sebuah urgensi untuk membangun kerangka perlawanan baru menggantikan AMAL yang tidak lagi efektif dalam merespon isu sosial di Lebanon.

Seiring dengan panasnya atmosfer perang Iran-Irak serta panggilan jihad melawan kehadiran Israel di teritori Lebanon, atas Instruksi Ayatullah Khomeini pada Juni 1982, sebanyak 1500 anggota IRGC (*Iranian Revolutionary Guard Corps*) yang terdiri dari praktisi (pakar) militer dan tokoh keagamaan dikirim ke Lebanon untuk membangun dasar pondasi baru bagi kelompok resistansi didalam komunitas Syiah Lebanon (Alagha, 2006:32). Dengan izin serta dukungan dari Suriah, IRGC atau disebut laskar *Pasdaran* (Garda Revolusi) melakukan pelatihan militer dan memberikan suplai finansial kepada kelompok Islam revolusioner eks-organisasi AMAL tersebut untuk melawan hegemoni Israel di Lebanon. Peran Suriah dalam masa awal pedirian kelompok tersebut juga memiliki posisi yang cukup krusial sebagai perantara koneksi suplai logistik dan persenjataan yang dikirim dari Teheran ke Lebanon (Azani, 2011:182). Upaya Iran dalam mempersenjatai serta melatih kemampuan militer kelompok ini sekaligus membuktikan keterikatan yang erat antar kedua pihak.

Identitas kelompok tersebut kemudian diberi nama *Hizbullah* yang disandarkan pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi ;

“Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut Allah (Hizbullah) itulah yang pasti akan menang.” (QS Al-Maidah:56) (Kazim, 2012:26).

Sejak saat itu, *Al-hala Al-Islamiyya* kini resmi memiliki nama Hizbullah. Dengan demikian, Iran memainkan peran penting sejak awal kemunculan Hizbullah baik terlibat dalam internal keorganisasian maupun secara dukungan finansial serta logistik persenjataan.

2.2.3 Hizbullah, Isu Israel-Palestina, dan Politik Lebanon

Pada awal kemunculannya pada tahun 1982, anggota pendiri Hizbullah yang dikenal sebagai “komite sembilan” membuat sebuah pakta yang melandasi kerangka dimensi perlawanan Hizbullah. Pada masa-masa awal kemunculan tersebut, Hizbullah masih beroperasi secara bawah tanah dan hanya sebagai gerakan simbolis yang menaungi *Al-hala Al-Islamiyya*. Selama tahun 1982-1985, resistansi yang dilakukan pun fokus terhadap kegiatan propagandistik untuk meraih dukungan dan memobilisasi massa, disamping juga tetap fokus dengan upaya perlawanan bersenjata (jihad) terhadap Israel. Juga, posisi Hizbullah masih terkesan anti terhadap pemerintah Lebanon yang kala itu dinilai berkompromi terhadap Israel. Hingga pada Februari 1985, komite awal Hizbullah menerbitkan sebuah surat terbuka (*Risalah Maftuhah*) yang berisi manifesto politik Hizbullah. Deklarasi risalah tersebut secara resmi menunjukkan eksistensi pendirian Hizbullah secara identitas, sayap militer (*Muqawamah*) dan tujuan organisasi ke permukaan Lebanon (Alagha, 2006:37).

Pasca penerbitan *risalah maftuhah* tersebut (1985-1988), Hizbullah berupaya mempertajam konsep resistansinya terhadap Israel. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas jaringan rekrutmen personil dan semangat perlawanan terhadap invasi Israel. Pada masa tersebut, karakteristik perlawanan

Hizbullah menekankan pada taktik gerilya terhadap Israel. Operasi seperti penyerangan pada pos penjagaan pasukan Israel dan SLA (*South Lebanese Army*), memasang jebakan bom pada titik tertentu yang akan dilalui IDF (*Israeli Defence Force*) (Azani, 2011:68). Taktik tersebut berhasil mendesak Israel mundur dari Lebanon untuk pertama kalinya sampai di perbatasan (zona aman) Israel-Lebanon yang terletak di daerah Lebanon Selatan (Kazim, 2012:30).

Pada ranah politik, Hizbullah juga melakukan transformasi terkait interaksinya dengan politik pemerintahan Lebanon. Terdapat dua peristiwa penting yang memicu transformasi tersebut. Pertama yakni wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khomeini pada tahun 1989 yang kemudian digantikan oleh Ayatullah Ali Khamenei. Perbedaan karakter kepemimpinan antar kedua individu tersebut juga turut mempengaruhi sikap Hizbullah di Lingkungan politik Lebanon (Kazim, 2012:32). Hizbullah yang sejak awal pendiriannya berkomitmen menjadikan *Wilayah Al-faqih* sebagai manifesto politik dan dasar perjuangan, secara otomatis juga harus mengikuti anjuran pemimpin tertinggi di Iran. Figur Ali Khamenei yang cenderung lebih akomodatif terhadap situasi politik yang berlaku juga membuat Hizbullah untuk juga bersikap lebih fleksibel terhadap dinamika politik di Lebanon (Kazim, 2012:169). Transformasi positif ini dilanjutkan dengan kebijakan *Infitah* (keterbukaan) pada Januari 1991. Dengan legitimasi yang diberikan oleh *Wali Al-faqih* Ali Khamenei, otoritas Hizbullah memutuskan akan berpartisipasi dalam pemilihan perlemen Lebanon tahun berikutnya. Kebijakan *Infitah* ini sekaligus mengubah wacana organisasi Hizbullah yang membuatnya lebih pluralistik dan inklusif terhadap iklim perpolitikan di Lebanon (Kazim, 2012:42).

Transformasi Hizbullah yang semakin inklusif berkolaborasi dengan pemerintah Lebanon tidak lantas menyurutkan semangat perlawanan terhadap Israel sebagai tujuan utama perjuangan organisasi tersebut. Setelah sebelumnya melalui negosiasi alot yang melibatkan banyak pihak serta serangkaian peristiwa konflik bersenjata, mundurnya Israel untuk kedua kalinya dari wilayah Lebanon menandakan peran penting Hizbullah dalam resistansi bersenjata yang selama ini

dilakukannya (Azani, 2011:223). Mundurnya Israel pada Mei tahun 2000 tersebut sekaligus membuktikan kebijakan non-kompromistis yang diterapkan oleh Hizbullah terbukti efektif untuk melawan Israel. Melalui propaganda yang digencarkannya, Hizbullah menyatakan untuk tetap konsisten melakukan perlawanan terhadap Israel walaupun eksistensi negara zionis tersebut telah angkat kaki dari Lebanon (Azani, 2011:224). Dalam pidatonya, Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah mengklarifikasi bahwa kelompoknya akan menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel dan akan mendukung kelompok resistansi Palestina untuk pembebasan *Al-Quds* (Yerusalem) (Azani, 2011:224).

Mundurnya Israel dari teritori Lebanon menjadi latarbelakang bagi Hizbullah untuk memformulasi strategi baru resistansi mereka. Nasrallah menyatakan untuk memperluas lingkup teritori resistansi Hizbullah dengan mendukung perjuangan Palestina terhadap Israel di Gaza dan wilayah Tepi Barat (*West Bank*) Palestina. Pernyataan tersebut didukung oleh presiden Suriah yang kala itu dijabat oleh Bashar al-Assad (Zisser, 2007:160). Sosok Bashar al-Assad merupakan figur yang menguntungkan bagi eksistensi Hizbullah. Naik menjadi presiden setelah meninggalnya Hafez Assad pada Juni 2000, Bashar yang memiliki hubungan personal dengan Nasrallah secara khusus menempatkan Hizbullah sebagai partner strategis serta berkomitmen penuh untuk mendukung kepemilikan senjata *muqawamah* Hizbullah yang digunakan sebagai instrumen melawan eksistensi Israel (Azani, 2011:233).

Dukungan Hizbullah terhadap resistansi Palestina praktis diwujudkan melalui pelatihan militer dan asistensi persenjataan kelompok milisi di Gaza. Pemain sentral resistansi Palestina tersebut direpresentasi oleh kelompok Hamas. Selain aktif dalam kegiatan politik di Gaza, Hamas sendiri memiliki sayap militer yang cukup efektif dalam melawan kekuatan militer Israel, yakni *Izz al-Din al-Qassam Brigade* (IDQB atau Qassam Brigade) (Cohen and White, 2009). *The Axis of Resistance* (Hizbullah, Suriah dan Iran) merupakan pihak yang aktif dalam menyediakan pelatihan dan donasi persenjataan tersebut. Menurut Hamas, eksistensi “Poros Perlawanan” tersebut merupakan elemen yang krusial,

mengingat pengalaman tempur mereka yang sudah berpengalaman dan telah eksis dalam beberapa pertempuran menghadapi Israel (Cohen and White, 2009).

Eskalasi penyerangan yang dilakukan oleh Hizbullah terhadap IDF semakin meningkat pasca pasukan Israel menarik diri dari Lebanon tahun 2000. Puncaknya adalah pada 12 Juli 2006, ketika milisi Hizbullah melancarkan serangan terhadap patroli tentara IDF dan berhasil menculik dua personil mereka, Ehud Goldwasser dan Eldad Regev (Harel and Issacharof, 2008:75). Penculikan dua personil IDF tersebut merupakan faktor yang menyebabkan pecahnya perang Lebanon kedua pada tahun 2006. Menurut penuturan Hasan Nasrallah, Perang yang terjadi selama 33 hari pada musim panas 2006 tersebut merupakan perang yang paling sengit dalam sejarah okupasi Israel di Lebanon (Alagha, 2011:127). Walaupun pertempuran antara kedua kubu berlangsung secara asimetris (Israel lebih unggul dalam persenjataan), Hizbullah mampu mengimbangi superioritas militer Israel. Dengan menggunakan taktik defensif dan karakteristik khas *hit and run* (gerilya), profesionalitas tempur Hizbullah mampu menekan taktik ofensif militer Israel sekaligus memberikan dampak *psychological pressure* terhadap IDF (Makovsky and White, 2006).

Berkat upaya gencatan senjata yang diusung oleh pemerintah Lebanon dan PBB, perang Lebanon kedua berhasil diredam. Walaupun pada akhir pertempuran tidak memberikan indikasi kemenangan telak diantara salah satu pihak, namun perang yang berlangsung selama 33 hari tersebut berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa Hizbullah merupakan elemen bangsa Arab pertama yang mampu melawan serta memberikan dampak materiil serius kepada Israel (Makovsky and White, 2006). Sebagai salah satu aktor yang perannya kini diperhitungkan dalam kawasan Timur Tengah, komitmen Hizbullah untuk memulai perang dengan Israel lantas memicu kontroversi kalangan aktor internasional khususnya dunia Arab. Walaupun terdapat beberapa pihak yang memberikan dukungan atas peran Hizbullah sebagai representasi dunia Arab melawan Israel, namun juga terdapat beberapa negara Arab yang justru mengecam tindakan organisasi tersebut. Negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir dan Jordania

secara resmi menyalahkan tindakan Hizbullah dengan melayangkan tuduhan bahwa organisasi tersebut telah memprovokasi terjadinya keributan. Tentunya, tuduhan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan tendensial terhadap peran Iran di balik keberhasilan Hizbullah (Makovsky and White, 2006).

Selama perang berlangsung, Israel secara sistematis membalas serangan Hizbullah dengan melakukan bombardir terhadap infrastruktur Lebanon seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, fasilitas umum (komunikasi, listrik, produksi) khususnya di daerah Lebanon selatan. Tercatat bahwa IDF telah menghancurkan atau merusak sedikitnya 1,489 bangunan, 21 dari 29 jembatan di sungai Litani, 535 bagian jalanan umum dan 545 lahan tanam produktif (Alagha, 2011:124). Disamping menanggung kerusakan infrastruktur, blokade yang diterapkan Israel terhadap Lebanon selama kurang lebih delapan minggu, membuat transaksi perdagangan Beirut terisolasi dari dunia luar dan menimbulkan dampak kerugian pada beberapa sektor perekonomian (Alagha, 2011:124).

2.2.4 Aktifitas Sosial Hizbullah

Popularitas Hizbullah yang naik daun sejak penarikan pasukan Israel pada tahun 2000 hingga terjadi perang Lebanon kedua pada tahun 2006, semakin mendapatkan sorotan dunia internasional ketika organisasi tersebut berkomitmen untuk melakukan kegiatan rekonstruksi infrastruktur tempat tinggal para pengungsi. Perang Lebanon kedua yang terjadi selama 33 hari pada musim panas 2006 tersebut menyebabkan hampir satu juta orang harus mengungsi untuk mencari tempat perlindungan yang kondusif dari atmosfer peperangan. Segera setelah perang berakhir, banyak dari para pengungsi tersebut mendapati tempat tinggal mereka hancur akibat bombardir Israel (khususnya daerah selatan Lebanon) (Alagha, 2011:125). Segera setelah genjatan senjata secara efektif diberlakukan, Hizbullah memberangkatkan sebuah tim khusus ke area tempat tinggal penduduk yang hancur akibat perang untuk mengkalkulasi biaya restorasi hunian penduduk tersebut.

Perekonomian Lebanon yang tengah melemah akibat sebelumnya diblokade oleh Israel, tidak memungkinkan pihak pemerintah untuk merehabilitasi

dampak peperangan. Akan tetapi Hizbullah (tanpa bantuan pemerintah Lebanon) justru memberikan donasi kepada para masyarakat yang tempat tinggalnya hancur akibat perang. Bantuan yang berkisar antara 4000 sampai 12.000 dolar tersebut diberikan kepada sekitar 15.000 kepala rumah tangga yang tempat tinggalnya hancur total untuk digunakan membangun kembali rumah mereka. Disamping itu, salah satu cabang organisasi Hizbullah yang bergerak khusus pada urusan pelayanan sosial (*Jihad Al-Bina'*) juga memberikan sejumlah bantuan ekstra finansial kepada para kepala keluarga tersebut untuk dapat digunakan sebagai biaya menyewa tempat tinggal sementara (apartemen) sampai tempat tinggal asli mereka dibangun kembali (Alagha, 2011:125). *Jihad Al-Bina'* yang saat itu di klaim sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, berhasil menyelesaikan proyek rekonstruksi pembangunan tempat tinggal di distrik *Dahiya* Lebanon selatan (Alagha, 2011:125).

Secara struktur keorganisasian, pada dasarnya Hizbullah terbagi menjadi tiga cabang utama; yakni divisi urusan keamanan dan militer, divisi urusan politik, dan divisi urusan pelayanan sosial (Love *et al.*, 2010:19). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa selain fokus pada manuver militer (*muqawamah*) dan keterlibatan dalam politik pemerintahan Lebanon, kontribusi Hizbullah dalam ranah sosial masyarakat Lebanon juga memiliki peran yang penting. Walaupun fokus utama bidang pelayanan sosial Hizbullah ditujukan kepada komunitas syiah, namun secara umum pelayanan tersebut juga di desain untuk menyediakan pelayanan bagi siapapun masyarakat Lebanon yang membutuhkan bantuan tanpa memandang latarbelakang sekte ataupun identitas keagamaan (Love *et al.*, 2010:22). Aktivitas pelayanan sosial Hizbullah diwujudkan dalam ragam kegiatan yang dilakukan oleh sub lembaga dengan klasifikasi pada bidang tertentu, seperti :

1. *Jihad Al-Bina Development Group* (JBDG): sub lembaga Hizbullah yang bertujuan melakukan reparasi terhadap infrastruktur bangunan masyarakat yang memerlukan perbaikan secara intensif khususnya kerusakan yang timbul akibat peperangan. Awalnya, JBDG dibentuk di Iran pasca revolusi

Islam untuk membantu kegiatan konstruksi bangunan, lalu diterapkan di Lebanon oleh organisasi komunitas syiah pada awal tahun 1980an dengan tujuan yang serupa. Lembaga *Jihad Al-Bina* terdiri atas tenaga ahli dari berbagai bidang seperti arsitektur, pakar tata kota, tukang listrik, tukang pipa dan beberapa spesialis lainnya. *Track record* keberhasilan lembaga ini terbukti pasca perang tahun 2006 ketika Hizbullah memberikan jasa rekonstruksi hunian tempat tinggal penduduk tanpa memandang afiliasi politik dan kegamaan (Love *et al.*, 2010:23).

2. *Islamic Health Organization (IHO)*: Sebagaimana lembaga *Jihad Al-Bina* ,konsep layanan masyarakat IHO yang dibentuk di Iran pada tahun 1984 ini kemudian diekspor ke Lebanon untuk membantu kondisi komunitas syiah. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan infrastruktur kesehatan dan aktivitas pengobatan seperti bangunan rumah sakit, klinik, evakuasi korban, dan distribusi makanan kepada masyarakat (Love *et al.*, 2010:24). Terdapat beberapa sub-lembaga di bawah IHO yang aktif dalam pelayanan kesehatan di Lebanon ;

- a. *Mu'assasat Al-Syahid* (Yayasan bagi para Martir/Syahid) : Didirikan pada tahun 1987 di Lebanon sebagai cabang *Mu'assasat Al-Syahid* dari Iran. Aktivitas lembaga ini bertujuan untuk mengurus semua keperluan (finansial & layanan kesehatan) keluarga para martir pejuang resistansi Hizbullah. Secara strategis, kegiatan ini juga merupakan propaganda bagi Hizbullah untuk menarik minat rekrutmen personil mereka (Azani, 2011:72).
- b. *Mu'assasat Al-Jarih* (Yayasan bagi yang terluka) : Lembaga sosial yang didukung oleh institusi pendanaan *assistance council of Imam Khomeini* ini memberikan jaminan perawatan kesehatan bagi warga sipil yang terluka akibat serangan Israel. Terdapat beberapa infrastruktur kesehatan di Lebanon yang dibawah oleh yayasan ini (Azani, 2011:72).
- c. Asosiasi Perempuan : Merupakan lembaga pemberdayaan wanita yang terdiri atas para perempuan anggota Hizbullah. Tujuan utama

asosiasi ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan memperjuangkan hak perempuan. Asosiasi yang juga mengadvokasi para istri dari martir pejuang Hizbullah tersebut mendapatkan status khusus di dalam komunitas masyarakat Lebanon (Love *et al.*, 2010:24).

3. *Imam Mahdi Scouts*: adalah gerakan pemuda bertujuan untuk membentuk kader-kader baru yang sesuai dengan prinsip Hizbullah. Formasi pembentukan gerakan pemuda kepanduan (pramuka) yang dimulai pada tahun 1985 ini memusatkan perhatian kepada generasi muda dalam komunitas Syiah Lebanon. Para kader pramuka yang berumur antara 8 sampai 17 tahun akan berpartisipasi dalam program aktivitas yang disediakan oleh Hizbullah. Kegiatan seperti berkemah, olahraga, pelatihan dasar kemiliteran dan beberapa aktivitas kepanduan lainnya, merupakan aktivitas rutin lembaga ini (Love *et al.*, 2010:25).
4. *Edukasi dan Kebudayaan* : Cabang organisasi di bidang edukasi dan kebudayaan merupakan komponen yang krusial bagi Hizbullah. Pasalnya, cabang organisasi ini memberikan kontribusi yang penting bagi kelangsungan pesan resistansi dan penanaman nilai agama Islam di samping sebagai instrumen rekrutmen bagi organisasi tersebut (Azani, 2011:72). Cabang organisasi ini terlibat dalam pembangunan sekolah dan perkembangan administrasi pendidikan dari tingkat yang paling bawah hingga kejuruan di Lebanon (Love *et al.*, 2010:25). Dengan bantuan dari IRGC, Hizbullah telah mengembangkan kurikulum pendidikan dan dukungan infrastruktur material dari lingkup taman kanak-kanak sampai tingkat perkuliahan. Upaya tersebut berhasil mengedukasi ribuan individu komunitas Syiah dari kalangan tidak mampu sekaligus mengalahkan popularitas sekolah milik pemerintah Lebanon (Love *et al.*, 2010:25).

Elemen lain yang juga tidak kalah penting dalam aktivitas pelayanan sosial Hizbullah adalah media massa. Media massa memiliki peran vital dalam upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Hizbullah sejak tiga dekade terakhir. Upaya diplomatik tersebut merupakan strategi *management image* yang bertujuan

sebagai bentuk negosiasi antara kepentingan politik Hizbullah dengan konstelasi politik di Lebanon maupun di kawasan Timur Tengah (Khatib, 2012). Strategi *management image* Hizbullah dioperasikan melalui beberapa media sekaligus, seperti media cetak koran *Al-Intiqad*, satelit televisi *Al-Manar* beserta Website resmi yang disuguhkan kedalam beberapa Bahasa (Arab, Inggris, Perancis), dan juga stasiun radio *Al-Nour* (Khatib, 2012). Bukan hanya strategi *management image*, dengan menggunakan produk visual media tersebut Hizbullah juga telah mengembangkan strategi *psychological war* dan propaganda strategis untuk melawan Israel sebagaimana telah diterapkan pada perang Lebanon tahun 2006. Setelit televisi seperti *Al-Manar* yang disebut oleh Hizbullah sebagai “*Muqawamah Channel*” menampilkan figur resistansi Hizbullah sebagai pelindung Lebanon dari serangan Israel (Khatib, 2012).

Kesuksesan lembaga sosial yang dimiliki Hizbullah terbukti secara signifikan mendongkrak perkembangan popularitas kelompok tersebut dalam tatanan internal Lebanon. Keuntungan politik yang didapatkan Hizbullah juga merupakan refleksi atas keberhasilan kelompok tersebut dalam mengkonsolidasi sub lembaga yang dibawahinya secara solid. Upaya pemerintah Lebanon yang terkesan lamban dalam meningkatkan infrastruktur masyarakat khususnya komunitas Syiah, memberikan lingkup gerak bagi Hizbullah untuk melakukan kampanye melalui program layanan sosial mereka. Performa aktivitas sosial Hizbullah tersebut menunjukkan komitmen perjuangan (jihad) organisasi tersebut tidak terbatas pada upaya militeristik saja, namun juga merambah pada kegiatan kemasyarakatan.

2.3 Hizbullah dan Counter-terrorism

Disamping kontribusi positif di bidang sosial kemasyarakatan, prestasi Hizbullah juga ditunjukkan melalui komitmennya dalam merespon isu terorisme. kontribusi tersebut ditunjukkan melalui keterlibatannya dalam konflik politik di Suriah dan Irak untuk melawan eksistensi kelompok teroris. Ketika revolusi *Arab Spring* mencapai Damaskus, protes damai rakyat Suriah terhadap Bashar al-Assad berujung pada *clash* antara demonstran dengan pihak pemerintah. Konflik politik

antara kedua kubu tersebut membawa masuk Suriah kedalam pusaran perang sipil yang berkepanjangan. Perang sipil yang melibatkan pemerintah melawan pihak oposisi tersebut diperkeruh dengan intervensi pihak asing yang memanfaatkan situasi konflik politik di Damaskus (Sulaeman, 2013:25). Konflik politik yang semula hanya melibatkan pemerintah dan pihak oposisi, lambat laun semakin melebar menjadi konflik bersenjata yang melibatkan intervensi aktor regional maupun internasional. Selain *state actor*, Suriah terbukti menjadi daya tarik bagi *non-state actors* untuk juga terlibat dalam pusaran konflik, baik pihak yang mendukung pemerintah maupun oposisi. *Non-state actor* yang terdiri dari elemen paramiliter, milisi bersenjata sampai jaringan teroris internasional tersebut memiliki posisi yang signifikan dalam dinamika konflik Suriah.

Sebagaimana Afghanistan di era 80an melawan Uni Soviet, Suriah sekali lagi menjadi magnet bagi kehadiran jihadis internasional, dengan skala yang lebih besar. Setidaknya terdapat 48 fraksi dominan yang bertempur melawan Bashar al-Assad di medan laga Suriah. Dari angka tersebut, terdapat 16 fraksi yang memiliki afiliasi dengan organisasi teroris internasional Al-Qaeda. Di dalam kelompok tersebut, terdapat fraksi yang memiliki manuver paling signifikan dalam dinamika konflik Suriah dan merupakan gabungan dari beberapa fraksi jihadis lain, yakni diantaranya *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*, Jabhat al-Nusrah dan Ahrar al-Sham. Disamping memiliki tujuan utama untuk bertempur melawan rezim Bashar al-Assad, kelompok teroris ini juga memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam (Daulah Islamiyah/Khilafah) (Tony Blair Faith Foundation, 2015). Eksistensi beberapa kelompok teroris tersebut memiliki peran yang penting sejak awal terjadinya konflik di Suriah.

Ketika Suriah tengah mengalami konflik politik, pada saat yang relatif sama, keputusan Amerika Serikat untuk menarik pasukannya dari Irak pada Desember 2011 semakin memperburuk kondisi internal Baghdad yang sejak lama tengah terjebak dalam perang sipil dan konflik sektarian. Kondisi itu diperparah dengan eksistensi *Islamic State of Iraq (ISI)* yang didirikan sejak tahun 2006. Sejak tahun 2010, ISI berada di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi.

ISI yang pada awalnya merupakan cabang kelompok teroris Al-Qaeda di Irak, memiliki tujuan utama mendirikan pemerintahan negara Islam (*Islamic State*) sebagai upaya untuk menandingi pengaruh elemen Syiah yang telah mendominasi pemerintahan di Baghdad (Holmquist, 2015). ISI bertanggung jawab atas tindakan teror di seluruh wilayah Irak, seperti tindakan penculikan, pemenggalan, dan rangkaian bom bunuh diri yang ditargetkan untuk menciptakan instabilitas terhadap pemerintah pusat di Baghdad (Saltman and Winter, 2014).

Seiring dengan eskalasi konflik yang kian memanas di Damaskus, turut mengundang kelompok afiliasi Al-Qaeda dan para fraksi jihadis asing lain untuk juga terlibat dalam medan laga Suriah. Keterlibatan para fraksi jihad tersebut secara resmi ditegaskan melalui pidato pemimpin senior Al-Qaeda Dr. Ayman al-Zawahiri pada Februari 2012 yang menyerukan jihad di Suriah (Burke, 2012). Disamping menarik para jihadis dari seluruh dunia, panggilan jihad tersebut direspon salah satunya oleh cabang Al-Qaeda di Irak, yakni ISI. Pada 9 April 2013 Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan nama baru kelompoknya dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai bentuk simbolis batas teritorial Khilafah di bawah al-Baghdadi yang membentang dari wilayah Irak utara sampai beberapa wilayah di Suriah (Rosiny, 2014). Eksistensi para fraksi teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda tersebut semakin menambah kompleksitas konflik di Suriah

Sebagaimana terjadi di Irak, kehadiran para fraksi jihadis tersebut menyebabkan terjadinya aksi teror dan kekerasan di Suriah semakin tinggi serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit. Korban kekerasan kelompok teroris tersebut bukan hanya menasar pihak pemerintah, akan tetapi juga menimbulkan jatuh korban pada elemen sipil. Selama konflik, para kelompok teroris afiliasi Al-Qaeda bertanggung jawab atas tindakan teror terhadap warga sipil (Lister, 2015:85). Tanpa terkecuali, kelompok ISIS yang juga berkomitmen terhadap pelanggaran HAM di daerah teritorial yang mereka kuasai (Lister, 2015:161).

Seiring dengan perkembangan konflik, manuver pasukan oposisi berhasil merebut beberapa wilayah penting di Suriah. Tanpa di ragukan lagi, progresifitas kubu oposisi tersebut berkat peran para fraksi jihadis yang secara umum di representasi oleh kelompok afiliasi Al-Qaeda, yakni Jabhat al-Nusrah. Progres tersebut sekaligus menandakan al-Nusrah sebagai elemen oposisi yang paling efektif dalam melawan rezim Assad dan berhasil membawahi fraksi jihadis lain menjadi sebuah komando berskala besar (Lister, 2015:84-85). Manuver tersebut sekaligus menandakan keunggulan pasukan oposisi atas militer pemerintah Suriah dan menempatkan rezim Assad pada posisi yang cukup genting. Melihat progres pasukan oposisi yang semakin efektif, banyak para pengamat menilai bahwa nasib Bashar al-Assad akan berakhir tidak berbeda seperti Ben Ali di Tunisia atau lebih tragis lagi sebagaimana Gaddafi di Libya (Mikail, 2012).

Sementara kelompok oposisi yang di bawahi oleh fraksi jihadis berhasil merebut beberapa titik strategis di wilayah Suriah, terdapat aktor lain yang juga mulai terlibat untuk membantu rezim pemerintah. Menurut beberapa laporan, sudah terdapat keterlibatan IRGC (*Iranian Revolutionary Guard Corps*) dan Hizbullah sejak awal terjadinya konflik. Keterlibatan tersebut hanya sebatas sebagai penasihat militer bagi rezim pemerintah, dan menjaga jalur logistik Hizbullah di Lebanon (Lister, 2015:88). Urgensi Keterlibatan tersebut juga bertujuan untuk melindungi makam suci Sayyidah Zainab di Selatan Damaskus. Bagi muslim Syiah, makam tersebut memiliki sisi keagamaan yang esensial dan menempati prioritas yang dominan untuk dilindungi (Smyth, 2015). Manuver kubu oposisi yang semakin progresif, membuat posisi makam suci tersebut menjadi isu sentral bagi Iran, yang diistilahkan dengan *Al-Difa al-Muqaddas* (pelindung makam suci). *Al-Difa al-Muqaddas* sekaligus menjadi legitimasi Iran untuk memobilisasi elemen perlawanan Syiah untuk terlibat dalam konflik Suriah mendukung rezim Assad (Smyth, 2015). Tokoh IRGC yang bertanggung jawab atas misi pelatihan dan distribusi suplai persenjataan tersebut adalah Qasem Soleimani (Komandan IRGC-*Quds Force*) (Oktorino, 2016:21). Qassem Soleimani mengorganisir para milisi pro-Iran dan mengkoordinasi militer

pemerintah baik di Suriah maupun Irak untuk menghalau manuver fraksi Jihadis (Oktorino, 2016:22). Diantara milisi tersebut terdapat elemen penting yang nantinya memberikan kontribusi signifikan terhadap kelangsungan rezim Assad, yakni Hizbullah.

Manuver kelompok oposisi dan para fraksi Al-Qaeda semakin mendominasi papan catur konflik Suriah dan telah menduduki wilayah penting seperti Al-Qusayr yang berbatasan dengan teritori Lebanon. Al-Qusayr merupakan front strategis karena posisinya yang menghubungkan Damaskus ke arah Utara menuju Homs, Hama, Aleppo sampai pada arah kawasan pantai di Tartous dan Latakia (pelabuhan dan rute suplai logistik pemerintah) dan juga ke perbatasan Lebanon (rute logistik dan persenjataan Hizbullah). Nilai strategis front al-Qusayr tersebut yang kemudian diperebutkan antara kubu oposisi dengan kubu pemerintah (Lister, 2015:136). Keterlibatan Hizbullah secara *full-scale* (penuh) pada konflik Suriah dipicu oleh kelompok oposisi dari fraksi Jabhat al-Nusrah yang menembakkan roket ke markas Hizbullah dari perbatasan Al-Qusayr (Lister, 2015:128). Progresifitas kelompok oposisi yang berhasil merebut titik strategis di Suriah dan mengisolasi jalur logistik rezim pemerintah semakin memunculkan potensi kejatuhan Bashar al-Assad. Slogan anti-Iran dan Hizbullah pun mulai didengungkan oleh para jihadis Al-Qaeda yang menunjukkan komitmen mereka akan menjadikan Lebanon dan Hizbullah sebagai target berikutnya segera setelah rezim Assad berhasil dilengserkan (Al-Mayadeen, 2016).

Kondisi yang semakin memanas di Al-Qusayr menjadi titik awal konfrontasi secara langsung antara Hizbullah dengan kubu oposisi pemerintah di front pertempuran Suriah. Keterlibatan Hizbullah di Suriah secara kongkrit ditunjukkan dengan merebut wilayah Al-Qusayr. Dengan dibantu pihak pemerintah Suriah, Manuver Hizbullah pada front al-Qusayr secara intensif dilakukan. Kontak senjata dengan gabungan fraksi jihadis dari kubu oposisi pun tak dapat dihindarkan. Sehingga pada akhirnya Hizbullah secara efektif berhasil mendesak pasukan oposisi pemerintah Suriah yang terdiri dari kelompok teroris afiliasi Al-Qaeda Jabhat al-Nusrah untuk menarik pasukan dari Al-Qusayr (Lister,

2015:136-137). Kemenangan Hizbullah di Al-Qusayr terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam peranannya melawan jaringan teroris internasional.

Ketika front Suriah tengah berlangsung, Hizbullah juga terlibat dalam upaya membantu milisi rakyat Irak melawan ISIS di Irak. Segera setelah kota Mosul jatuh ketangan militan teroris ISIS, kelompok tersebut mengancam akan merebut Baghdad sebagai target selanjutnya. Merespon manuver ISIS tersebut, seorang ulama karismatik Irak Ayatullah Ali al-Sistani meluncurkan sebuah fatwa agama yang mewajibkan kepada semua warga negara Irak untuk melindungi negaranya dari serangan teroris (Mansour, 2015). Fatwa tersebut lantas menuai respon positif dari kalangan masyarakat dan ditindak lanjuti dengan pembentukan milisi rakyat yang dikenal dengan *Hasyad al-Shaabi* (Mansour, 2015). Melihat fenomena tersebut, Sekjen Hizbullah juga turut mengirimkan beberapa *fighter*-nya untuk membantu Hasyad al-Shaabi (Levitt and Pollak, 2014). Sebagaimana di Suriah, selain pertimbangan menjaga stabilitas keamanan Irak, urgensi keterlibatan Hizbullah di Irak adalah untuk melindungi keberadaan situs keagamaan yang sangat vital dan menjadi prioritas bagi Hizbullah. Pasalnya, teror para kelompok teroris ISIS bukan hanya ditujukan kepada institusi pemerintahan, akan tetapi juga menyasar simbol keagamaan dan situs sejarah di Irak.

Hizbullah lantas mengirimkan beberapa penasihat militernya ke Irak untuk memberikan pelatihan tempur kepada Hasyad al-Shaabi. Keputusan Hizbullah yang hanya mengirimkan penasihat militer tersebut relevan dengan kondisi di Hasyad al-Shaabi yang memiliki jumlah personel besar dan pasokan senjata yang cukup, sehingga Hizbullah tidak menggunakan manuver skala penuh sebagaimana di Suriah (Maula TV, 2016). Sampai pada pertengahan tahun 2017, milisi Hasyad al-Shaabi berhasil merebut kembali sejumlah wilayah penting Irak dari tangan ISIS (McKernan, 2017). Walaupun front melawan terorisme di Irak didominasi oleh milisi lokal, namun, bagaimanapun pencapaian milisi Irak tersebut tidak terlepas dari kontribusi Hizbullah yang telah memberikan pelatihan militer kepada mereka.

Komitmen Hizbullah dalam merespon isu Israel-Palestina, kontribusinya dalam ranah sosial kemasyarakatan serta perannya untuk memerangi terorisme global, membuat kelompok ini mendapatkan respon positif dari beberapa negara di Timur Tengah. Terdapat beberapa pihak yang menurut penulis memiliki posisi penting dalam memandang eksistensi Hizbullah, yakni salah satunya adalah Republik Islam Iran. Berkaitan dengan komitmen Hizbullah dalam merespon Isu Israel-Palestina dan terorisme Al-Qaeda di Suriah, melalui Hossein Amir Abollahian (deputi kementerian luar negeri), Iran menyatakan dukungannya terhadap Hizbullah; *“We are proud of Lebanon's Hezbollah as the vanguard of resistance against the Zionist regime and the champion of the fight against terrorism in the region (Wilson, 2016).”* Pernyataan yang disampaikan oleh deputi kementerian luar negeri Iran tersebut menunjukkan dukungan Teheran terhadap eksistensi Hizbullah yang selama ini merupakan ujung tombak perlawanan terhadap Israel dan sebagai kelompok yang juga memiliki peran dalam upaya melawan gerakan terorisme di kawasan Timur Tengah.

Begitupula dengan Aljazair dan Tunisia, kedua negara ini juga memberikan dukungan kepada Hizbullah. Beji Caid Essebsi menekankan bahwa Tunisia melihat Hizbullah merupakan gerakan perlawanan nasional dan sekaligus menolak mengatakan bahwa kelompok tersebut sebagai teroris. *“Tunis supports (Hezbollah Seceretary General Sayyed) Hasan Nasrallah's party in any act against Israel (Al-Manar, 2016).”* Dukungan tersebut dilandaskan atas apresiasi Tunisia terhadap komitmen Hasan Nasrallah (Sekjen Hizbullah) dalam upaya melawan Israel. Selaras dengan Tunisia, presiden Abdelaziz Bouteflika mengatakan bahwa Aljazair akan selalu menganut prinsip *non-interference* atas permasalahan negara lain, namun Aljazair juga akan mendukung gerakan perlawanan apapun terhadap segala bentuk penindasan. Pernyataan presiden Aljazair tersebut didukung dengan keputusan perwakilan Aljazair di Liga Arab untuk berdiri bersama dengan perwakilan Lebanon, Irak dan Suriah dalam rangka menolak keputusan GCC yang menjustifikasi Hizbullah sebagai teroris (Meddi, 2016).

Prestasi, komitmen serta rekam jejak Hizbullah dalam tatanan politik dunia Arab memposisikan kelompok ini sebagai salah satu aktor yang memiliki reputasi positif bagi sebagian pihak. Dengan memposisikan Isu Israel-Palestina sebagai prinsip dasar perlawanan, membuat Hizbullah dikenal sebagai elemen resistansi bangsa Arab terhadap Zionisme Israel. Begitu pula dengan manuver Hizbullah untuk terjun di front Suriah berpihak kepada presiden Bashar al-Assad dan membantu pelatihan militer milisi lokal di Irak merupakan bentuk komitmen Hizbullah dalam merespon isu terorisme. Respon perlawanan terhadap terorisme tersebut sekaligus menjadikan Hizbullah menjadi aktor *non-state* yang diperhitungkan dalam tatanan kawasan Timur Tengah. Namun, di sisi lain keterlibatan Hizbullah di front Suriah sekaligus menjadi ancaman bagi kepentingan pihak-pihak yang menginginkan Bashar al-Assad lengser dari jabatan presiden terutama negara barat dan sekutu regionalnya di Timur Tengah. Keterlibatan Hizbullah di Irak dan Suriah inilah yang kemudian juga menjadi salah satu landasan Arab Saudi beserta negara-negara Arab yang tergabung dalam GCC menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris internasional.

BAB 3. HIZBULLAH DALAM BINGKAI KONSTRUKSI GULF COOPERATION COUNCIL

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan peran Hizbullah dalam konstelasi politik Timur Tengah. Sejak didirikan pada awal dekade 80an, Hizbullah merupakan *non-state actor* yang aktif dalam melancarkan perlawanan terhadap eksistensi Israel. Pendirian Hizbullah pun tidak lepas dari asistensi yang diberikan oleh Iran. Konsekuensinya, Hizbullah merupakan pihak yang secara signifikan mendukung kepentingan Iran di Timur Tengah dan otomatis memosisikan organisasi ini sebagai *proxy* Teheran. Nama Hizbullah seringkali muncul dalam konflik politik di Timur Tengah, khususnya ketika arus demokrasi *Arab Spring* tengah melanda regional tersebut. Oleh karena afiliasinya dengan Iran, Hizbullah juga kerap mendapatkan dampak pertarungan politik antara Teheran dengan rivalnya. Salah satunya adalah label teroris yang digaungkan oleh rival Iran kepada Hizbullah.

Pada dasarnya label teroris yang diberikan kepada sebuah entitas kelompok tertentu masih menjadi perdebatan, khususnya jika kita mengaitkan label tersebut dengan rekam jejak Hizbullah selama ini. Konfrontasi secara langsung Hizbullah terhadap Al-Qaeda serta sejumlah jaringan ekspatriatnya di Suriah dan Irak yang pada waktu itu menjadi *top issue* dunia, menandakan komitmen Hizbullah dalam memberantas terorisme internasional. Terlebih ketika aktivitas terorisme yang selama ini dikaitkan dengan praktik bom bunuh diri dan penyerangan terhadap elemen sipil, Hizbullah justru tampil sebaliknya dengan aktivitas pelayanan sosial kemasyarakatan di berbagai bidang dan pembangunan infrastruktur sipil disamping posisinya yang aktif dalam panggung perpolitikan Lebanon. Begitu pula dengan rekam jejak Hizbullah yang gemilang atas perlawanannya terhadap Israel dan membantu kelompok resistansi di Palestina. Prestasi tersebut selayaknya menjadi kebanggan, khususnya bagi bangsa Arab yang gagal melawan Israel beberapa dekade yang lampau.

Pada bab ini penulis akan menitik beratkan pada perspektif negara Arab Teluk dalam memandang eksistensi Hizbullah. Bagaimanapun, terlepas dari rekam jeaknya selama ini, eksistensi Hizbullah tersebut masih menjadi ancaman bagi negara Arab Teluk. Perspektif negara GCC yang memandang Hizbullah sebagai ancaman inilah yang kemudian menjadi latarbelakang organisasi kerjasama Arab Teluk menetapkan organisasi ini ke dalam jajaran kelompok teroris. Perspektif GCC terhadap Hizbullah beserta alasan yang melatarbelakangi penetapan status teroris terhadap kelompok perlawanan Lebanon tersebut akan menjadi pembahasan utama pada bab ini.

Perspektif GCC yang memandang eksistensi Hizbullah sebagai ancaman tersebut memiliki korelasi yang erat dengan progresifitas kelompok ini di dalam konstelasi politik Timur Tengah khususnya para era *Arab Spring*. Intervensi Hizbullah pada konflik Suriah untuk mendukung Bashar al-Assad, patronasi kelompok tersebut dalam pemerintahan di Beirut serta beberapa tuduhan yang dilayangkan oleh negara Arab Teluk kepada Hizbullah atas keterlibatannya di Bahrain dan Yaman merupakan beberapa penyebab GCC menetapkan kelompok ini sebagai ancaman. Selain itu, ulasan tentang dinamika relasi diplomatik antara kedua belah pihak juga memiliki posisi yang penting dalam menjelaskan penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris.

Sebelum menginjak pada pembahasan utama, penulis akan terlebih dahulu memulai pembahasan pada bab ini dengan mengulas dua sisi Hizbullah sebagai kesatuan elemen progresif di Timur Tengah. Dua sisi yang dimaksud oleh penulis yakni, Hizbullah dalam perannya sebagai organisasi politik dalam internal Lebanon maupun sebagai milisi bersenjata yang aktif terlibat dalam beberapa konflik geopolitik di Timur Tengah. Ulasan tersebut menempati posisi yang cukup signifikan dalam penulisan ini untuk menegaskan cakupan ruang lingkup serta posisi Hizbullah sebagai kesatuan elemen progresif yang aktif dalam konstelasi geopolitik di Timur Tengah. Sehingga, melalui penegasan tersebut akan memperjelas entitas Hizbullah untuk kemudian direlevansikan dengan penetapan organisasi ini sebagai teroris oleh GCC.

3.1 Dua sisi Hizbullah sebagai Elemen Perlawanan Lebanon

Upaya untuk menentukan eksistensi Hizbullah sebagai kelompok perlawanan (milisi) bersenjata atau sebuah partai politik di Lebanon merupakan diskursus yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Pada dasarnya, penyederhanaan eksistensi Hizbullah sebagai dua entitas yang berbeda (milisi bersenjata & partai politik) merupakan bentuk inkapabilitas dalam memahami kompleksitas kelompok tersebut. Faktanya, label pemisahan dua entitas tersebut sejatinya merupakan diskursus pemahaman yang dibangun oleh pihak-pihak kontra Hizbullah (Harb & Leenders, 2005). Maka dari itu, penulis berasumsi bahwa dalam upaya merespon diskursus kontra-Hizbullah tersebut seharusnya menggunakan perspektif yang netral dalam memandang eksistensi kelompok ini, yakni melalui perspektif akademik.

Terdapat beberapa pendapat ahli yang tidak membatasi diskursus Hizbullah hanya pada kerangka aksi terorisme dan memandang kelompok tersebut melalui analisis yang berbeda. Bertolak dari sudut pandang akademik, penulis menggunakan pendapat Mona Harb dalam memandang eksistensi Hizbullah yang mengatakan ;

“We argue that the variety of institutions Hizbullah has been carefully elaborating and readapting over the past two decades operates as holistic and integrated networks which produce sets of meanings embedded in an interrelated religious and political framework (Harb & Leenders, 2005).”

Mona Harb berpendapat bahwa ragam bentuk institusi yang telah di bentuk oleh Hizbullah (Sayap militer, Partai politik & institusi layanan sosial) selama hampir dua dekade belakangan (tiga dekade sampai penulisan ini), merupakan kesatuan yang dioperasikan sebagai jaringan yang saling berintegrasi satu dengan yang lain dan bersifat holistik (keseluruhan). Lebih lanjut Mona menegaskan bahwa, Hizbullah muncul sebagai satu entitas yang berhasil mengkorelasikan sebuah gerakan politik dan keagamaan kedalam satu kerangka yang saling berkesinambungan. Prinsip tersebut kemudian secara kongkrit diwujudkan oleh

Hizbullah melalui kebijakan partai berupa kontribusi sosial maupun manuver politik lainnya yang ditujukan untuk memobilisasi komunitas masyarakat menjadi sebuah gerakan perlawanan dibawah atmosfir *al-Hala al-Islamiyyah* (komunias yang berazaskan keislaman) (Harb & Leenders, 2005).

Dalam pandangan Hizbullah, sebuah praktik resistansi (gerakan perlawanan) merupakan sebuah prinsip serta tanggung jawab utama yang memiliki posisi esensial dalam implementasi gerakan kelompok ini. Resistansi tersebut secara spesifik ditujukan oleh Hizbullah dengan tidak membatasi konteks *jihad* (perjuangan) hanya pada lingkup militeristik semata, melainkan juga sampai pada ranah partisipasi sosial dan politik. Dalam arti lain Hizbullah memaknai konsep *jihad* tersebut sebagai “*jihad spiritual*” yang cakupan definisinya lebih luas dari pada “*jihad militer*” (perlawanan bersenjata). Konsep tersebut ditekankan oleh Sekjen Hizbullah, Hasan Nasrallah yang mengatakan; “*The prophet told us: combat is a small jihad, the biggest jihad is the spiritual jihad* (Harb & Leenders, 2005).”

Dalam tinjauan akademik, fleksibilitas Hizbullah tersebut disebut dengan istilah “*Lebanonisation*”. Istilah tersebut mendeskripsikan pada efektifitas serta efisiensi aktifitas Hizbullah yang terimplementasikan pada dua tingkatan. Pertama yakni Hizbullah sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap pelayanan sosial masyarakat Lebanon. Kedua, istilah *Lebanonisation* merujuk tentang keberhasilan Hizbullah dalam mentransformasi dirinya yang pada mulanya sebagai milisi bersenjata hingga kemudian menjadi partai politik yang sukses untuk *survive* dalam perpolitikan Lebanon yang kompleks (Harb & Leenders, 2005). Dengan demikian, partisipasi Hizbullah dalam sistem perpolitikan Lebanon serta progresifitas organisasi ini untuk terlibat dalam konstelasi geopolitik Timur Tengah merupakan indikasi bahwasanya eksistensi kelompok tersebut muncul sebagai suatu entitas yang bersifat holistik (mencakup milisi bersenjata & partai politik) dan saling berkaitan satu sama lain.

3.2 Hubungan Hizbullah dengan Negara Arab Teluk

Pada sub-bab sebelumnya telah dijelaskan terkait eksistensi Hizbullah sebagai entitas yang holistik pada setiap manuvernya baik dalam konteks internal Lebanon maupun keterlibatan kelompok ini dalam konstelasi politik Timur Tengah. Selanjutnya penulis akan menginjak pada pembahasan tentang progresifitas Hizbullah di Timur Tengah dan perspektif negara GCC dalam memandang eksistensi Hizbullah. Sebelum menginjak pada pembahasan inti, penulis akan terlebih dahulu memulai ulasan tentang hubungan diplomatik antara Hizbullah dengan beberapa negara Arab Teluk. Secara umum, hubungan Hizbullah dengan negara-negara di Timur Tengah pada hakekatnya didasarkan pada prinsip utama organisasi tersebut, yakni sikap resistansi terhadap Amerika dan Israel. Walaupun secara resmi Hizbullah menerapkan kebijakan *non-interference* (tidak ikut campur) terhadap keadaan internal negara-negara Arab, namun kelompok ini tetap menyoroti perkembangan negara-negara tersebut khususnya ketika kebijakan mereka menyangkut isu tertentu –yang menurut Hizbullah– berkaitan dengan kepentingan dunia Arab dan Islam secara keseluruhan (Shalabi, 2015:29).

Meningkatnya kedekatan relasi antara negara-negara Arab Teluk dengan Amerika Serikat khususnya Israel beberapa tahun belakangan (Jones and Guzansky, 2017), membuat posisi Hizbullah dengan pemerintah negara Arab semakin memanas. Hizbullah memandang para rezim Arab tersebut merupakan kepanjangan tangan Amerika Serikat dalam menanamkan dominasinya di kawasan Timur Tengah. Berkaitan dengan isu Palestina, Hizbullah mengkritik pedas akan diamnya negara-negara Arab (kecuali Suriah) terhadap perilaku Israel. Sikap sentimen tersebut ditunjukkan oleh Hizbullah dengan membuat surat terbuka kepada rezim Arab di tahun 1985 yang mengatakan bahwa ;

“Para rezim Arab tidak akan berani dalam menghadapi entitas Zionis yang merongrong Palestina karena pada dasarnya mereka didirikan oleh para kolonialis” dan “negara penghasil minyak tersebut “hanya tinggal diam dengan keputusan yang ditetapkan oleh gedung putih kepada mereka” (Joseph, 2011:50-51).

Hizbullah pun juga melayangkan peringatan kepada rezim Arab tersebut bahwa “akan datang satu hari nanti ketika para rezim Arab tersebut akan jatuh di bawah tangan orang-orang yang terzalimi” (Joseph, 2011:52).

Terkait posisi negara-negara Arab kepada Hizbullah, mereka memandang organisasi tersebut tidak lebih hanya sebagai kelompok yang memicu terjadinya distabilitas kawasan dan instrumen Iran dalam meluaskan pengaruh geopolitiknya. Dalam Isu Israel-Palestina, pada awalnya sikap konfrontatif Hizbullah terhadap Israel cukup sulit untuk dikritisi oleh rezim Arab mengingat pentingnya isu Palestina dalam diskursus masyarakat Timur Tengah (Shalabi, 2015:30). Situasi tersebut cukup menguntungkan Hizbullah, karena bagaimanapun kritik yang dilayangkan oleh para rezim Arab tersebut justru akan menjadi bumerang bagi pemerintahan mereka. Namun, situasi berubah ketika terjadi perang Lebanon tahun 2006 antara Hizbullah dan Israel. Saat itu Arab Saudi yang didukung beberapa negara semenanjung Arab, Jordania, dan Mesir mengecam tindakan Hizbullah karena dianggap memicu terjadinya kekacauan di kawasan (H.M. Fattah, 2006). Bagi negara-negara Arab, kecaman tersebut patut dilakukan mengingat pengaruh Iran yang kala itu semakin intensif masuk ke negara-negara Timur Tengah, seperti Irak pasca invasi Amerika Serikat. Negara-negara Arab tersebut tidak dapat melewatkan kesempatan ini (mengecam Hizbullah) sebagai upaya antisipasi terhadap kelompok yang mereka anggap sebagai instrumen hegemoni Iran di negara Timur Tengah seperti Lebanon.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa upaya negara-negara Arab untuk membendung pengaruh Iran di Timur Tengah adalah dengan mendirikan organisasi regional, yakni GCC. Selain bertujuan untuk merespon isu regional kala itu, salah satu tujuan utama pendirian GCC sendiri pada awalnya adalah sebagai reaksi negara semenanjung Arab terhadap revolusi Islam Iran. Dengan latarbelakang identitas dan kepentingan yang relatif sama antar anggotanya, GCC menjadikan Iran sebagai ancaman regional. Diantara negara anggota GCC, Arab Saudi merupakan negara yang pengaruhnya terimplementasi secara signifikan di dalam organisasi regional tersebut.

Arab Saudi pun seringkali menggunakan pengaruhnya untuk membentuk opini negara-negara anggota GCC yang lain demi mendukung kepentingan Riyadh, khususnya berkaitan dengan isu keamanan. Faktanya, Arab Saudi merupakan satu-satunya negara anggota GCC yang memiliki stabilitas ekonomi dan kekuatan militer yang dapat mengimbangi kekuatan Iran (Guzansky, 2015a). Arab Saudi berupaya membuat konstruksi akan bahaya Iran dan permusuhannya terhadap negara Arab Teluk untuk mendorong komitmen negara anggota GCC dalam memenuhi perannya sebagai organisasi keamanan regional. Melalui menteri dalam negerinya, Arab Saudi pun bahkan menyatakan bahwa “Keamanan setiap negara Arab Teluk juga merupakan tanggung jawab keamanan Arab Saudi” (Guzansky, 2014).

Bagi rezim al-Saud, Iran merupakan ancaman keamanan yang paling diprioritaskan. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya, Arab Saudi mempersepsikan Iran sebagai entitas negara yang tidak dapat dipercaya, ekspansionis, pendukung gerakan terorisme dan narasi sektarian demi meraih hegemoni regional sekaligus mengganggu stabilitas kerajaan beserta aliansinya (Bergenwall, 2016). Tanpa terkecuali, Hizbullah pun tidak luput dari konstruksi negatif tersebut, karena bagaimanapun Hizbullah merupakan organisasi yang memiliki afiliasi dengan Iran. Menurut negara anggota GCC, Hizbullah merupakan instrumen Iran yang aktif terlibat dalam mensukseskan kepentingan Teheran di Timur Tengah, sehingga negara-negara GCC pun menganggap Hizbullah adalah elemen yang mengganggu kepentingan dan keamanan negara anggota GCC di regional tersebut. Salah satu bukti persepsi negatif Arab Saudi terhadap kedua pihak tersebut adalah adanya organisasi pro-Iran di Arab Saudi, yang bercokol di dalam komunitas Syiah dan keanggotaannya mendapatkan dukungan dari Iran serta memiliki keterkaitan dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Organisasi yang dikenal dengan nama ‘*Hezbollah al-Hejaz*’ tersebut dicurigai oleh Arab Saudi sebagai dalang dibalik serangan bom di *Khobar Tower* pada juni 1996 (Guzansky, 2015c:43).

Kesimpulanya, hubungan antara Hizbullah dengan negara Arab GCC dicirikan dengan nuansa permusuhan dan saling ketidakcocokan satu sama lain. Pada satu sisi, Hizbullah menganggap negara Arab GCC adalah kolaborator imperialis barat, dan sebaliknya menurut rezim Arab GCC, Hizbullah adalah organisasi afiliasi Iran yang mengancam *status quo* negara monarki anggota GCC. Terdapat beberapa contoh kasus kontemporer yang terjadi dalam peristiwa *Arab Spring* sehingga menyebabkan Hizbullah dan negara GCC terlibat dalam gesekan kepentingan. Sehingga dalam perspektif negara GCC, gesekan tersebut merupakan upaya Hizbullah dalam mendestabilisasi kepentingan negara GCC yang pada akhirnya menjadi latarbelakang dan menetapkan Hizbullah sebagai anggota teroris internasional.

3.3 Arab Spring, Posisi Hizbullah dalam Babak Baru Rivalitas Iran dan GCC

Fenomena *Arab Spring* yang memicu gelombang protes masyarakat, menyebabkan jatuhnya pemerintah otoriter di beberapa negara Timur Tengah. Fenomena tersebut diakibatkan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosio-ekonomi serta kekecewaan terhadap pemerintah otoriter di negara mereka. Berawal dari tumbanganya Ben Ali di Tunisia di Tunisia, Hingga jatuhnya presiden Hosni Mubarak di Mesir, fenomena *Arab Spring* lantas menimbulkan *spillover effect* di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah lainnya, tanpa terkecuali negara Arab GCC (Ulrichsen, 2014:107).

Gelombang *Arab Spring* yang juga melanda negara semenanjung Arab membuat negara anggota GCC juga harus berurusan dengan tuntutan masyarakat di negara mereka. fenomena ini merupakan krisis politik terbesar yang dialami semenjak terjadi revolusi Islam Iran di era 80an. Dalam upaya untuk meredam gelombang protes masyarakat, negara anggota GCC merespon tuntutan tersebut dengan pendekatan yang bervariasi, yakni secara internal merkea memberikan insentif finansial, lapangan pekerjaan dan peningkatan layanan sosial kepada warga negara mereka, dan secara eksternal kawasan, para negara Arab teluk memperkuat aliansi regional mereka hingga sampai pada level intervensi militer

(Kamrava, 2012). Diantara negara-negara GCC, Arab Saudi merupakan aktor penting dalam menjaga stabilitas regionalnya. Walaupun keadaan internal Arab Saudi tidak jauh berbeda dengan negara GCC lainnya yang mendapatkan protes masyarakat, namun pihak kerajaan al-Saud sedikit lebih berhasil dalam meredam gelombang protes masyarakat tersebut dibandingkan dengan negara GCC lainnya.

Menyaksikan *spillover effect* dari fenomena *Arab Spring* yang menimpa negara-negara tetangganya, Arab Saudi merasa bertanggung jawab terhadap stabilitas keamanan regional Timur Tengah. Di level regional, Arab Saudi tidak menginginkan dampak dari *Arab Spring* tersebut menjalar dan mempengaruhi stabilitas internal negaranya dan negara anggota GCC yang lain. Dalam merespon keadaan tersebut, Arab Saudi berupaya untuk mempertahankan *status quo* negara-negara GCC yang lain dengan memperluas perannya di regional Timur Tengah disamping mengejar *national interest* nya (Quamar, 2014). Karena bagaimanapun, selain memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang relatif kuat diantara negara GCC, Arab Saudi merupakan negara yang memiliki peran signifikan dalam dunia Arab-Islam melalui forum-forum internasional seperti Liga Arab, GCC, OKI, dan juga organisasi negara pengekspor minyak OPEC. Berubahnya tatanan geopolitik di Timur Tengah akibat *Arab Spring* tentu juga akan mempengaruhi posisi Arab Saudi di tatanan dunia Arab-Islam dan forum internasional tersebut. Sedangkan dilain sisi, Iran juga tampak memanfaatkan pergolakan politik yang terjadi di dunia Arab sebagai kesempatan untuk memperluas hegemoninya (Quamar, 2014). Posisi Iran sebagai lawan utama Arab Saudi tersebut semakin meningkatkan urgensi Riyadh untuk semakin terlibat dalam konstelasi politik Timur Tengah.

Secara kongkrit upaya Arab Saudi dalam merespon pergolakan politik di Timur Tengah ditunjukkan dengan intervensi mereka di beberapa negara di regional ini. Arab Saudi yang pada umumnya dikenal sebagai rezim yang pro terhadap *status quo*, kini lebih pragmatis dalam memandang gelombang revolusi Arab tersebut. Hal itu terbukti dengan fleksibilitas kebijakan mereka yang terkadang mendukung elemen revolusioner, walaupun pada lain kesempatan mereka memainkan peran sebagai elemen kontra-revolusi tergantung pada

kepentingan yang berlaku. Sebagai contoh, ketika gelombang revolusi terjadi di Libya, negara-negara teluk tersebut memiliki peran penting dalam mendukung intervensi asing dan elemen revolusioner untuk menggulingkan presiden Muammar Ghadafi. Begitu pula ketika gelombang Arab Spring sampai di Suriah, Arab Saudi dibantu dengan negara Teluk lainnya membantu oposisi untuk meruntuhkan rezim pemerintah Assad. Namun di kesempatan lain, mereka membantu upaya kontra-revolusi rezim al-Khalifa di Bahrain dan presiden Mansur Hadi di Yaman (Berti and Guzansky, 2015). Kebijakan standar ganda yang di terapkan Arab Saudi di negara Timur Tengah tersebut memiliki alasan tertentu, khususnya berkaitan dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi.

Kepentingan Arab Saudi beserta negara GCC dalam praktiknya terhalang dan harus berhadapan dengan eksistensi Iran yang juga tengah menanamkan hegemoninya di regional Timur Tengah. Gelombang *Arab Spring* tersebut juga memicu persaingan regional antara Iran dan Arab Saudi kembali intensif. Dalam konteks jaringan regional, *hard power*, ukuran demografis dan letak geografi strategis, Iran memiliki standar yang cukup baik untuk menjadikannya sebagai aktor berpengaruh di regional Timur Tengah. Dibanding dengan posisi negara Arab Teluk, Iran selangkah lebih awal dalam membangun relasi dan jaringan strategis dengan beberapa pihak tertentu (*state & non-state actor*) yang membentang dari Afghanistan, Irak, Suriah sampai Lebanon (Saikal, 2016:170). Arab Saudi memandang fenomena *Arab Spring* tersebut sebagai potensi bagi Iran dalam upayanya memanfaatkan gelombang revolusi yang terjadi di sejumlah negara Arab untuk memperluas pengaruhnya di regional Timur Tengah (Guzansky, 2014).

Pada satu sisi Iran menganggap *Arab Spring* merupakan oportunitas penting bagi Teheran untuk meluaskan pengaruhnya di Timur Tengah. Bergantinya rezim otoriter dengan pemerintahan yang lebih terbuka (demokratis) di Timur Tengah akan meringankan tekanan yang selama ini Iran dapatkan dari negara sekitarnya sekaligus membuka kesempatan bagi Teheran untuk menanamkan pengaruh di negara-negara tersebut. Namun di sisi lain, gelombang

Arab Spring yang juga menimpa Suriah merupakan ancaman bagi kepentingan Iran di regional tersebut. Jatuhnya rezim Assad akan memberikan dampak negatif bagi jalur logistik dan persenjataan bagi Hizbullah di Lebanon (Ahmadi, 2013). Latarbelakang tersebut yang kemudian mempengaruhi posisi Hizbullah dalam pusaran krisis politik *Arab Spring*.

Selaras dengan Iran, posisi Hizbullah dalam merespon fenomena *Arab Spring* juga dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Dalam konteks geopolitik, walaupun Hizbullah mengklaim bahwa dirinya tidak akan ikut campur dan mendukung gelombang *Arab Spring* melanda Dunia Arab, namun dalam kasus tertentu seperti Suriah, Hizbullah terlibat dalam mendukung pihak pemerintah Bashar al-Assad melawan oposisi bersenjata (Alagha, 2014). Posisi Hizbullah yang selaras dengan kepentingan Iran serta keterlibatannya dalam kasus tertentu di beberapa negara Timur Tengah menyebabkan organisasi ini berdiri melawan kepentingan negara GCC.

3.4 Hizbullah Melawan Kepentingan GCC

Dalam menjelaskan posisi Hizbullah *vis-à-vis* dengan kepentingan GCC, penulis akan memaparkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, yakni Bahrain, Yaman, Lebanon, dan Suriah. Pada contoh kasus di beberapa negara tersebut, Hizbullah hadir sebagai elemen yang selaras dengan kepentingan Iran dan mengancam eksistensi negara Arab Teluk GCC (khususnya Arab Saudi).

3.4.1 Bahrain

Pada 14 Februari 2011, pemerintah Bahrain menjadi sasaran selanjutnya dari serial protes massa yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Masyarakat Bahrain dari berbagai kalangan bersatu dalam aksi melawan rezim al-Khalifa yang berkuasa di Manama (Machlis, 2016). Secara umum, protes masyarakat Bahrain tersebut didominasi oleh kalangan Syiah, karena secara demografis 60-70 persen warga negara Bahrain adalah muslim Syiah (Matthiesen, 2013:3). Sejak hari pertama, di samping menuntut turunnya rezim al-Khalifa, protes masyarakat tersebut juga menuntut dibebaskannya tahanan politik, penghapusan *travel ban*

(pelarangan perjalanan), pembentukan konstitusi baru, dan advokasi terhadap hak politik serta hak asasi manusia (Matthiesen, 2013:12). Tuntutan tersebut dilatar belakangi atas sikap diskriminatif yang selama ini dilakukan oleh pihak pemerintah. Walaupun populasi mereka mencapai 70 persen, namun kelompok Syiah di Bahrain mengalami marginalisasi politik oleh pemerintah (Machlis, 2016).

Secara historis, komunitas Syiah sejak lama telah menempati area pesisir timur semenanjung Arab seperti daerah Qatif, al-Ahsa (provinsi timur Arab Saudi) dan Bahrain sebelum klan al-Khalifa mengambil alih tempat tinggal mereka pada tahun 1783. Sebaliknya apabila ditelusuri, klan al-Khalifa dan beberapa klan Sunni lain yang tinggal di Bahrain berasal dari pelosok Arab Saudi yang berideologi Wahabi dan memiliki keterkaitan dengan klan al-Saud. Aspek historis tersebut menjadi salah satu narasi mobilitas sosial dalam aksi protes masyarakat Bahrain melawan pemerintah al-Khalifa. Tidak mengherankan apabila muncul slogan diantara protes masyarakat tersebut seperti “Kami adalah penduduk asli pulau ini (Bahrain) (Matthiesen, 2013:31).

Merespon keadaan yang semakin memanas, pihak pemerintah melakukan tindakan represif kepada aksi massa tersebut dengan bantuan aliansi regionalnya di GCC. Berkumpul di Manama, perwakilan GCC berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap rezim al-Khalifa dan akan bertindak tegas dalam upaya meredam revolusi yang tengah menjamur di negara-negara teluk (Matthiesen, 2013:34). Rezim al-Khalifa mendapatkan dukungan dari Uni Emirat Arab, Qatar, Oman dan Kuwait, namun diantara anggota GCC, Arab Saudi merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam meredam protes tersebut (Matthiesen, 2013:19). Diantara negara anggota GCC, Bahrain dianggap sebagai lini terlemah yang rentan terhadap tekanan massa dan intervensi pihak luar. Oleh karena itu, negara anggota GCC dan secara khusus Arab Saudi khawatir bahwa potensi keberhasilan protes massa di Bahrain akan menjalar ke provinsi Timur Arab Saudi (mayoritas Syiah) yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi Iran (Matthiesen, 2013:53).

Dukungan terhadap Bahrain secara kongkrit ditunjukkan dengan intervensi militer oleh beberapa anggota GCC seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Intervensi militer tersebut terdiri atas 1200 divisi pasukan dari Arab Saudi, 600 personil polisi dari Uni Emirat Arab, dan armada laut ringan dari Kuwait, Mereka tergabung dalam *Peninsula Shield Force*, sebuah institusi kemanan milik GCC (Guzansky, 2015c:90). Pengiriman pasukan tersebut diduga dilakukan atas dasar undangan raja Bahrain Hamad al-Khalifa di bawah persetujuan GCC, walaupun sebenarnya keputusan tersebut kuat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh *hawkish* di klan al-Saud, salah satunya yakni Nayef bin Abdul Aziz al-Saud (menteri dalam negeri Arab Saudi) (Matthiesen, 2013:51). Dengan melakukan pendekatan represif terhadap para demonstran, Intervensi militer tersebut berhasil memadamkan gelombang protes masyarakat.

Selain alasan geopolitik, keterlibatan Arab Saudi di Bahrain juga memiliki latar belakang ekonomi. Pendapatan dan anggaran pemerintah Bahrain secara signifikan bergantung pada Arab Saudi. Jembatan lintas negara (*King Fahd Causeway*) sejauh 8 kilometer yang menghubungkan antara Bahrain dengan daratan Saudi merupakan fasilitas perdagangan dan lalu lintas bagi kedua negara. Jembatan yang di resmikan pada tahun 1986 tersebut merupakan sarana vital bagi perekonomian Bahrain dan Arab Saudi (Matthiesen, 2013:30). Disamping suplai minyak *offshore* (lepas pantai) yang disubsidi oleh pemerintah Arab Saudi, Sektor pariwisata Bahrain pun bergantung pada pengunjung dari Riyadh. Arus perdagangan dan pendapatan yang didapatkan dari relasi kedua negara dapat mencapai keuntungan 18 juta dollar pertahun (Matthiesen, 2013:30). Sehingga, stabilitas keamanan dan keberlangsungan rezim al-Khalifa di Bahrain merupakan prioritas bagi Arab Saudi dan negara GCC lainnya.

Protes masyarakat Bahrain yang didominasi oleh komunitas Syiah tersebut memunculkan sebuah anggapan bahwasanya aksi anti pemerintah tersebut didasari atas identitas madzhab tertentu yang memunculkan celah bagi rezim penguasa untuk memainkan agenda sektarian. Namun faktanya, terjadinya isu sektarian tersebut adalah justru sebuah hasil konstruksi dari penguasa. Selain dengan pendekatan militeristik, rezim al-Khalifa juga mengobarkan propaganda

sektarian. Propaganda sektarian yang di dukung oleh Arab Saudi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memecah kekuatan oposisi di seluruh fenomena *Arab Spring*. Kedua negara tersebut membangun konstruksi akan ancaman kelompok Syiah (*shia threat*) yang didukung oleh Iran akan menanamkan pengaruh di regional GCC (Matthiesen, 2013:19). Wacana *shia treat* ini nantinya juga dilakukan untuk mempengaruhi persepsi publik dalam mendiskreditkan Iran, rezim Bashar al-Assad, kelompok Ansarullah di Yaman dan Hizbullah.

Pihak Arab Saudi beserta anggota GCC lain menuduh bahwasanya terdapat campur tangan Iran dibalik protes masyarakat Bahrain (Matthiesen, 2013:79). Dalam pertemuannya dengan para perwira *Peninsula Shield Force*, raja Hamad al-Khalifa mengklaim bahwa terdapat “*external plot*” (merujuk kepada Iran) yang sejak lama telah direncanakan untuk menggulingkan pemerintahan Bahrain (Matthiesen, 2013:50). Pernyataan tersebut mendapatkan *counter statement* dari pemimpin Iran Ayatullah Ali Khamenei melalui khutbah Jum’at di Teheran yang mengatakan, “Klaim pihak Bahrain merupakan bentuk kebohongan, Iran tidak melakukan intervensi di Bahrain, jika kami melakukan intervensi, kondisi di Bahrain sudah pasti berbeda” (Matthiesen, 2013:50).

Pemerintah Bahrain juga menuduh adanya keterlibatan Hizbullah yang berada di pihak oposisi. Pada dasarnya, eksistensi Hizbullah merupakan salah satu simbol perlawanan yang cukup populer di kalangan Arab Syiah sejak beberapa dekade terakhir (Matthiesen, 2013:44). Kecurigaan akan keterlibatan Hizbullah di Bahrain sempat menjadi perdebatan yang kompleks di antara para aktor yang terlibat, pada satu sisi rezim al-Khalifa mengklaim bahwa terdapat kelompok lokal yang mendapatkan pengarahan langsung dari Iran dan Hizbullah, tetapi pihak oposisi mengklaim bahwa tidak pernah ada eksistensi Hizbullah dalam protes di Bahrain. Menurut Toby Matthiesen, dari sekian kelompok yang terlibat dalam protes tersebut, memang terdapat beberapa gelintir orang yang menyatakan afiliasinya dengan Hizbullah, namun bukan berarti secara keseluruhan kelompok oposisi pemerintah sejalan dengan ambisi regional Iran dan Hizbullah (Matthiesen, 2013:44-45). Bagaimanapun, dikarenakan rekam jejaknya yang buruk dengan negara teluk dan afiliasinya dengan Iran, eksistensi Hizbullah

merupakan ancaman bagi pemimpin Arab GCC yang menyebabkan kelompok tersebut kerap menjadi objek kecurigaan.

3.4.2 Yaman

Sebelum menginjak pada pembahasan keterlibatan Hizbullah dalam konflik Yaman, perlu untuk di ketahui konteks historis dan pihak-pihak yang memiliki posisi signifikan di dalam internal Yaman. Penjelasan ini perlu untuk diketahui sebelum masuk pada konflik Yaman yang terjadi pasca *Arab Spring*. Bagaimanapun, konflik tersebut nantinya juga akan menyeret nama Hizbullah.

Pada tahun 1990, terdapat upaya unifikasi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan di bawah presiden Ali Abdullah Saleh menjadi Republik Arab Yaman. Sebelumnya, antara Yaman Utara dan Yaman Selatan terjebak dalam arus perang dingin yang memisahkan mereka kedalam dua kubu antara blok barat (Yaman Utara) dan blok timur (Yaman Selatan) (Rugh, 2015). Sejak dekade sebelumnya, peran Arab Saudi dan negara GCC cukup signifikan dalam mendukung Ali Abdullah Saleh sebagai representasi blok pro-Amerika melawan Yaman Selatan yang merupakan proxy Uni Soviet di Semenanjung Arab (Rugh, 2015). Secara perspektif ekonomi, selain memiliki sumber daya alam minyak (meski 0,2 % produksi minyak dunia), Yaman memiliki letak geografis yang dilalui oleh jalur perdagangan dunia, yakni Bab al-Mandeb dan Teluk Aden. Selat Bab al-Mandeb merupakan titik transit bagi kapal-kapal pengangkut minyak dan komoditi lain yang menghasilkan profit cukup signifikan. Oleh karena potensi eko-strategis itulah Yaman menempati posisi prioritas dan penting bagi Amerika Serikat serta sekutu regionalnya di Timur Tengah (negara GCC) (Cordesman, 2015).

Pasca unifikasi tersebut justru menimbulkan perpecahan di dalam internal Yaman. Terdapat fraksi-fraksi elemen rakyat Yaman merasa tidak diuntungkan dengan unifikasi tersebut, salah satunya diakibatkan oleh administrasi pemerintahan yang tidak adil dalam melakukan kebijakan distribusi ekonomi (Rugh, 2015). Salah satu diantara fraksi rakyat tersebut adalah kelompok Houthi. Kelompok yang didirikan pada era 90an ini merupakan gerakan rakyat yang berbasis di daerah Sa'dah (Yaman Utara). Penamaan Houthi dinisbahkan kepada nama pendirinya yakni Husein Badreddin al-Houthi yang terbunuh ketika

mengalami *clash* dengan militer pemerintah di tahun 2004, namun nama resmi dari kelompok ini adalah “Ansarullah” (Rugh, 2015). Secara entitas ideologis, kelompok Ansarullah menganut mazhab Syiah Zaydiah (salah satu cabang dari Islam Syiah) yang merupakan representasi 30-35 persen populasi di Yaman (Juneau, 2016).

Secara umum, kelompok Ansarullah hanya menuntut pengakuan atas diskriminasi politik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok mereka dan memperhatikan keadaan ekonomi daerah Yaman Utara. *Clash* antara Ansarullah dengan pemerintah pertama kali dimulai pada tahun 2004. Rekam jejak Ansarullah yang seringkali terlibat pertempuran dengan pemerintah pusat, menyebabkan presiden Saleh menuding kelompok tersebut adalah *proxy* Iran. Tudingan tersebut diafirmasi oleh Arab Saudi dengan melakukan intervensi militer untuk pertama kalinya pada tahun 2009 dikarenakan kekhawatiran Riyadh akan potensi ancaman Ansarullah yang dipersepsikan sebagai *proxy* Iran (Juneau, 2016).

Ketika fenomena *Arab Spring* menyapu regional semenanjung Arab, arus demokratisasi tersebut juga memicu protes rakyat terhadap pemerintah Yaman. Rakyat Yaman yang selama ini kontra dengan pemerintah, menuntut Ali Abdullah Saleh untuk turun dari jabatan presiden. Atas prakarsa GCC dan Amerika Serikat, Ali Abdullah Saleh akhirnya setuju untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden dan digantikan dengan wakilnya Abd Rabb Mansour al-Hadi. Transisi pemerintahan tersebut tidak lantas meredam tensi antara Ansarullah dengan pihak pemerintah. Segera setelah terpilihnya presiden Hadi, pemerintah mengadakan konferensi nasional untuk menyusun kembali konstitusi negara tersebut. Singkatnya, kelompok Houthi menolak hasil konferensi nasional tersebut karena pemerintah dianggap tidak *fair* dalam memenuhi tuntutan otonomi daerah yang diinginkan kelompok mereka. ketidak sepahaman antara Ansarullah dan pemerintah tersebut menyeret Yaman menuju perang sipil (Juneau, 2016).

Memanfaatkan keadaan internal pemerintahan yang lemah, kelompok Ansarullah berhasil mengambil alih ibukota Yaman (Sana'a) pada September 2014 (Alley, 2014). Manuver Ansarullah yang semakin progresif berhasil

meluaskan ekspansi teritorialnya sampai daerah Yaman Selatan menduduki titik-titik strategis seperti Aden dan bab al-Mandeb. Menyaksikan manuver Ansarullah yang berhasil menduduki area strategis, pada 25 Maret 2015 Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi militer yang terdiri dari 10 negara untuk melancarkan serangan udara terhadap posisi Ansarullah (Juneau, 2016). Koalisi militer yang terdiri dari negara GCC (kecuali Oman) dan beberapa negara Timur Tengah yang juga didukung oleh Amerika Serikat mendukung pihak presiden Hadi untuk merebut kembali teritorinya dari Ansarullah (Naylor, 2015). Walaupun sempat merebut kembali sebagian teritori penting, namun progres koalisi tersebut cukup lamban akibat perlawanan yang dilancarkan oleh Ansarullah.

Menurut perspektif Arab Saudi, terdapat beberapa alasan penting terkait intervensi militer yang mereka lakukan di Yaman. Pertama adalah manuver Houthi yang mampu mengambil alih sebagian besar teritori penting di Yaman, khususnya sektor ekonomi strategis seperti Aden dan Bab al-Mandeb. Kedua yakni Riyadh memandang Ansarullah sebagai representasi kelompok Syiah yang potensi ancaman (dalih sektarian) identitas keislaman versi Arab Saudi. Ketiga adalah Arab Saudi percaya bahwa Ansarullah merupakan kelompok yang mendukung kepentingan Iran, yang tentunya memberikan ancaman geopolitik mengingat secara geografis teritori Yaman berbatasan langsung dengan Arab Saudi.

Konflik tersebut membuat Arab Saudi dan aliansi GCC-nya juga kembali menghidupkan nuansa anti-Iran dengan menuduh bahwa Ansarullah merupakan kelompok yang didukung oleh Teheran. tuduhan tersebut tidak luput dari bingkai rivalitas antara Arab Saudi dengan Iran yang tengah memanas. Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan bahwa Riyadh memandang terdapat peran besar Iran dalam mendukung kelompok Houthi (Strobell and Hosenball, 2015). Lebih jauh lagi, Riyadh juga melayangkan tuduhan bahwa terdapat keterlibatan Hizbullah dalam upaya membantu pejuang Houthi di Yaman. Pihak Arab Saudi mengklaim bahwa pada akhir bulan Februari 2016, Hizbullah telah mengirimkan muatan

kapal yang berisi rudal (*surface-to-surface missiles*) kepada pihak Ansarullah melalui bandar pelabuhan Hudaidah (Legrenzi and Lawson, 2016).

Terlepas dari klaim Arab Saudi atas keterlibatan Hizbullah di Yaman, memang terdapat pernyataan dari Sekjen Hizbullah, Hasan Nasrallah yang mendukung rakyat Yaman dan sekaligus melontarkan kritik terhadap agresi yang dilakukan oleh Arab Saudi. Menepis tudingan Arab Saudi terhadap eksistensi Iran dan Hizbullah mendukung kelompok Houthi di Yaman, Nasrallah mengatakan bahwa “dalih Riyadh untuk melakukan agresi di Yaman demi mencegah adanya pengaruh Iran atas Sana’a merupakan klaim imajiner (Al-Manar, 2015)”. Walaupun pernyataan Sekjen Hizbullah tersebut secara jelas mengindikasikan dukungan Hizbullah terhadap Ansarullah, akan tetapi bagaimanapun hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan intervensi Hizbullah di Yaman sebagaimana keterlibatannya di Suriah dan Irak. Akan tetapi, bagaimanapun klaim Arab Saudi tersebut telah membentuk persepsi bahwasanya terdapat keterlibatan Hizbullah yang berupaya untuk membantu milisi Houthi.

3.4.4 Lebanon

Pasca terbunuhnya perdana menteri Lebanon, Rafik Hariri pada 14 Februari 2005 silam, situasi internal Lebanon terbagi menjadi 2 aliansi politik utama, yakni aliansi 14 Maret dan aliansi 8 Maret. Satu bulan pasca terbunuhnya Rafik Hariri, terbentuklah aliansi 14 Maret (tanggal revolusi Cedar) yang merupakan blok anti-Suriah dan memiliki tujuan utama menuntut keluarnya pengaruh Damaskus dari internal Lebanon. Komposisi utama aliansi ini terdiri dari partai Sunni dan Kristen. Aliansi tersebut secara signifikan mendapat dukungan dari Arab Saudi dan mendukung penuh atas pelucutan senjata milik *muqawamah* Hizbullah, karena mereka memandang organisasi perlawanan tersebut hanyalah instrumen Suriah dan Iran dalam menanamkan pengaruh di Lebanon. Lawan utama politiknya adalah Aliansi 8 Maret (yang penamaannya diambil dari tanggal perayaan berhasilnya pasukan Suriah mengakhiri perang sipil Lebanon). Komposisi utama aliansi ini adalah para pendukung Hizbullah yang didominasi oleh komunitas Syiah dan partai Kristiani *Free Patriotic Movement* (Holmquist, 2015).

Sejak beberapa dekade terakhir, internal politik Lebanon sarat dengan adanya intervensi pihak internasional maupun regional. Rivalitas geopolitik antara Riyadh dan Teheran juga merambah pada dinamika internal politik Beirut yang secara tidak langsung juga mempengaruhi tensi kedua aliansi politik di Lebanon. Pengaruh dua kekuatan regional tersebut juga sampai pada pertarungan politik kandidat presiden Lebanon sehingga sempat mengalami *vacuum* selama hampir dua setengah tahun (pertengahan 2014-2016 akhir). Sampai pada Desember 2015, terdapat dua kandidat tetap presiden Lebanon yakni Michel Aoun, dan Sulaiman Franjiyyah (Legrenzi and Lawson, 2016). Michel Aoun merupakan kandidat yang mendapatkan dukungan kuat dari kubu aliansi 8 Maret (didominasi Hizbullah). Sedangkan kandidat lawan, Sulaiman Franjiyyah, walaupun ia dulunya adalah publik figur Lebanon yang mendukung intervensi Suriah di Beirut, namun dalam pertarungan politik kali ini Sulaiman mendapatkan dukungan dari Saad Hariri (ketua aliansi 14 Maret) (ACRPS, 2016). Dukungan Hariri kepada Sulaiman merupakan komposisi politik yang cukup aneh, karena pada dasarnya dukungan tersebut bertentangan dengan prinsip aliansi 14 Maret yang anti terhadap eksistensi Suriah di Lebanon.

Dalam perkembangannya, Michel Aoun yang merupakan kandidat dukungan Hizbullah semakin mendapatkan dukungan dari elemen politik Lebanon dan menyurutkan popularitas kandidat dukungan aliansi 14 Maret (Sulaiman Franjiyyah). Belakangan, yang lebih mencengangkan adalah keputusan Saad Hariri untuk memberikan dukungan kepada Michel Aoun dari pada memberikan dukungannya kepada Sulaiman Franjiyyah. Langkah Hariri tersebut berdampak negatif pada hubungannya dengan Arab Saudi yang selama ini mendukung Aliansi 14 Maret (Legrenzi and Lawson, 2016). Bagaimanapun, dukungan Hariri terhadap Aoun merupakan langkah yang menguntungkan Hizbullah dan Iran dalam internal politik Lebanon.

Peta politik Lebanon yang memberikan sinyal positif bagi kemenangan Aoun, membuat Arab Saudi semakin kehilangan patronasinya di Beirut. Sebaliknya, sinyal positif tersebut akan memberikan potensi bagi Hizbullah untuk semakin leluasa di dalam dinamika politik Lebanon yang berarti sekaligus

memberikan kemenangan kecil bagi Iran atas persaingan regionalnya dengan Arab Saudi. Di samping telah memiliki *track record* hubungan diplomatik yang buruk dengan negara Arab, pengaruh Hizbullah di pemerintahan Lebanon inilah yang nantinya melatarbelakangi keputusan Riyadh membatalkan pemberian bantuan dan kerjasama ekonomi kepada Lebanon (Legrenzi and Lawson, 2016).

3.4.5 Suriah

Menyusul terjadinya *spillover effect* dari fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya, gelombang revolusi Arab tersebut juga telah membawa Suriah kedalam pusaran krisis politik. Secara historis, sebenarnya Suriah telah mengalami rangkaian krisis politik yang serupa sejak dekade 70 dan 80an. Kelompok oposisi pemerintah yang direpresentasi oleh Ikhwanul Muslimin melakukan pemberontakan bersenjata terhadap rezim Assad (Gowans, 2017:93-94). Ketika *Arab Spring* terjadi di Suriah, krisis politik tersebut merupakan titik tolak bagi oposisi pemerintah yang sejak beberapa dekade sebelumnya telah melancarkan upaya penggulingan terhadap rezim Assad (Draege, 2016). Seiring perkembangannya, krisis politik yang berubah menjadi konflik bersenjata antara oposisi dan pemerintah tersebut juga menjadi daya tarik bagi aktor-aktor penting regional bahkan internasional untuk turut masuk ke dalam konflik dan bersaing menentukan masa depan Damaskus (Alterman, 2013). Dalam konteks regional, Sejak awal terjadinya krisis politik, Suriah menjadi arena persaingan antara negara-negara Arab Teluk dengan Iran. Berbeda dengan prinsip *pro-status quo* mereka di Bahrain, mayoritas anggota GCC dengan antusias mendukung elemen revolusioner untuk menggulingkan presiden Bashar al-Assad. Dukungan tersebut tidak terlepas kaitannya dengan bingkai permusuhan mereka dengan musuh regional terbesarnya, Iran (Todman, 2016).

Suriah merupakan isu yang penting bagi wajah konstelasi politik anggota GCC di masa mendatang, khususnya Arab Saudi dan Qatar. Mereka menganggap bahwa situasi politik yang tengah dihadapi Suriah yang tengah bergejolak akibat gelombang Arab Spring akan memberikan potensi untuk melemahkan pengaruh Teheran di regional Timur Tengah. Lengsernya rezim Assad juga merupakan faktor yang signifikan terhadap keberlangsungan Iran di masa mendatang, karena

bagaimanapun Damaskus dipandang sebagai aset strategis yang penting bagi Teheran (Ibish, 2016). Dalam perspektif Iran, Suriah merupakan titik strategis yang vital di regional Timur Tengah dan merupakan negara sekutu terdekat bagi Teheran. Sejak era 80an, rezim Assad telah menyediakan akses yang paling krusial bagi kelangsungan *proxy* Iran di Lebanon (Hizbullah), dan di Palestina (Hamas), yakni memberikan izin Teheran untuk mengirimkan bantuan logistik dan persenjataan melalui teritori Suriah. Suriah juga merupakan partner strategis bagi Iran dalam poros perlawanan (*Axis of Resistance*) untuk melawan Israel. Oleh karena itu, keberlangsungan rezim Assad merupakan prioritas bagi Iran dan Hizbullah (Fulton, Holliday and Wyr, 2013).

Selain latar belakang geopolitis, konflik Suriah juga memuat alasan ekonomis. Penyebab lain yang menjadi *raison d'etre* pihak asing untuk terlibat dalam konflik di Suriah yakni jalur pipa penghubung suplai minyak dari Timur Tengah menuju pasar Uni Eropa yang melintasi teritori Suriah (Gowans, 2017:90), Khususnya Qatar yang berencana membangun jalur pipa gas ke Eropa melalui teritori Arab Saudi, Suriah, Turki sebelum sampai ke wilayah Eropa (El-Labbad, 2009). Kebijakan pemerintah Suriah yang menasionalisasi jalur pipa tersebut tentu menjadi ancaman kepentingan ekonomi bagi negara-negara tetangganya.

Permintaan akan sumber daya gas alam di kawasan Eropa, membuat Qatar berencana menjual sumber daya alam yang dimilikinya di pasar Uni Eropa. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pada tahun 2009 Qatar menawarkan kepada presiden Assad sebuah proposal pembangunan jalur pipa gas yang melalui teritorial Suriah dan Turki sebelum mencapai pasar Eropa. Namun, pihak Suriah menolak proposal tersebut dan justru memprioritaskan perusahaan Gazprom milik Rusia. Puncaknya adalah pada Juli 2011 ketika Suriah, Iran dan Irak menandatangani kesepakatan jalur pipa gas. Kesepakatan tersebut akan membuat Damaskus menjadi penghubung utama jalur pipa gas dari Iran melalui teritori Irak, Suriah, menuju Lebanon untuk kemudian dikirimkan di pasar Uni Eropa melalui pelabuhan Mediterania (Shueibi, 2012).

Keputusan Bashar al-Assad untuk lebih memilih Iran sebagai mitra bisnis memberikan ancaman ekonomi bagi negara Arab Teluk (Arab Saudi dan Qatar). Maka dari itu, sejak awal berlangsungnya konflik, Saudi dan Qatar terlibat dalam *proxy war* di medan laga Suriah. Bantuan logistik, Finansial dan persenjataan di gelontorkan dari dana resmi pemerintah (Arab Saudi dan Qatar) maupun donasi privat dari negara-negara Arab Teluk dalam mendukung upaya oposisi yang terdiri dari berbagai macam fraksi jihadis Islamis seperti Ikhwanul Muslimin sampai organisasi teroris internasional seperti Al-Qaeda untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad (Kourany and Myers, 2017).

Menurut Intelejen pertahanan Amerika, Sejak awal konflik, kekuatan oposisi telah didominasi oleh kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin (FSA), militan Salafi dan organisasi teroris Al-Qaeda (Gowans, 2017:139). Para kelompok Islamis tersebut mendapatkan bantuan dana dan persenjataan dari negara Arab Teluk (termasuk Arab Saudi dan Qatar), baik melalui donasi privat maupun bantuan resmi pemerintah (Gowans, 2017:142). Selain bantuan dana dari negara Arab Teluk, kekuatan oposisi Suriah juga mendapatkan dukungan Amerika Serikat melalui CIA (Gowans, 2017:144). Hingga tahun 2015, CIA telah melatih hampir 10.000 militan anti-Assad dan setidaknya telah menghabiskan dana mencapai 1 milyar dollar Amerika untuk mendukung para kombatan tersebut (Gowans, 2017:137).

Di lain sisi, kubu pemerintah Suriah juga mendapatkan dukungan dari para aktor eksternal. Dalam upaya membantu mitra regionalnya, Iran mengirimkan bantuan finansial, suplai persenjataan hingga kebutuhan dasar seperti medis dan bahan makanan ke Damaskus (Terrill, 2015). Melalui IRGC-*Quds Force* nya, Teheran memiliki peran penting untuk melatih kemampuan tempur militer pemerintah Suriah (Terrill, 2015). Masih dalam konteks dukungan terhadap Bashar al-Assad, sementara Amerika Serikat beserta negara Eropa lainnya menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Assad, Rusia (beserta Tiongkok) justru menentang setiap langkah dunia internasional yang berusaha menyudutkan pemerintah Suriah (Perra, 2016). Sejak awal keterlibatannya pada September

2015, secara signifikan Moskow berhasil mengembalikan kontrol sejumlah teritori penting kepada pemerintah Suriah (Williams and Souza, 2016). Selain itu, propaganda sektarian juga di gunakan sebagai instrumen melawan rezim Assad. Melalui media dimiliki oleh pihak kerajaan, rezim Assad didemonisasi sedemikian rupa dan dikaitkan dengan isu sektarian untuk mengkonstruksi pandangan masyarakat terhadap konflik di Suriah, termasuk didalamnya adalah Iran dan Hizbullah. Upaya propaganda tersebut memiliki peran besar dalam memobilisasi para jihadis di seluruh dunia untuk masuk dalam konflik di Suriah (Darwich and Fakhoury, 2017).

Keputusan Hizbullah untuk terlibat dalam konflik di Suriah mendukung Rezim Assad tentu menjadi ancaman bagi negara sponsor kelompok oposisi pemerintah. Sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya, masuknya Hizbullah di medan laga Suriah secara signifikan memberikan pukulan bagi manuver fraksi jihadis dukungan GCC. Manuver Hizbullah yang mampu mematahkan gerakan fraksi Jihadis berakibat pada gagalnya kepentingan negara GCC untuk menggulingkan rezim Assad. Keterlibatan Hizbullah tersebut menjadi salah satu alasan terkuat GCC untuk menetapkan organisasi tersebut sebagai teroris.

BAB 4. SEKURITISASI GULF COOPERATION COUNCIL MENETAPKAN HIZBULLAH SEBAGAI ORGANISASI TERORIS

Pada pembahasan sebelumnya dalam penulisan ini menjelaskan tentang rekam jejak Hizbullah serta dinamika hubungan kelompok tersebut dengan negara-negara GCC. Dalam pembahasan tersebut penulis bermaksud untuk membangun pandangan pembaca dalam memahami urgensi GCC menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Fokus pembahasan pada bab ini adalah memaparkan proses sekuritisasi GCC terhadap Hizbullah sehingga pada akhirnya memutuskan kelompok ini sebagai organisasi teroris. Manuver sekuritisasi GCC tersebut merupakan instrumen yang efektif untuk mengkonstruksi Hizbullah sebagai sebuah ancaman.

Dalam memahami proses sekuritisasi GCC terhadap Hizbullah, kiranya penulis perlu untuk kembali mereview sekilas terkait eksistensi Hizbullah yang selama satu dekade belakangan (khususnya pasca fenomena *Arab Spring*) semakin meluaskan ruang lingkup resistensinya, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada isu Palestina, hingga merambah pada isu *counter-terrorism*. Kilas balik tersebut dirasa perlu, karena dalam menjelaskan proses penetapan status teroris yang dilakukan Arab Saudi dan beberapa negara Arab Teluk terhadap Hizbullah memiliki relasi yang erat dengan rekam jejak Hizbullah selama beberapa tahun terakhir.

Rekam jejak Hizbullah pada pembahasan sebelumnya akan diartikulasikan kembali pada bab ini untuk kemudian dinilai melalui perspektif GCC yang memandang *track record* Hizbullah tersebut sebagai ancaman bagi eksistensi negara anggota GCC secara keseluruhan. Lebih spesifiknya, eksistensi Hizbullah di beberapa negara di Timur Tengah (Suriah, Irak, Yaman, Bahrain) yang pada pembahasan sebelumnya dinilai positif, lantas kemudian dianggap dan dikonstruksikan sebagai ancaman oleh GCC. Anggapan serta konstruksi tersebut sekaligus menjadi alasan yang melatarbelakangi munculnya agenda keamanan yang diterapkan oleh GCC terhadap Hizbullah. Oleh karena itu, penjelasan kilas

balik Hizbullah yang dianggap sebagai ancaman (*existential threat*) menjadi penting untuk dibahas sebelum kemudian menelaah lebih dalam proses sekuritisasi dan agenda keamanan yang dilakukan GCC.

4.1 Hizbullah: sebuah *Existential Threat* bagi *Gulf Cooperation Council*

Sejak pertama kali didirikan, Hizbullah dikenal sebagai kelompok perlawanan Lebanon yang melandasi prinsip perjuangannya untuk melawan eksistensi Israel dan Amerika Serikat di teritori Lebanon. Posisi Hizbullah beserta segala pencapaian yang telah diraih juga tidak dapat dipisahkan dari asistensi Iran dan Suriah yang selama ini memberikan *support* logistik maupun politik. Ketiga pihak tersebut merupakan '*brother in arms*' yang tergabung dalam poros perlawanan terhadap Israel. Menurut perspektif ketiga pihak tersebut, isu Palestina menempati urgensi tinggi yang harus mendapatkan prioritas serta skala penanganan yang signifikan. Berkaitan dengan prinsip perjuangan, secara umum poros perlawanan tersebut menganggap bahwa eksistensi Israel di tanah Palestina merupakan wujud penindasan bagi bangsa Arab dan umat Islam. Oleh karena itu, dalam perspektif *axis of resistance*, Israel merupakan sebuah entitas yang wajib untuk ditumpas.

Hizbullah yang didirikan pada tahun 1980an ini merupakan salah satu komponen penting dalam *axis of resistance* dalam fungsinya melawan Israel. Terbukti dalam beberapa kali kesempatan Hizbullah berhasil memukul mundur invasi Israel atas teritori Lebanon. Walaupun telah berhasil memaksa Israel angkat kaki dari wilayah Lebanon, Hizbullah bertekad untuk tetap melancarkan perlawanan terhadap entitas negara Zionis yang diwujudkan dengan mendukung kelompok perlawanan Palestina. Salah satu momen penting konfrontasi Hizbullah terhadap Israel yakni pertempuran di pertengahan tahun 2006. Pertempuran yang terjadi pada musim panas tersebut merupakan titik awal bagi Hizbullah untuk menunjukkan kepada publik dunia akan keberhasilan kelompok tersebut melawan superioritas Israel. Walaupun kedua pihak mendapatkan kerugian materiil yang cukup serius, Hizbullah mengklaim pertempuran tersebut sebagai kemenangan *muqawamah* atas Israel. Tidak berhenti disana, dampak pertempuran yang

menimpa infrastruktur masyarakat Lebanon pun menjadi tanggung jawab Hizbullah. Melalui lembaga sosial yang dimilikinya, Hizbullah memberikan kontribusi yang besar dalam upaya merekonstruksi infrastruktur sosial milik masyarakat Lebanon. Pertempuran tersebut sekaligus memberikan popularitas bagi Hizbullah sebagai simbol perlawanan bangsa Arab yang beberapa dekade sebelumnya tidak mampu menumbangkan negara Zionis dalam beberapa seri perang Arab-Israel.

Berkat popularitas yang didapatkannya, tidak mengherankan apabila Hizbullah mendapatkan kepercayaan publik dan pengaruh dalam politik pemerintahan Lebanon. Disaat yang sama ketika Hizbullah mendapatkan popularitas sebagai simbol kebanggaan bangsa Arab, juga terdapat beberapa pihak yang mengecam popularitas tersebut. Arab Saudi beserta beberapa negara semenanjung Arab termasuk Jordania dan Mesir melontarkan kecaman kepada Hizbullah dengan anggapan bahwa tindakan organisasi tersebut melawan Israel pada pertempuran Juli 2006 merupakan bentuk destabilisasi keamanan dikawasan Timur Tengah. Dalam sebuah pertemuan darurat yang digelar di Kairo, beberapa negara anggota Liga Arab khususnya Arab Saudi, Jordania, dan Mesir sebagai tuan rumah pertemuan tersebut menganggap konfrontasi Hizbullah terhadap Israel sebagai “*unexpected, inappropriate and irresponsible acts*” (tindakan yang tidak disangka-sangka, tidak pantas, dan tidak bertanggung jawab) (Hassan M. Fattah, 2006). Kecaman terhadap aksi Hizbullah tersebut lantas diperjelas oleh Menteri luar negeri Arab Saudi yang kala itu dijabat oleh Pangeran Saud al-Faisal, mengatakan “*These acts will pull the whole region back to years ago, and we cannot simply accept them* (Hassan M. Fattah, 2006).”

Kerajaan Arab Saudi memandang bahwa perlawanan terhadap Israel seharusnya dilakukan oleh kelompok perlawanan yang memiliki legitimitas yang kredibel dan mendapatkan persetujuan dari negara-negara Arab lainnya, bukan justru dilakukan oleh elemen *intra-state* beserta “pihak-pihak” dibalik penyerangan tersebut tanpa otoritas pemerintahan pusat negara mereka serta izin koordinasi dengan negara Arab yang lantas menciptakan situasi keamanan

kawasan menjadi semakin genting. Pihak kerajaan juga menegaskan untuk tidak mengambil sikap terhadap dampak pertempuran yang menimpa penduduk di Lebanon dan membiarkan tanggung jawab tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat atas krisis keamanan yang telah mereka perbuat (Saudi Press Agency, 2006). Kecaman beberapa negara Arab tersebut juga dipengaruhi pertimbangan akan posisi Iran dibalik keberhasilan Hizbullah. Pengaruh Iran yang kala itu semakin signifikan di kawasan Timur Tengah merupakan ancaman serius bagi negara-negara Arab. Sehingga bagi negara-negara Arab, popularitas yang didapatkan Hizbullah juga diartikulasikan sebagai ekspansi pengaruh Iran di kawasan.

Popularitas dan pengaruh Hizbullah di pemerintahan Lebanon itu pula yang kemudian juga melatarbelakangi pemerintah Arab Saudi untuk menarik bantuan finansial membatalkan bantuan finansial (alutsista militer) senilai 4 miliar dolar kepada pemerintah Lebanon di tahun 2016. Belakangan diketahui bahwa pihak kerajaan Arab Saudi mengklarifikasi pembatalan bantuan tersebut karena Riyadh tidak menginginkan bantuan yang diberikan kepada pemerintah Lebanon jatuh ke tangan Hizbullah yang semakin mendominasi pemerintahan di Beirut. Seperti yang dikatakan oleh menteri luar negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menjelaskan : *“We didn’t stop the contract, it’s just going to Saudi Arabia, not to Hezbollah. We have a situation where Lebanon’s decisions have been hijacked by Hezbollah (Kechichian, 2016).”*

Pemerintah kerajaan Arab Saudi menganggap bahwa bantuan yang akan diberikan kepada pemerintah Lebanon tersebut berpotensi mengalami penyalahgunaan dan dikhawatirkan akan jatuh kepada pihak Hizbullah. Keputusan yang agak lamban tersebut memiliki kaitan dengan situasi politik pemerintahan Lebanon yang semakin memihak kepada posisi Hizbullah. Pengaruh Arab Saudi yang semakin memudar dalam iklim kontestasi politik di Lebanon, memaksa Riyadh untuk mengambil langkah strategis untuk mengisolasi eksistensi Hizbullah di Beirut. Alasan dibalik pembatalan bantuan finansial

kepada pemerintah Lebanon tersebut juga berkaitan dengan keterlibatan Hizbullah di konflik Suriah.

Seiring dengan terjadinya fenomena *Arab Spring* yang menyapu negara-negara di Timur Tengah, membuat regional tersebut terjebak kedalam pusaran krisis politik. Dengan dalih tuntutan untuk menggulingkan penguasa otoriter, krisis politik yang menimpa negara-negara Arab tersebut beberapa diantaranya berujung pada konflik bersenjata dan rangkaian pemberontakan. Konflik politik yang terjadi di dunia arab tersebut kemudian menuntun Hizbullah untuk juga terlibat dalam kemelut *Arab Spring*. Momen krusial yang memaksa Hizbullah untuk terjun ke dalam kemelut konflik politik tersebut yakni ketika gelombang *Arab Spring* masuk ke Damaskus. Krisis politik yang terjadi di Suriah untuk menuntut lengsernya presiden Bashar al-Assad berujung pada pemberontakan dan konflik bersenjata.

Konflik yang awalnya hanya melibatkan pihak pemerintah Suriah berhadapan dengan oposisi bersenjata, lambat laun juga menarik aktor-aktor diluar Suriah untuk turut mengintervensi konflik politik tersebut. Sedari awal terjadi konflik bersenjata, Suriah merupakan arena *proxy war* bagi negara-negara di Timur Tengah. Pada satu sisi, pemerintah Suriah dibantu oleh Iran dan Rusia beserta elemen *non-state actor* lainnya, sedangkan pada sisi lainnya, kekuatan oposisi didukung oleh negara Arab Teluk (Arab Saudi & Qatar), Turki dan Amerika Serikat. Dukungan berupa logistik dan persenjataan dari Arab Saudi dan Amerika Serikat disinyalir juga mengalir kepada fraksi kelompok teroris Al-Qaeda (Jabhat al-Nusrah) yang sama terlibat dalam konflik Suriah menuntut rezim Assad dilengserkan.

Adanya agenda asing didalam upaya penggulingan Assad serta keterlibatan teroris Al-Qaeda pada barisan elemen pemberontak Suriah, membuat Hizbullah menformulasikan kebijakan yang pada akhirnya juga melibatkan organisasi tersebut kedalam konflik Suriah mendukung presiden Assad, aliansinya dalam *Axis of Resistance*. Keterlibatan Hizbullah di Suriah secara resmi menyatakan keterlibatannya pada konflik Suriah di awal tahun 2013 dalam

pertempuran al-Qusayr (perbatasan Lebanon-Suriah). Sejak masuknya Hizbullah dalam konflik Suriah, kelompok ini berhasil merebut kembali sebagian besar teritori penting wilayah pemerintah dari tangan pemberontak dan teroris Al-Qaeda. Terlibatnya Hizbullah dalam konflik Suriah merupakan bentuk pergeseran area operasional kelompok tersebut yang awalnya hanya terbatas pada ruang lingkup Lebanon dan isu Palestina, kini menjadi *non-state actor* yang diperhitungkan pada kawasan Timur Tengah dan sekaligus membuktikan respon Hizbullah terhadap isu terorisme.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menuntut urgensi keterlibatan Hizbullah dalam konflik di Suriah. Pertama yakni alasan geopolitik, dimana Hizbullah harus memastikan keberlangsungan pemerintah Bashar al-Assad dengan memberikan asistensi militer kepada pihak Damaskus. Keberlangsungan pemerintah Bashar al-Assad menempati *top priority* bagi Hizbullah, karena bagaimanapun teritorial Suriah merupakan akses sentral bagi jalur logistik dan gudang penyimpanan persenjataan Hizbullah yang selama ini dikirim oleh Iran sebelum menuju ke Lebanon. Dengan kondisi jalur logistik yang sebelumnya dikuasai oleh para pemberontak, tentu akan mempengaruhi kapabilitas militer Hizbullah tanpa adanya asistensi finansial dan persenjataan yang dikirim dari Teheran. Oleh karena itu, jalur penghubung dan komunikasi antara Teheran, Damaskus dan Beirut harus dibersihkan dari intervensi pemberontak. Selanjutnya yakni masih berkaitan dengan alasan geopolitik dan keberlangsungan Assad, bahwa apabila Assad berhasil dijatuhkan dan pemerintah Suriah jatuh ketangan pihak pemberontak, maka pemerintahan baru yang cenderung anti terhadap eksistensi *Axis of Resistance* tentu akan menempatkan Iran dan Hizbullah dalam posisi yang sulit.

Disamping aspek geopolitik, juga terdapat legitimasi teologis yang meningkatkan urgensi keterlibatan Hizbullah di medan konflik Suriah. Salah satu hal yang menjadi legitimasi kehadiran Hizbullah di Suriah adalah keberadaan makam Sayyidah Zainab. Makam tersebut merupakan *symbol of struggle* (simbol perjuangan) bagi para milisi Syiah untuk masuk kedalam konflik di Suriah demi melindungi makam tersebut dari ancaman penghancuran oleh para fraksi teroris

Al-Qaeda. Pasalnya, oposisi bersenjata Suriah yang didominasi oleh teroris Al-Qaeda tersebut memiliki ideologi takfiri.

Menurut pemahaman para takfiri, ideologi ini berkeyakinan bahwa eksistensi makam Sayyidah Zainab yang kerap dijadikan sebagai situs ziarah umat Islam tersebut merupakan bentuk upaya menyekutukan tuhan. Sebaliknya, bagi para penganut Islam Syiah, situs makam Sayyidah Zainab memiliki esensi historis keagamaan yang cukup mendalam. Praktisnya, bagi para jihadis Al-Qaeda, upaya untuk menghancurkan situs makam seperti makam Sayyidah Zainab sekaligus merupakan simbol upaya pelurusan akidah terhadap penganut Islam Syiah yang mereka anggap telah keluar dari pemahaman agama Islam. Wacana penghancuran situs bersejarah dan makam suci bagi Al-Qaeda bukanlah sesuatu yang baru, kelompok ini telah melakukan serangkaian teror, pengrusakan dan penjarahan situs-situs bersejarah diberbagai tempat sebagaimana teror bom di Samarra Irak tahun 2006 yang ditujukan kepada makam Imam Hasan al-Askari (Worth, 2006). Maka dari itu, legitimasi teologis bagi Hizbullah untuk melakukan intervensi ke dalam konflik Suriah demi melindungi makam Sayyidah Zainab menempati urgensi yang serius.

Terlepas dari alasan geopolitik maupun legitimasi teologis, yang perlu digaris bawahi pada konteks keterlibatan Hizbullah di Suriah yakni terkait komitmen organisasi tersebut dalam merespon isu terorisme. Eksistensi Hizbullah dalam konflik Suriah sekaligus mematahkan tudingan label teroris yang selama ini dilayangkan kepadanya. Bagaimana tidak, Hizbullah memiliki kontribusi nyata dalam melawan kelompok teroris sekelas Al-Qaeda di Suriah. Kontribusi tersebut dibuktikan dengan kemenangan Hizbullah atas fraksi gabungan Al-Qaeda pada beberapa front pertempuran di Suriah.

Masih terkait isu *counter-terrorism*, komitmen Hizbullah dalam merespon terorisme juga ditunjukkan dengan keberadaan kelompok tersebut di Irak. Agak berbeda dengan di Suriah, keterlibatan Hizbullah di Irak hanya meliputi pelatihan milisi lokal untuk melawan ISIS. Dengan berkolaborasi bersama Iran, pelatihan yang diberikan kepada sekitar 50an kelompok milisi Irak tersebut diistilahkan dengan '*Hezbollahzation*' (Smyth, 2015). Milisi Irak yang kemudian disebut

sebagai ‘duplikat’ Hizbullah tersebut terlibat dalam upaya penumpasan terhadap ISIS yang mengancam keamanan Irak. Hingga pada Juli 2017, keberadaan kelompok ISIS yang mengancam dunia internasional tersebut berhasil sepenuhnya diusir dari Irak (Cockburn, 2017). Tentu pencapaian milisi Irak tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya ‘*Hezbollahization*’ sebagai bentuk respon terhadap isu terorisme dunia.

Terlepas dari prestasi tersebut, capaian dan komitmen Hizbullah dalam merespon isu terorisme di medan konflik Suriah maupun Irak sekali lagi mengundang kecaman dari pihak negara Arab Teluk. Kali ini melalui organisasi regional *Gulf Cooperation Country* (GCC), para negara semenanjung Arab tersebut justru menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Justifikasi tersebut disampaikan oleh sekretaris jenderal GCC Abdullatif al-Zayani yang mengatakan :

“Hezbollah recruits youths of the GCC countries to carry out terrorist acts, smuggles arms, incites sedition and provokes chaos and violence in a blatant violation of GCC states sovereignty, security and independence (al-Jazeera, 2016), their terrorist acts and incitement in Syria, Yemen and in Iraq were threatening wider regional security (Sikimic, 2016).”

Negara semenanjung Arab yang tergabung dalam GCC memandang bahwa keterlibatan Hizbullah di Suriah dan Irak justru merupakan bentuk tindakan yang mengacaukan stabilitas keamanan regional Timur Tengah. Khususnya dalam konteks konflik Suriah, komitmen Hizbullah untuk mendukung presiden Suriah merupakan penghalang bagi manuver geopolitik negara-negara semenanjung Arab (Khususnya Arab Saudi & Qatar) yang berniat menggulingkan pemerintah Assad melalui strategi *proxy war*. Sebenarnya, benang merah konfrontasi antara pihak kerajaan Arab Saudi dengan rezim Assad dapat ditelusuri sejak terjadinya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri di tahun 2005 (Saudi menuduh bahwa Suriah dibalik pembunuhan Hariri) dan perang Lebanon tahun 2006. Dengan pecahnya perang sipil di Suriah, Arab Saudi kembali melihat adanya kesempatan untuk melumpuhkan soliditas *axis of resistance*. Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengatakan “*Syria is Iran’s entry*

into the Arab world, take down al-Assad and you inflict a strategic blow on Iran (Sullivan, 2012).”

Walaupun pihak kerajaan telah melancarkan bermacam strategi untuk mengisolasi *Axis of Resistance*, Fakta di lapangan berkata lain, Hizbullah berhasil menetralsir kelompok oposisi bersenjata dukungan Arab Saudi dan Qatar yang berupaya melengserkan pemerintah Suriah. Kekalahan oposisi bersenjata (diantaranya fraksi Al-Qaeda) pemerintah Suriah tersebut juga berarti ancaman geopolitik bagi Arab Saudi, Karena bagaimanapun keunggulan Hizbullah atas kelompok oposisi merupakan bentuk superioritas *Axis of Resistance* (lebih spesifik merujuk kepada Iran) di regional Timur Tengah.

Disamping isu geopolitik, Aktifitas Hizbullah yang semakin signifikan dalam perkembangan geopolitik Timur Tengah juga diterjemahkan oleh Arab Saudi sebagai ancaman sektarian, yakni tensi antara Sunni dan Syiah. Eskalasi konflik Suriah yang berawal dari krisis politik hingga menjadi perang sipil pada perkembangannya juga memicu munculnya isu sektarian. Dalam konteks ini, rivalitas, aliansi, serta konflik bersenjata di Suriah secara signifikan digambarkan dalam koridor bernuansa sektarian. Walaupun isu sektarian telah muncul sebagai fenomena regional sejak revolusi Islam Iran 1979, namun jika boleh kita *flash back*, identitas sektarian kembali menempati posisi yang dominan di Timur Tengah pasca invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 yang ditunjukkan dalam nuansa konflik horizontal di Baghdad (Abdo, 2016:145). Hingga terjadi konflik di Suriah, isu sektarian tersebut juga menjadi diskursus yang kerap kali mewarnai dinamika konflik antar pihak yang terlibat.

Memang, muncul perdebatan diantara para ahli terkait relevansi isu sektarian dengan konflik yang terjadi pada regional Timur Tengah. Dalam menjelaskan fenomena tersebut, terdapat dua pendekatan yang oleh para ahli dianggap dapat menganalisa kompleksitas konflik sektarian di regional Timur Tengah, yakni pendekatan primordialis dan instrumentalis. Pendekatan primordialis memandang bahwa konflik bertajuk perbedaan identitas sektarian antara Sunni dan Syiah yang mendominasi kawasan Timur Tengah, telah muncul sejak abad ketujuh masehi silam melalui rangkaian fenomena historis dan masih

memiliki pengaruh yang signifikan pada dinamika politik dan konflik di era kontemporer saat ini (Darwich and Fakhoury, 2017).

Berbeda dengan pendekatan primordialis yang menekankan pada kultur dan identitas sebagai pemicu terjadinya konflik, pendekatan instrumentalis menekankan pada unsur-unsur rasional dan struktural sebagai penyebab. Dari perspektif instrumentalis, konflik Sunni-Syiah yang terjadi di regional Timur Tengah merupakan alat (*instrument*) yang sengaja dimunculkan oleh para penguasa untuk meraih kepentingan politik (Darwich and Fakhoury, 2017). Dapat dikatakan bahwa para aktor dalam regional Timur Tengah menggunakan diskursus sektarian sebagai dalih legitimasi bagi posisi mereka dalam merespon konstelasi geopolitik di kawasan.

Begitupula dalam konteks hubungan antara fenomena penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh GCC, penulis berpandangan bahwa pendekatan instrumentalis memiliki relevansi yang cukup signifikan dalam menjelaskan proses justifikasi teroris tersebut dengan menggunakan isu sektarian. Dengan menggunakan instrumen sektarian, GCC yang dimotori oleh Arab Saudi berupaya menggambarkan Hizbullah sebagai sebuah ancaman ideologi bagi negara anggotanya. Eksistensi Arab Saudi sebagai *regional power* di Semenanjung Arab membuat posisinya diperhitungkan dalam institusi regional GCC. Posisi itu pula yang memberikan kerajaan tersebut keleluasaan untuk mengeksploitasi isu sektarian dalam upaya melegitimasi kepentingannya. Riyadh sejak lama telah menggunakan isu sektarian sebagai instrumen untuk melegitimasi kebijakan luar negerinya di kawasan. Penggunaan isu tersebut bertujuan untuk menciptakan perpecahan serta sentimen antara kelompok Sunni dan Syiah yang bertujuan demi menggalang dukungan aliansi negara Arab lainnya dalam menghadapi Iran beserta *proxy* yang dimilikinya (Salloukh, 2017b:39).

Segera setelah pecahnya konflik politik di Suriah, raja Abdullah mengecam rezim Assad untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga negaranya sendiri. Walaupun pada awalnya menggunakan tajuk ‘menghentikan kekerasan’ yang dilakukan pemerintah Suriah untuk membentuk opini publik demi melancarkan agenda melengserkan rezim Assad, pihak kerajaan juga

menyisipkan nada sektarian demi mendapatkan dukungan yang lebih luas untuk melancarkan manuvernya di Damaskus (Darwich and Fakhoury, 2017). Melalui media milik pemerintah kerajaan, Arab Saudi mengkonstruksi rezim Assad adalah representasi kelompok Syiah yang melakukan tindakan penindasan terhadap kelompok Sunni (Darwich and Fakhoury, 2017). Konstruksi tersebut berhasil membentuk opini bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rezim ‘Syiah’ Bashar al-Assad merupakan ancaman (*existential threat*) bagi komunitas Sunni di dunia Arab. Akibatnya, konflik politik Suriah yang kompleks lantas kemudian direduksi menjadi sebuah konflik sektarian sehingga komunitas Sunni baik dalam lingkup regional maupun global percaya bahwa mereka sedang menghadapi sebuah ancaman yang ditimbulkan oleh entitas Syiah (*Shia Threat*).

Konflik di Suriah merefleksikan sebuah propaganda negara-negara Arab yang menggambarkan bahwa terdapat ancaman ideologi Syiah dan agenda politik yang dihimpun oleh Iran dan Hizbullah yang bertujuan untuk melebarkan pengaruh ideologinya di kawasan Timur Tengah (Abdo, 2016:62). Sebagaimana yang dikatakan oleh raja Abdullah dari Jordania, bahwa eksistensi *axis of resistance* tersebut sejatinya merupakan ekspansi pengaruh Teheran beserta aliansi Syiahnya terhadap negara-negara Arab. Ekspansi pengaruh yang hendak dilakukan Iran beserta poros aliannya yang membentang dari Teheran hingga perbatasan Israel tersebut lantas diistilahkan oleh raja Abdullah Jordania dengan sebutan “*The Shia Crescent*” (Bulan Sabit Syiah) (Salloukh, 2017b:172). Walaupun istilah tersebut telah digumamkan jauh sebelum terjadinya *Arab Spring*, namun dampak politis dari istilah ini masih berguna untuk digunakan sebagai instrumen politik yang menimbulkan efek kekhawatiran bagi masyarakat Timur Tengah terhadap eksistensi Iran beserta poros aliansi yang dibentuknya. Narasi klise tersebut sengaja diciptakan untuk memberikan pemahaman bahwasanya poros bulan sabit yang berhulu di Teheran tengah melakukan ekspansi geopolitik dan supremasi ideologi Syiah di kawasan. Sebagai konsekuensinya, eksistensi dan keterlibatan Hizbullah di Suriah yang semula bertujuan untuk merespon isu terorisme dan menjamin keberlangsungan rezim

Assad kemudian dipersepsikan sebagai sebuah ancaman geopolitik serta ideologis bagi GCC.

Arab Saudi dengan leluasa menggunakan institusi media yang dimilikinya, seperti *channel* televisi *al-Arabiya* maupun media cetak seperti koran *al-Hayat* dan *al-Sharq al-Awsat* untuk mendemonstrasi konflik dengan menggunakan narasi yang condong memberikan dukungan kepada pihak oposisi bersenjata pemerintah Suriah (Darwich and Fakhoury, 2017). Media kerajaan tersebut menggambarkan seolah para oposisi bersenjata sebagai korban kekerasan dan pembantaian yang dilakukan oleh pihak pro-pemerintah Suriah sembari mentolerir kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para *proxy* kelompok teroris dukungan mereka sendiri (Darwich and Fakhoury, 2017). Disamping menggunakan media pemerintah, sosok figur pemuka agama yang mewakili ideologi resmi (Wahabi) kerajaan Arab Saudi juga memiliki peran yang krusial dalam memobilisasi dukungan masyarakat (Al-Rasheed, 2017:152).

Melalui fatwa anti-Syiah yang mereka posting melalui media sosial, pengaruh figur pemuka agama dalam mengkonstruksi pesan anti-Syiah tersebut menimbulkan reaksi bukan hanya dalam lingkup internal Arab Saudi saja, namun hingga lintas batas negara (Abdo, 2016:68). Pesan yang mereka sampaikan memiliki tujuan utama yakni meyakinkan kepada publik sebuah justifikasi bahwasanya ideologi Syiah ‘bukan Islam’ (kafir) dan menyebut mereka dengan sebutan “*Rafidah*” (Abdo, 2016:69). Sebutan dengan menggunakan istilah-istilah khusus tersebut merupakan bentuk dari propaganda sektarian untuk melegitimasi agenda politik tertentu. Tidak luput dari propaganda sektarian Arab Saudi, penyebutan nama Hizbullah pun juga terkadang dimunculkan oleh para pemuka agama melalui *slang words* (pelesetan) dengan menyebut kelompok tersebut sebagai *Hizb al-Shaytan* (partai setan) (Abdo, 2016:69).

Sebagai contoh yakni Syaikh Muhammad al-Arifi, seorang tokoh agama di Arab Saudi ini seringkali melontarkan retorika permusuhan terhadap Hizbullah. Melalui akun media sosial *Tweeter*, ia mencoba untuk meyakinkan publik bahwa Hizbullah tengah berupaya untuk mengambil alih dunia Sunni. Berulangkali tokoh ini mencoba mengaitkan kepentingan geopolitik Iran dengan dunia Syiah secara

general dan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebagaimana postingan *Twitter* yang dia unggah pada 5 & 6 Juni 2013, al-Arifi mengatakan :

“After the victory of the Safavid order in Syria, God forbid, Iran will fight to occupy the Gulf. They see us as Kuffar.” “The relationship between Hezbollah and Khomeini is one of body soul, and the party has used it to spread Shi’ism in the Arab world (Abdo, 2016:71).”

Dengan jutaan *Twitter followers* (pengikut) yang dimiliki *public figure* sekelas al-Arifi, tentu unggahan tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mempersepsikan Hizbullah dan Iran sebagai ancaman ideologi maupun geopolitik kepada publik dunia. Langkah ini juga dilakukan ketika koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi tengah menginvasi Yaman pada musim panas 2015 untuk menargetkan milisi Ansarullah/Houthi, melalui akun media sosial yang sama, al-Arifi beserta tokoh Salafi Wahabi lainnya memberikan dukungan serta pelegalan atas invasi yang dilakukan Arab Saudi melalui fatwa media sosial yang mereka unggah. Walaupun sebenarnya mufti besar Arab Saudi Syaikh Abdul Aziz al-Sheikh telah memberikan fatwa pelarangan atas penggunaan *Twitter* dan menyebutnya sebagai media penyebar pesan *hoax*, namun tetap saja banyak dari kalangan tokoh agama terkemuka di Arab Saudi menggunakan media ini sebagai instrumen untuk menyebarkan luaskan pandangan mereka (Abdo, 2016:76).

Tidak kalah berpengaruh dengan al-Arifi, Syaikh Adnan al-Rour juga merupakan salah satu tokoh agama kerajaan Arab Saudi yang eksis dalam menyuarakan jihad melawan pemerintah Suriah dan para milisi Syiah pro-rezim. Al-Rour memainkan peran ganda dalam upaya tersebut aktivisme jihad tersebut. Selain untuk memberikan fatwa untuk mendorong jihad di Suriah sebagaimana yang dilakukan oleh al-Arifi, al-Rour juga memberikan dukungan material bagi oposisi Suriah. Dengan menggunakan pengaruhnya, ia mengorganisir tokoh agama lainnya, *endorsement* program televisi keagamaan dan para donatur untuk menggalang dana melalui institusi pendanaan *al-Salam Group* miliknya yang menghimpun bantuan logistik serta transfer finansial secara *online* untuk kemudian dikirimkan kepada oposisi bersenjata Suriah (Abdo, 2016:77).

Melalui saluran satelit televisi dari Arab Saudi, Adnan al-Rour melakukan *broadcasting* (siaran) untuk melancarkan kampanye anti-Iran dan Hizbullah. Penggunaan satelit televisi ini sangat efektif disamping media sosial juga merupakan instrumen tetap dalam upaya mengkonstruksi *shared understanding* kepada publik dunia. Al-Rour menggunakan media tersebut untuk mendiskreditkan Hizbullah atas intervensi yang dilakukannya pada beberapa negara Arab khususnya Suriah. Bahkan secara gamblang, Adnan al-Rour melalui siaran televisi tersebut melayangkan kecaman kepada Hasan Nasrallah dengan mengatakan :

“The Syrian people no longer respect you because of your support of the Syrian regime that is based on sectarian interest only. Your stance from the Syrian uprising is sectarian. Your... Support for Bahraini uprising is without a doubt sectarian. Your stance from the Syrian uprising is you are siding with the regime against the Syrian people. Why? Because you... only abide by Iran’s demands (Abdo, 2016). “I swear to God we will make you pay Hassan Nasrallah..!!, I Swear by God we will make you pay (Al-Mayadeen, 2016).”

Kampanye sektarian tersebut berkontribusi besar dalam membentuk persepsi publik bahwa para oposisi bersenjata yang mereka sebut sebagai ‘mujahidin’ Sunni tengah menjadi korban kebrutalan militer Suriah yang dibantu oleh Iran dan Hizbullah. Propaganda itulah yang kemudian memobilisasi dukungan dana maupun logistik persenjataan baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah kepada para fraksi oposisi bersenjata. Instrumen sektarian tersebut juga berhasil mendorong semangat para jihadis dari seluruh dunia untuk masuk kedalam konflik bersenjata di Suriah. Posisi rezim Assad beserta poros perlawanan (Iran & Hizbullah) yang awalnya hanya sebagai rival geopolitik kini bergeser menjadi ancaman yang membahayakan oposisi Sunni di Suriah. Berdasarkan skenario diatas, kerajaan Arab Saudi beserta Qatar memiliki alasan yang legal untuk dapat terlibat aktif dalam konflik Suriah dengan memberikan dukungan logistik persenjataan maupun instruksi militer kepada kelompok oposisi bersenjata (Salloukh, 2017c:47).

Skenario serupa juga digunakan oleh rezim al-Khalifa di Bahrain untuk menjustifikasi Hizbullah sebagai ancaman pemerintah. Disamping menggunakan

narasi sektarian, rezim Bahrain mengklaim adanya sebuah pelatihan kepada kelompok oposisi (*al-Wefaq*) oleh Hizbullah yang ditujukan untuk upaya makar terhadap pihak pemerintah. Walaupun belum dapat di buktikan secara kongkrit, namun pemerintah Bahrain yakin bahwa terdapat campur tangan Hizbullah yang memberikan pelatihan kepada para pemuda kelompok oposisi yang berjuang melawan otoritas kerajaan. Dengan ramainya tudingan negara-negara Arab terhadap Iran yang tengah memanfaatkan gelombang *Arab Spring* untuk kepentingan geopolitikanya, pihak kerajaan Bahrain juga menuduh bahwasanya keterlibatan Hizbullah tersebut merupakan instruksi dari Teheran yang tengah memainkan manuvernya dalam krisis politik di Bahrain (Abdo, 2016:127) Dalam pidatonya didepan pasukan keamanan milik GCC (*Peninsula Shield Force*), raja Hamad al-Khalifa mengatakan : “*An external plot has been fomented for 20 to 30 years for the ground to be ripe for subversive design. I here announce the failure of the fomented subversive plot* (Matthiesen, 2013:50).”

Walaupun hanya menggunakan redaksi “*external plot*”, namun jelas difahami bahwa dalam konteks ini merujuk pada eksistensi Iran dan Hizbullah. Menurut beberapa sumber referensi, tuduhan tersebut dilimpahkan kepada Hizbullah karena terdapat fakta lapangan yang membuktikan adanya keterlibatan kelompok resistansi Lebanon tersebut di pihak oposisi. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Toby Matthiesen pada bab sebelumnya, bahwa memang terdapat segelintir individu yang menyatakan identitasnya sebagai Hizbullah. Selain itu, dalam demonstrasi yang dilakukan oposisi di Bahrain tersebut, terdapat simbol dan aksesoris (bendera) Hizbullah yang digunakan oleh para demonstran dalam aksi protes yang mereka lakukan (Byman, 2014). Fakta-fakta lapangan tersebut menimbulkan perdebatan terkait benar tidaknya keterlibatan Hizbullah di Bahrain atau hanya sekedar motif demonstran yang terinspirasi oleh *spirit* resistansi Hizbullah terhadap penindasan. Diterima atau tidak, berkat prestasi yang diperolehnya, Hizbullah merupakan representasi sebuah elemen non-pemerintah yang cukup tenar sebagai simbol perlawanan (khususnya komunitas Syiah Arab) di Timur Tengah. Bagaimanapun apology yang ditawarkan, nama Hizbullah tetap

merupakan sebuah ancaman bagi rezim Arab teluk lantaran afiliasinya dengan Iran yang merupakan ancaman geopolitik mereka di kawasan.

Senada dengan rezim al-Khalifa di Bahrain, rezim al-Saud pun juga melontarkan tuduhan keterlibatan Hizbullah pada konflik Yaman. Sembari mengabaikan *track record* keterlibatan bidak-bidak *proxy*-nya sendiri yang berupaya mewujudkan kepentingan regional Riyadh di Suriah dan Lebanon, Arab Saudi mengklaim bahwa Iran berada di balik kelompok Ansarullah/Houthi di Yaman. Spesifiknya, Arab Saudi menuduh Iran melalui Hizbullah tengah mengirimkan penasehat militer dan sejumlah logistik persenjataan untuk membantu kelompok Houthi dalam menghadapi *proxy* lokal milik Riyadh serta melatih kantung-kantung perlawanan di beberapa negara Arab Teluk (Salloukh, 2017a:231). Progresifitas kelompok Houthi dalam menguasai medan strategis di Yaman merupakan ancaman bagi posisi Arab Saudi. Bagaimana tidak, apabila Sana'a jatuh ke tangan kelompok yang pro-Teheran, maka teritori Yaman yang selama ini dinilai strategis secara geopolitik dan ekostrategis akan mengancam kedaulatan kerajaan Arab Saudi.

Dalam kasus ini cukup sulit untuk mengidentifikasi keterlibatan Hizbullah secara pasti. Berbeda dengan keterlibatan Hizbullah di Suriah dan Irak dimana terdapat pernyataan resmi akan keterlibatannya dalam konflik. Sejauh ini justifikasi akan posisi Hizbullah di Yaman hanya mengandalkan pernyataan dari Arab Saudi tanpa ada konfirmasi dari pihak muqawamah. Bukti kongkrit suportif Hizbullah terhadap kelompok Houthi di Yaman hanya ditunjukkan sebatas dukungan moril yang disampaikan melalui pidato-pidato Sekjen Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah. Substansi pidato tersebut memuat pesan persaudaraan antara Hizbullah dan rakyat Yaman serta slogan-slogan yang memojokkan rezim Saudi dengan mengatakan bahwa rakyat Yaman akan segera membenamkan rezim tersebut dalam setiap pertempuran (Maula TV, 2016). Walaupun memuat slogan anti-rezim Saudi, namun pidato-pidato tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan Hizbullah di Yaman. Betapapun terbatasnya indikasi keterlibatan Hizbullah di Yaman, namun Arab Saudi beserta negara-negara sponsor utama kampanye militer atas Yaman bersikeras bahwa Hizbullah serta

IRGC melakukan intervensi dalam upaya untuk membantu kelompok Houthi baik dalam instruksi/pelatihan militer maupun logistik persenjataan (Levitt, 2016).

Ulasan diatas merupakan penjelasan akan eksistensi Hizbullah yang selama ini difahami sebagai *hero* (pahlawan) berikut dengan rangkaian kontribusi positif yang selama ini diraih, namun dalam perspektif GCC eksistensi tersebut dikonstruksi sedemikian rupa sehingga Hizbullah dipersepsikan sebagai *villain* (penjahat). Konstruksi GCC terhadap Hizbullah memberikan organisasi tersebut sebuah landasan yang cukup kuat untuk mempersepsikan eksistensi muqawamah sebagai suatu ancaman. Sekaligus, konstruksi yang memposisikan Hizbullah sebagai sebuah ancaman (*existential threat*) di regional tersebut lebih jauh akan menjalani proses sekuritisasi sebelum nantinya muncul justifikasi final yang menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Pembahasan terkait proses sekuritisasi Hizbullah yang dilakukan oleh GCC akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

4.2 Sekuritisasi *Gulf Cooperation Council* terhadap Hizbullah

Upaya konstruksi terhadap suatu entitas lawan merupakan salah satu cara klasik dalam sebuah konflik politik. Hal tersebut bertujuan sebagai dasar alasan suatu pihak untuk melakukan tindakan kongkrit terhadap lawan mereka. Konstruksi tersebut dilakukan dengan membangun sebuah status negatif dan provokatif terhadap lawan, sehingga suatu pihak dapat melegalkan tindakan untuk mendestabilisasi posisi lawan mereka (Harb and Leenders, 2005). Salah satu bentuk konstruksi yang dilabelkan kepada entitas lawan di dunia kontemporer adalah status 'teroris'. Memberikan label kepada lawan dengan status teroris dapat memberikan keuntungan politik secara langsung, seperti merasionalisasi para negara penggagas untuk melakukan tindakan militeristik, menggalang dukungan dari pihak lain, dan memobilisasi suatu kebijakan (untuk menyudutkan lawan) serta mendeklarasikan lawan mereka sebagai ancaman global. Dalam konteks fenomena penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris, GCC menggunakan langkah yang serupa untuk menyingkirkan peran Hizbullah dari konstelasi politik Timur Tengah.

Dalam menjelaskan proses penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh GCC, penulis menggunakan teori sekuritisasi dalam menjelaskan proses kebijakan negara-negara Arab Teluk terhadap Hizbullah. Pada pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwasanya jauh sebelum penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris oleh GCC, hubungan diplomatik antara kelompok perlawanan Lebanon ini dengan negara-negara Arab diwarnai dengan tensi yang cukup panas. Rezim Arab Teluk memandang Hizbullah tidak lebih dari pemicu destabilitas keamanan dan kolaborator Iran di kawasan Timur Tengah. Berlanjut hingga era *Arab Spring*, eksistensi Hizbullah yang semakin di atas angin membuat rezim Arab Teluk untuk segera mengambil tindakan kongkrit dalam merespon progresifitas Hizbullah. Dari poin tersebut, Apabila kita mengacu pada asumsi dasar teori sekuritisasi, terdapat pergeseran urgensi penanganan politik dalam merespon Hizbullah, maka fenomena penetapan Hizbullah dalam organisasi teroris memiliki relevansi dengan diskursus keamanan milik *Copenhagen School*.

Asumsi tersebut sejalan dengan fakta bahwa sejak lama Hizbullah memang memiliki *track record* yang negatif dihadapan rezim Arab, khususnya bagi Arab Saudi dan Bahrain, namun kala itu para rezim Arab masih belum memiliki suara yang bulat sebagai sebuah entitas solid dengan mengatasnamakan institusi regional (GCC) dalam merespon eksistensi Hizbullah (Kechichian, 2016). Segera setelah peristiwa *Arab Spring* dan semakin memburuknya hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran, muncul keputusan dari negara-negara Arab melalui institusi regional GCC untuk menetapkan Hizbullah sebagai agenda keamanan regional. Fenomena tersebut memiliki relevansi dengan pendapat *Copenhagen School* yang mengatakan bahwa sekuritisasi adalah bentuk ekstrim dari politisasi. Relevansinya yakni, Hizbullah yang semula hanyalah isu keamanan privat dalam internal negara-negara Arab, setelah dipolitisasi oleh Arab Saudi kini menjadi agenda keamanan kolektif negara-negara Arab Teluk yang tergabung dalam institusi regional *Gulf Cooperation Council* (GCC).

4.2.1 Proses Sekuritisasi Hizbullah

Peran Hizbullah yang semakin aktif dalam papan catur geopolitik Timur Tengah sekaligus memposisikan organisasi tersebut sebagai isu keamanan bagi negara-negara Arab Teluk. Walaupun Hizbullah memiliki *track record* dan hubungan diplomatik yang buruk dengan beberapa negara anggota GCC, namun sejauh itu pula mereka belum berada dalam *frame* yang sama untuk menempatkan Hizbullah sebagai ancaman yang signifikan (Al-Hatlani, 2016). Hingga sampai terjadinya fenomena *Arab Spring*, keterlibatan Hizbullah dalam medan konflik Suriah untuk mendukung presiden Bashar al-Assad serta tuduhan adanya keikutsertaan organisasi tersebut dalam urusan internal negara-negara Arab, lantas menggeser urgensi Hizbullah yang semua hanya sebagai ancaman keamanan beberapa negara Arab Teluk kemudian menjadi ancaman stabilitas keamanan regional GCC secara keseluruhan.

Rezim Arab GCC pada akhirnya sampai pada satu *frame* pemikiran dalam merespon ancaman terorisme yang direfleksikan melalui langkah kongkrit melawan eksistensi Hizbullah. Secara sukarela atau tidak, negara-negara Arab GCC menyetujui 'konstruksi' terkait kemungkinan dampak yang nantinya akan ditimbulkan apabila urgensi penanganan isu terorisme tidak segera dilakukan. Hasilnya, dengan menggunakan kampanye merespon isu terorisme, proses sekuritisasi terhadap Hizbullah mulai dilakukan. Merujuk pada aspek sentral dalam proses sekuritisasi, *speech act* merupakan tahap yang penting dalam upaya mengkonstruksi sebuah isu. Pada 2 Maret 2016, dalam konferensi yang dilakukan oleh anggota GCC, Hizbullah dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan kedaulatan nasional negara-negara GCC. Dukungan Hizbullah terhadap pemerintah Suriah serta keterlibatannya dalam konflik di Suriah, Irak, dan Yaman juga menjadi pertimbangan pada forum konferensi tersebut. Dalam pidatonya, Sekjen GCC Abdullatif al-Zayani menegaskan:

The GCC made the decision due to "hostile actions of the militia who recruit the young people [of the Gulf] for terrorist acts" and "their terrorist acts and incitement in Syria, Yemen and in Iraq (Wilson, 2016). "Those activities within GCC member states and in Syria, Yemen and Iraq "are incompatible with the values and moral and

humanitarian principles and international law, and pose a threat to Arab national security (Schreck, 2016)."

Melalui pernyataan Sekjen GCC tersebut, negara Arab Teluk mencoba untuk mengkonstruksi Hizbullah sebagai ancaman keamanan bagi kawasan, khususnya menyangkut keterlibatan organisasi tersebut di beberapa konflik kawasan seperti Suriah, Irak dan Yaman serta tuduhan mengintervensi *internal affairs* negara-negara Arab Teluk. Untuk menguraikan pernyataan al-Zayani tersebut kedalam tahap *referent object* teori sekuritisasi, penulis perlu menganalisis statemen Sekjen GCC tersebut secara terperinci agar muncul titik temu antara tahap *speech act* dengan keseluruhan unit teori sekuritisasi. Uraian dari pernyataan al-Zayani tersebut dapat dijelaskan dengan mengaitkan kembali penjelasan tentang konstruksi negara-negara Arab Teluk terhadap Hizbullah, khususnya Arab Saudi sebagai *securitizing actor* utama.

Pernyataan al-Zayani mengatakan bahwa Hizbullah bertanggung jawab atas "tindakan permusuhan serta perekrutan atas anak muda di negara-negara Arab Teluk untuk melakukan aksi terorisme". Pernyataan tersebut sesuai dengan konstruksi Arab Saudi dan kemudian didukung oleh Bahrain yang menganggap bahwa Hizbullah telah melakukan pelatihan terhadap kelompok oposisi dan para anti-rezim di dalam negara Arab Teluk. Arab Saudi menganggap Hizbullah memiliki keterkaitan dengan jaringan/kelompok '*Hezbollah al-Hejaz*' yang dipercaya mendapatkan dukungan dari Iran dan memiliki catatan kriminal sebagai pelaku peledakan *Khobar Tower* pada tahun 1996. Disamping itu, Bahrain juga melayangkan tuduhan kepada Hizbullah sebagai '*external plot*' atas keterlibatan kelompok tersebut dalam pelatihan kelompok oposisi pemerintah Bahrain untuk menjatuhkan rezim al-Khalifa. Oposisi pemerintah yang dikenal *die hard* (pantang menyerah) ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan rezim al-Khalifa di Bahrain. Maka dari itu, menjadi logis apabila pemerintah Manama mencurigai adanya elemen asing semacam Hizbullah yang berupaya membantu kelompok oposisi untuk menjatuhkan eksistensinya.

Bagaimanapun, Jatuhnya klan al-Khalifa di Bahrain akan menimbulkan *spill over effect* yang juga akan mempengaruhi eksistensi pemerintahan negara Arab lainnya. Sehingga, muncul upaya untuk menetralsir ancaman tersebut, mulai dari menggunakan manuver sektarian, intervensi instrumen militer GCC (*Peninsula Shield Force*) di Bahrain, Hingga justifikasi teroris terhadap Hizbullah oleh GCC. Tuduhan Arab Saudi dan Bahrain tersebut sesuai dengan pernyataan Sekjen GCC yang mengatakan bahwa Hizbullah terlibat dalam mengorganisir anak-anak muda untuk melakukan tindakan teror dan menyulut permusuhan terhadap pemerintah negara Arab Teluk. Disamping menciptakan atmosfer insecurities terhadap jaminan keamanan internal GCC, konstruksi tersebut memiliki posisi yang kuat dalam membentuk persepsi negara-negara GCC sebagai sebuah kumpulan negara yang mencoba untuk mempertahankan *status quo* negara monarki pemerintahan mereka dari eksistensi Hizbullah yang merupakan ancaman politik bagi keberlangsungan pemerintahan mereka.

Penyataan al-Zayani selanjutnya yakni berkaitan dengan intervensi Hizbullah di Suriah, Irak, dan Yaman. Menurut pernyataan tersebut, intervensi yang dilakukan oleh Hizbullah di Suriah, Irak, dan Yaman tersebut sepenuhnya merupakan bentuk “tindakan terorisme yang tidak sesuai dengan nilai moral, prinsip kemanusiaan dan hukum internasional yang menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional negara Arab”. Betapapun intervensi Hizbullah di Suriah dan Irak memiliki kontribusi positif dalam meredam isu terorisme dunia, namun dalam konstruksi GCC prestasi tersebut tetap merupakan sebuah catatan merah. Di Suriah, keterlibatan Hizbullah untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad merupakan bentuk ancaman geopolitik bagi negara Arab teluk, khususnya Arab Saudi yang merupakan aktor dominan semenanjung Arab. Teritori Suriah yang selama ini adalah *pivotal area* bagi poros perlawanan merupakan satu-satunya kesempatan bagi Arab Saudi untuk mengisolasi posisi Teheran dalam konstelasi geopolitik Timur Tengah. Maka dari itu, manuver untuk melengserkan Assad dalam krisis politik di Damaskus menjadi prioritas bagi Arab Saudi.

Dua negara Arab Teluk yang paling vokal dalam manuver penggulingan Bashar al-Assad tersebut adalah Arab Saudi dan Qatar. Manuver tersebut kongkrit diwujudkan dalam strategi *proxy war* dengan menggelontorkan bantuan finansial hingga logistik persenjataan kepada pihak oposisi bersenjata Suriah. *Proxy* negara Arab Teluk tersebut merupakan fraksi-fraksi jihadis yang memiliki jaringan dengan teroris internasional (Al-Qaeda). Belakangan, walaupun sempat mendominasi medan strategis konflik Suriah, namun kesempatan Arab Saudi dan Qatar untuk melengserkan Bashar al-Assad pada akhirnya menemui kegagalan karena pemerintah Suriah yang dibantu (salah satunya) oleh Hizbullah berhasil memukul mundur kelompok oposisi sekaligus mematahkan manuver *proxy war* negara Arab Teluk tersebut.

Mengalami kegagalan di medan konflik Suriah, kampanye militer gabungan negara Arab Teluk di Yaman pun juga tengah mengalami konflik yang tak berkesudahan. Kampanye militer tersebut harus terulur melebihi estimasi waktu yang ditentukan oleh negara Arab Teluk akibat perlawanan sengit kelompok Houthi. Koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi ini yakin bahwa penyebab konflik Yaman ini menjadi terulur adalah karena adanya keterlibatan pihak asing yang mendukung kelompok Houthi, tentu saja tuduhan ini merujuk kepada Iran dan Hizbullah. Walaupun asumsi tersebut masih sulit dibuktikan, namun Arab Saudi bersikeras bahwa terdapat keterlibatan Hizbullah dalam konflik Yaman yang didukung oleh instruksi dari Teheran. Keberhasilan Hizbullah dalam medan konflik Suriah sekaligus membuktikan kelompok perlawanan tersebut bukan lagi sebagai elemen *non-state actor* yang hanya aktif dalam internal politik Lebanon, melainkan juga sebagai aktor geopolitik yang eksistensinya tidak lagi dapat diremehkan.

Begitupula di Irak, eksistensi Hizbullah di Baghdad yang bertujuan untuk melatih para milisi lokal dalam upaya melawan ISIS juga tidak luput dari persepsi negatif GCC. Sejak satu dekade sebelumnya, Arab Saudi telah khawatir bahwa jatuhnya rezim Saddam justru akan memberikan Iran sebuah kesempatan yang lebih luas dalam memperluas pengaruh geopolitiknya. Kekhawatiran tersebut

terbukti dengan munculnya pemerintahan di Baghdad yang lebih kooperatif terhadap Iran. Keterlibatan Hizbullah dalam upaya memberikan pelatihan militer (*Hezbollahization*) kepada milisi lokal tersebut sekali lagi menunjukkan komitmen Hizbullah dalam merespon isu terorisme, namun di sisi lain komitmen tersebut sekaligus dipersepsikan oleh Arab Saudi sebagai destabilisasi keamanan regional dan instrumen Iran dalam memperluas pengaruh geopolitiknya di Irak.

Bagaimanapun, keberlangsungan rezim Assad di Suriah merupakan indikasi soliditas poros perlawanan yang sekaligus memupuskan angan negara Arab Teluk dalam upaya mengambil alih *pivotal area* di Damaskus untuk mengisolasi pengaruh Iran dan Hizbullah di kawasan. Progresifitas kelompok Houthi di Yaman juga menjadi ancaman regional bagi GCC, karena secara geografis teritorial Yaman yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi tersebut akan menjadi ancaman serius apabila nantinya jatuh kepada pihak-pihak yang kooperatif terhadap Teheran. Arab Saudi pun tidak berharap banyak dengan kondisi internal di Irak yang semakin tidak dapat diandalkan untuk mendukung posisi negara Arab Teluk dan bahkan justru menjadi potensi ancaman geopolitik bagi posisi GCC secara keseluruhan.

Dalam persepsi GCC, kondisi geopolitik tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh eksistensi Hizbullah di Suriah, Irak, dan Yaman. Maka dari itu, justifikasi teroris terhadap Hizbullah merupakan opsi yang logis bagi GCC sebagai upaya untuk mengisolir progresifitas kelompok tersebut di kawasan. Secara keseluruhan, strategi *war by proxy* negara Arab Teluk yang menemui kegagalan di Suriah, keberhasilan *Hezbollahization* di Irak, serta kampanye militer koalisi negara Arab yang mengalami stagnasi tersebut membentuk persepsi negara anggota GCC sebagai instrumen kemanan dan politik regional, bahwa eksistensi Hizbullah merupakan ancaman bagi masa depan agenda geopolitik negara Arab Teluk yang semakin terisolasi dalam konstelasi geopolitik Timur Tengah akibat dominasi Teheran.

Masih berkaitan dengan pernyataan Sekjen GCC yang mengatakan bahwa Hizbullah merupakan ancaman nasional bagi negara Arab (*threat to Arab National Security*). Apabila kita menggunakan pendekatan instrumentalisme dalam memandang konteks justifikasi ini, dapat difahami dengan jelas bahwa GCC yang diprakarsai oleh Arab Saudi menggunakan diskursus sektarian sebagai instrumen yang efektif untuk mengkonstruksi Hizbullah sebagai sebuah ancaman ideologis. Arab Saudi mencoba untuk membangun sebuah pemahaman bahwa Hizbullah beserta patronnya di Teheran disamping berupaya untuk menguatkan pengaruh geopolitiknya di kawasan, mereka juga tengah mencoba melakukan ekspansi ideologi di negara-negara Arab Teluk. Pesan yang coba ingin disampaikan konstruksi tersebut kepada publik dunia yakni Hizbullah dan Iran berusaha untuk menyebarkan ideologi Syiah kepada negara-negara Arab Teluk yang mayoritas berideologi Sunni.

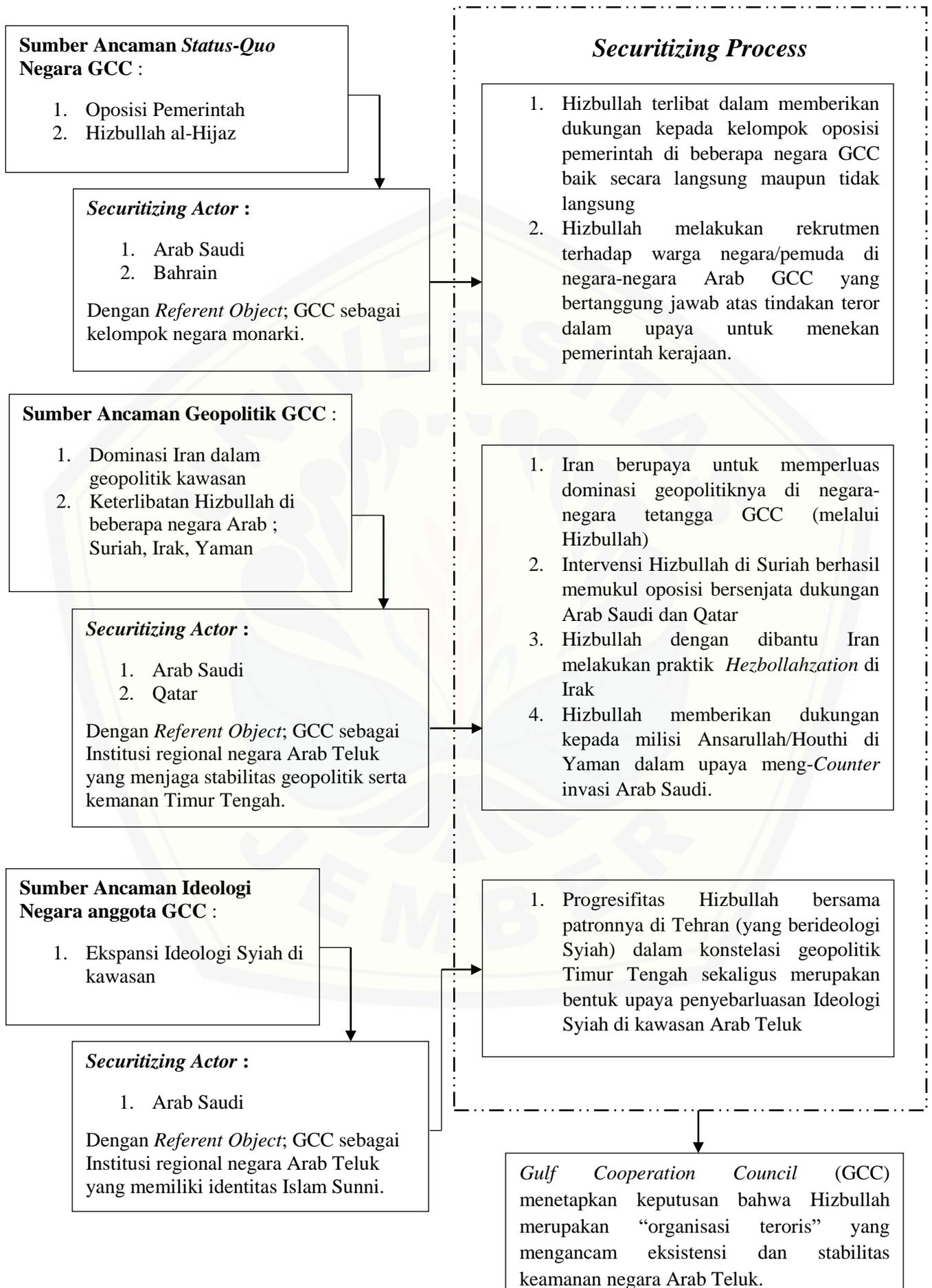
Dalam upaya membangun pemahaman tersebut, ideologi Syiah dikonstruksikan sebagai pemahaman yang telah keluar dari agama Islam (*kafir*) dan mengancam eksistensi kelompok Sunni. Konstruksi tersebut juga dikaitkan dengan kondisi konflik yang sedang terjadi di Suriah dengan mengatakan bahwa rezim Syiah Bashar al-Assad yang dibantu oleh Iran dan Hizbullah tengah melakukan pembantaian terhadap muslim Sunni. Hal tersebut tidak termasuk dengan catatan kelompok oposisi di Arab Saudi dan Bahrain yang didominasi oleh komunitas Syiah. Kondisi tersebut tentu menjadi problematika yang cukup krusial dalam internal politik negara Arab. Label kafir/keluar dari agama Islam tersebut cukup penting mengingat kontestasi antara Arab Saudi dan Iran dalam memperebutkan posisi sebagai *icon* kepemimpinan dunia muslim, Riyadh melihat diskursus sektarian ini sebagai instrumen yang efektif untuk mendemonisasi citra Teheran dalam tatanan dunia Islam.

Kembali pada Hizbullah yang memiliki *track record* negatif dimata negara Arab Teluk, Arab Saudi memandang bahwa metode yang signifikan untuk mengkonstruksi kelompok ini sebagai musuh bersama adalah dengan mengeksploitasi isu sektarian. Walaupun secara entitas ideologis Arab Saudi

sendiri adalah Wahabi, konstruksi sektarian Sunni-Syiah tersebut berguna untuk melancarkan agenda politiknya di Suriah sekaligus juga terbukti efektif dalam membangun persepsi bahwa apabila ekspansi ideologi Syiah Hizbullah dan Iran tidak segera ditindak lanjuti secara serius, maka GCC sebagai sebuah institusi regional dengan anggota negara muslim Sunni akan menghadapi ancaman identitas ideologis. Salah satu hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam justifikasi teroris GCC terhadap Hizbullah yakni adanya pertimbangan diskursus sektarian yang melatarbelakangi justifikasi tersebut.

Dari pernyataan al-Zayani tersebut, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang kemudian menjadi *referent object* bagi para *securitizing actors* negara Arab Teluk. Pertama adalah berkaitan dengan eksistensi status pemerintahan negara Arab Teluk. Melalui pernyataan al-Zayani tersebut, GCC mempersepsikan Hizbullah sebagai entitas yang mengancam bagi keberlangsungan pemerintah monarki negara anggotanya. Persepsi tersebut dikonstruksi oleh Arab Saudi dan Bahrain yang menganggap adanya keterlibatan Hizbullah mendukung kelompok perlawanan dan oposisi rezim kerajaan di internal negara Arab Teluk dalam upaya menyabotase kepentingan pemerintah. Kedua, yakni berkaitan dengan posisi Iran yang secara signifikan diuntungkan oleh eksistensi Hizbullah di kawasan. Munculnya Hizbullah sebagai elemen progresif pada beberapa negara seperti Suriah, Irak dan Yaman juga merupakan bentuk dominasi geopolitik Iran di regional Timur Tengah. Oleh karena itu, Hizbullah dipersepsikan oleh Arab Saudi dan Qatar sebagai ancaman geopolitik bagi eksistensi GCC di kawasan. Faktor ketiga yang juga menjadi *referent object* bagi GCC adalah aspek sosial dalam internal negara anggota GCC. Aspek ini secara spesifik memuat tentang identitas ideologi pemerintah negara anggota GCC secara keseluruhan. Dalam hal ini, Arab Saudi merupakan *securitizing actor* tunggal yang mengkonstruksi Hizbullah sebagai ancaman bagi ideologi Sunni negara Arab Teluk.

Proses konstruksi yang dilakukan oleh GCC tersebut lebih spesifik dapat disimak melalui bagan berikut :

Gambar 1. Proses Konstruksi Hizbullah Sebagai Organisasi Teroris oleh *Gulf Cooperation Council* (GCC)

Untuk mengetahui akseptabilitas para *audience* terhadap *speech act* beserta persepsi ancaman yang dikonstruksi oleh GCC dalam menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris, justifikasi tersebut tidak dapat dianalisis hanya dengan satu bingkai persepektif milik GCC semata. Untuk mengetahui akseptabilitas konstruksi GCC terhadap Hizbullah juga diperlukan pro maupun kontra naratif dalam merespon penetapan label teroris tersebut. Faktanya, keputusan GCC tersebut menuai pro-kontra dari berbagai pihak. Terdapat beberapa pihak yang menurut penulis memiliki posisi yang tidak dapat disisihkan dalam dinamika keputusan GCC tersebut. Sehari setelah keputusan GCC menjatuhkan Hizbullah sebagai organisasi teroris, komandan tertinggi IRGC, Jenderal Qassem Soleimani melayangkan kritikasi terhadap keputusan negara Arab Teluk tersebut dengan mempertanyakan kredibilitas justifikasi GCC terhadap Hizbullah khususnya berkaitan dengan tuduhan isu sektarian ; *“In which country have we tried to turn a Sunni brother into a Shiite? In fact, conversely, our lives were shields for Sunnis (Wilson, 2016).”* Disamping sebagai bentuk dukungan terhadap Hizbullah, pernyataan jenderal IRGC tersebut merupakan *counter-statement* atas tuduhan kampanye sektarian yang dilontarkan Arab Saudi kepada Hizbullah dan Iran. Poin yang coba disampaikan Qassem Soleimani adalah, Hizbullah dan Iran bukanlah pihak-pihak yang mencoba memaksakan ideologi Syiah kepada komunitas Sunni, justru keduanya merupakan pelindung keamanan bagi saudara Sunni mereka.

Posisi Hizbullah juga didukung oleh Menteri luar negeri Irak, Ibrahim al-Ja’afari yang menyangkal keputusan GCC menetapkan Hizbullah sebagai teroris. dalam pertemuan Liga Arab dia mengatakan : *“Whoever accuses the Popular Mobilization forces and Hezbollah of terrorism is the one who supports and adopts terrorism (Wilson, 2016).”* Dalam pertemuan Liga Arab tersebut Ibrahim al-Ja’afari menekankan bahwa siapapun pihak yang mencoba untuk memosisikan Hizbullah sebagai teroris, maka justru pihak itulah yang sebenarnya mendukung kegiatan terorisme global. Pernyataan Ja’afari tersebut dilandasi atas fakta yang selama ini difahami oleh umum bahwa negara Arab

Teluk merupakan pihak yang mendukung kelompok terorisme seperti Al-Qaeda. Pernyataan Ibrahim tersebut jelas merupakan bentuk apresiasi Irak terhadap peran Hizbullah yang aktif dalam upaya melawan teroris ISIS di dalam territorial Irak. Diluar dukungan internal dari beberapa negara anggota Liga Arab serta negara anggota GCC sendiri, juga terdapat dukungan Israel atas keputusan institusi regional tersebut dalam menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan pujian terhadap langkah yang diambil oleh GCC. selang sepekan pasca penetapan tersebut dia mengatakan; “*GCC Designation was an important and even amazing development. This measures have great potential to change the diplomatic reality in the region* (Press TV, 2016).” Konfirmasi Benjamin Netanyahu tersebut merupakan bentuk keselarasan pandangan antara Israel dan negara Arab Teluk dalam memandang Hizbullah sebagai ancaman. Perlu diingat bahwa tensi hubungan diplomatik yang memanas antara negara anggota GCC dengan kubu *axis of resistance* merupakan faktor utama yang menghubungkan kedekatan relasi mereka dengan Israel (Guzansky, 2015b). Sesuai dengan prinsip “*the enemy of my enemy is my friend*” Eksistensi Iran dan Hizbullah membuat jalinan hubungan diplomatik antara negara Arab Teluk dan Israel menjadi rasional untuk terbentuk.

Pasca keputusan 2 Maret 2016, *Gulf Cooperation Council* (GCC) mengumumkan kecamannya terhadap Hizbullah dan menetapkan status partai tersebut kedalam daftar teroris internasional. Pernyataan Sekjen GCC Abdullah bin Rashid Al-Zayani lebih jauh lagi ditindaklanjuti oleh anggota GCC dengan kebijakan-kebijakan yang menyudutkan pemerintah Lebanon. Seperti melarang warga negaranya untuk melakukan kunjungan pariwisata ke Beirut (Aljazeera, 2016), deportasi tenaga kerja Lebanon yang tinggal di negara GCC (Aboudi, 2016), Pembekuan akun Bank (*Gulf Banks*) dan aset perusahaan yang terbukti memiliki hubungan dengan Hizbullah (Press, 2016) sampai pada pembatalan bantuan kepada pemerintah Lebanon sebagaimana yang dilakukan oleh Saudi Arabia (Hubbard, 2016). Tekanan terhadap pemerintah Lebanon tersebut merupakan bentuk upaya GCC dalam menyudutkan posisi Hizbullah.

BAB 5. KESIMPULAN

Seiring dengan terjadinya fenomena *Arab Spring* di Timur Tengah, keterlibatan serta peran aktif Hizbullah dalam konstelasi politik di regional ini menjadi semakin signifikan. Fenomena tersebut juga turut memperluas ruang gerak Hizbullah yang semula hanya sebatas teritorial Lebanon dan terbatas isu internal politik pemerintahan maupun Palestina, kini Hizbullah tampil sebagai elemen penting yang progresif dalam lingkup konstelasi politik regional (Suriah, Irak, Yaman). Ekspansi gerakan Hizbullah tersebut merupakan ancaman bagi *Gulf Cooperation Council* (GCC). Ancaman yang disebabkan oleh Hizbullah tersebut memerlukan adanya penanganan khusus (sekuritisasi) dari GCC untuk menetralsir instabilitas yang ditimbulkan. Sekuritisasi yang dilakukan oleh GCC tersebut diwujudkan dengan penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris.

Dalam proses sekuritisasi Hizbullah sebagai organisasi teroris, peran *securitizing actors* yang direpresentasi oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar menempati posisi yang signifikan dalam menyuarakan (*speech act*) agenda keamanan terhadap anggota GCC secara keseluruhan. Secara umum, agenda keamanan GCC terhadap Hizbullah memiliki kaitan erat dengan eksistensi Iran. Ekspansi pengaruh Republik Islam Iran pada saat fenomena *Arab Spring* merupakan ancaman geopolitik bagi negara Arab Teluk. Dalam konteks ini, Hizbullah merupakan salah satu instrumen Teheran dalam memainkan agenda geopolitiknya di kawasan. Oleh karena itu, posisi Hizbullah menduduki level ancaman yang krusial bagi negara Arab Teluk GCC.

Para *securitizing actors* tersebut mengkonstruksikan Hizbullah sebagai ancaman bagi *referent objects*, yakni kedaulatan *status quo* nasional, stabilitas geopolitik kawasan, serta ideologi negara anggota GCC. Dalam proses agenda keamanan tersebut, Arab Saudi merupakan *securitizing actor* utama dalam proses konstruksi Hizbullah. Bersama dengan Bahrain, Arab Saudi mengkonstruksi Hizbullah sebagai ancaman bagi *status quo* monarki negara Arab Teluk. Sedangkan dengan Qatar, Riyadh menggunakan isu stabilitas geopolitik kawasan sebagai respon progresifitas Hizbullah di regional Timur Tengah. Selain

mengkonstruksi Hizbullah sebagai ancaman geopolitik, Arab Saudi juga memainkan isu sektarian untuk menanamkan persepsi bahwa Hizbullah dengan partnernya di Teheran tengah melakukan ekspansi ideologi Syiah di negara Arab Teluk.

Pada dasarnya, penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris bukanlah hal yang baru, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lain. Akan tetapi dalam konteks dunia Arab, label teroris yang ditujukan kepada Hizbullah masih menjadi perdebatan antar negara-negara di Timur Tengah. Di dalam internal negara GCC pun, sebelumnya masih belum memiliki suara yang bulat dalam konteks organisasi regional untuk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Segera setelah Arab Saudi melakukan konstruksi ide (*shared understanding*) tentang ancaman yang ditimbulkan, isu penanganan Hizbullah bergeser dari yang semula hanya agenda keamanan per negara, kini menjadi isu sekuritisasi GCC secara keseluruhan. Keberhasilan proses sekuritisasi yang dilakukan GCC tersebut didukung dengan tindakan kongkrit negara anggotanya untuk menerapkan kebijakan yang menyudutkan pemerintah Lebanon dalam upaya mengisolasi Hizbullah.

Penulis mendapatkan beberapa fakta menarik selama proses penyusunan skripsi ini. Secara umum penulis dapat mengetahui bagaimana proses sekuritisasi negara GCC terhadap Hizbullah yang bertumpu pada pendekatan konstruktif sesuai dengan kepentingan *securitizing actors*. Disamping itu, secara khusus penulis mengasumsikan bahwa status identitas atau label suatu kelompok pada dasarnya tidak bersifat *given* (muncul dengan sendirinya) dan tidak selalu sesuai dengan realita yang sebenarnya. Stigma negatif apapun seperti halnya teroris, kafir, syiah yang selama ini ditujukan oleh suatu pihak terhadap entitas kelompok tertentu pada dasarnya sarat akan subjektifitas nilai demi mewujudkan suatu kepentingan tertentu pula.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdo, Genieve. 2016. *The New Sectarianism : The Arab Spring anf The Rebirth*. New York : Oxford Unversity Press.
- Alagha, Joseph. 2011. *Hizbullah 's Identity Construction*. Amsterdam : Amsterdam University Press.
- Alagha, Joseph. 2006. *The Shifts in Hizbullah 's Ideology: Religious Ideology, Political Ideology, and Political Program*. Beirut : Amsterdam University Press.
- Al-Rasheed, Madawi. 2017. Sectarianism As Counter-Revolution Saudi Responses to the Arab Spring. [ed.] Nader Hashemi and Danny Postel. *Sectarianization Mapping the New Politics of the Middle East*. New York : Oxford University Press.
- Archetti, C. 2013. *Understanding Terrorism in the age of Global Media*. New York: Palgrave Macmillan.
- Azani, Eitan. 2011. *Hezbollah : The Story of the Party of God From Revolution to Institutionalization*. New York : Palgrave Macmillan.
- Bailey, Kenneth D. 1994. Methods of Social Research. dalam Umar Suryadi Bakry. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Buzan, Barry, Wæver, Ole and Wilde, Jaap de. 1998. *Security A New Framework for Analysis*. Colorado, United States of America : Lynne Reinner Publisher.
- Commins, David. 2006. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. London- New York : I.B. Tauris.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed method Approaches*. Dalam Metode Penelitian Hubungan Internasional. Umar Suryadi Bakry. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gause, Gregory III. 2015. Ideologies, alliances and underbalancing in the new Middle East Cold War. *International Relations Theory and a Changing Middle East*. Project On Middle East Political Science (POMEPS).
- Goodarzi, Jubin Moazami. 2002. *The Formative Years Of The Syrian-Iranian Alliance : Power Politics In The Middle East 1979-1989*. London : The London School of Economics.
- Gowans, Stephen. 2017. *Washington's Long War on Syria*. Montreal : Baraka Books.
- Guzansky, Yoel. 2015. *The Arab Gulf States and Reform in the Middle East*. Hampshire : Palgrave Macmillan.

- Hajjar, Sami G. 2002. *Hizballah: Terrorism, National Liberation, or Menace?* s.l. : Strategic Studies Institute.
- Harel, Amos and Issacharof, Avi. 2008. *34 Days Israel, Hezbollah, Lebanon, And The War In Lebanon*. New York : Palgrave Macmillan.
- Joffe, George. 2009. Saudi Arabia: Victim or Hegemon? *The Kingdom of Saudi Arabia , 1979-2009 : Evolution of a Pivotal State*. Washington, DC : Middle East Institute.
- Joseph, Alagha. 2011. *Hizballah Documents From the 1985 Open Letter to The 2009 Manifesto*. Amsterdam : Pallas Publication.
- Judith, Palmer Harik. 2004. *Hezbollah the Changing Face Of Terrorism*. London : I. B. Tauris.
- Karsh, Efraim. 2002. *Essential Histories The Iran-Iraq War 1980-1988*. Osprey Publishing.
- Kazim, Musa. 2013. *Hizballah Sebuah Gerakan Perlawanan ataukah Terorisme?* Jakarta : Noura Book (PT. Mizan Publika).
- Klotz, Audie and Prakash, Deepa. 2008. *Qualitative Methods in International Relations A Pluralist One*. New York : Palgrave Macmillan.
- Lister, Charles R. 2015. *The Syrian Jihad Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency*. New York : Oxford University Press.
- Love, James B. 2010. *Hezbollah : Social Services as a Source of Power*. Florida : The Joint Special Operations University (JSOU).
- Malmvig, Helle. 2015. *Coming in from the Cold: How we may take sectarian identity politics seriously in the Middle East without playing to the tunes of regional power elites*. Dalam International Relations Theory and a Changing Middle East. Washington DC : Project On Middle East Political Science (POMEPS).
- Matthiesen, Toby. 2013. *Sectarian Gulf Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That Wasn't*. California : Stanford University Press.
- McConaghy, K. 2017. *Terrorism and the State*. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Oktorino, Nino. 2016. *Pedang Sang Khalifah*. Cetakan II. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Saikal, Amin. 2016. *The Arab World and Iran a Turbulent Region in Transition*. New York : Palgrave Macmillan.
- Salloukh, Bassel F. 2017. *The Architecture Of Sectarianization In Lebanon*. Dalam Sectarianization Mapping the New Politics of the Middle East. Editor Nader Hashemi and Postel. New York : Oxford University Press.

- Salloukh, Bassel F. 2017. *The Sectarianization Of Geopolitics In The Middle East*. Dalam *Sectarianization Mapping the New Politics of the Middle East*. Editor Nader Hashemi and Postel. New York : Oxford University Press.
- Schanzer, Jonathan and Miller, Steven. 2012. *Facebook Fatwa : Saudi Clerics , Wahhabi Islam and Social Media*. First. Washington DC : Foundation For Defense Of Democracies Press.
- Shalabi, Samir. 2015. *Hezbollah : Ideology , Practice , and the Arab Revolts Between popular legitimacy and strategic interests*. Lund, Swedia : Lund University.
- Snyder, Craig A. 2009. *Contemporary Security and Strategy*. New York : Palgrave Macmillan.
- Spencer, Liz, et al. 2003. *Quality in Qualitative Evaluation : A framework for assessing research evidence A Quality Framework*. London : Cabinet Office-National Centre for Social Research.
- Sulaeman, Dina Y. 2013. *Prahara Suriah Membongkar persekongkolan Multinasional*. Cetakan Pertama. Bandung : Mizan Media Utama.
- Ulrichsen, Kristian Coates. 2014. *Qatar And The Arab Spring*. New York : Oxford University Press.
- Yamani, Mai. 2006. *Cradle of Islam: The Hijaz and the Quest for an Arabian Identity*. London - New York : I. B. Tauris.
- Zisser, Eyal. 2007. *Commanding Syria Bashar al-Asad and the First Years*. London : I.B. Tauris.

Jurnal

- Machlis, Elisheva. 2016. *Al-Wafaq and the February 14 uprising : Islam, nationalism and democracy – the Shi'i-Bahraini discourse*. Routledge, Middle Eastern Studies, Vol. 52, hal. 978-995.
- Saefullah, Hikmawan. 2015. *Ancaman Syiah, Persepsi, dan Wacana Kontra Revolusi*. Maarif Institute, Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik, Vol. 10, hal. 18-30.
- Kourany, Ammar and Myers, Martha. 2017. *Assistance Funding to Syria: For Development or Strife?*. Middle East Policy, Vol. XXIV, hal. 122-136.
- Darwich, May and Fakhoury, Tamirace. 2017. *Casting the Other as an existential threat : The securitisation of sectarianism in the international relations of the Syria crisis*. Routledge, Global Discourse, Vol. 9995, hal. 1-21.
- Guzansky, Yoel. 2014. *Defence Cooperation in the Arabian Gulf : The Peninsula Shield Force Put to the Test*. Routledge, Middle Eastern Studies, Vol. 50, hal. 640–654.
- DeVore, Marc R. 2012. *Exploring the Iran-Hezbollah Relationship: A Case Study of how State Sponsorship affects Terrorist Group Decision-Making*. Perspective on Terrorism, hal. 85-107.

- Perra, Antonio. 2016. *From the Arab Spring to the Damascus Winter : The United States , Russia , and the New Cold War*. SAGE Publications, Contemporary Review of the Middle East, Vol. 3, hal. 1-24.
- Alagha, Joseph. 2014. *Hezbollah and the Arab Spring*. Contemporary Review of the Middle East, Vol. 1, hal. 189–206.
- Guzansky, Yoel. 2015. *Iran and the Arab Gulf States : Change amidst Continuity*. Routledge, Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. 09, hal. 63-74.
- Ahmadi, Hamid. 2013. *Iran and the Arab Spring : Why Haven't Iranians Followed the Arabs in Waging Revolution?*, Wiley Periodicals, Asian Politics & Policy, Vol. 5, hal. 407-420.
- Juneau, Thomas. 2016. *Iran's policy towards the Houthis in Yemen : a limited return on a modest investment*. John Wiley & Sons, The Royal Institute of International Affairs, Vol. 3, hal. 647-663.
- Terrill, W Andrew. 2015. *Iran's Strategy for Saving Asad*. 2 Middle East Institute, Vol. 69, hal. 222-236.
- Martin, Michaela and Solomon, Hussein. 2017. *Islamic State : Understanding the Nature of the Beast and Its Funding*. Sage Publication, Contemporary Review of the Middle East, Vol. 4, hal. 1-32.
- Jones, Clive and Guzansky, Yoel. 2017. *Israel's relations with the Gulf states: Toward the emergence of a tacit security regime?* Taylor & Francis, Contemporary Security Policy, Vol. 3260, hal. 1-21.
- Guzansky, Yoel. 2015. *Israel and the Arab Gulf states: from tacit cooperation to reconciliation?* Routledge, Israel Affairs, Vol. 21, hal. 131-147.
- Harb, Mona and Leenders, Reinoud. 2005. *Know thy enemy : Hizbullah, 'terrorism' and the politics of perception*. Routledge, Third World Quarterly, Vol. 26, hal. 173-197.
- Quamar, Muddassir. 2014. *Managing the Arab Spring : The Saudi Way*. SAGE Publications, Contemporary Review of the Middle East, Vol. 1, hal. 141-163.
- Williams, Brian Glyn and Souza, Robert. 2016. *Operation "Retribution": Putin's Military Campaign in Syria, 2015-16*. Middle East Policy, Vol. XXIII, hal. 42-60.
- Anis, Muhammad. 2015. *Pemikiran Politik Syiah: Perspektif Wilayah Al-Faqih*. Maarif Institute, Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik, Vol. 10, hal. 84-105.
- Rugh, William A. 2015. *Problems In Yemen, Domestic And Foreign*. Middle East Policy, Vol. 22, hal. 140-152.
- El-Labbad, Mustafa. 2009. *Qatar: Big Ambitions, Limited Capabilities* hal. 18-23.
- Boroujerdi, Eskandar Sadeghi. 2014. *Salvaging the "Axis of Resistance," Preserving Strategic Depth"*. King Faisal Center for Research and Islamic Studies (KFCRIS), Dirasat, Vol. 1.

- Jahner, Ariel. 2012. *Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf*. International Affairs Review, Vol. 20, hal. 36-50.
- Legrenzi, Matteo and Lawson, Fred H. 2016. *Saudi Arabia Calls Out Hezbollah: Why Now?* Middle East Policy, Vol. 23, hal. 31-43.
- Berti, Benedetta and Guzansky, Yoel. 2015. *Saudi Arabia's Foreign Policy on Iran and the Proxy War in Syria : Toward a New Chapter?* Routledge, Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. 9770, hal. 25-34.
- Bar-Siman-Tov, Yaacov. 1984. *Strategy of War by Proxy*. Cooperation and Conflict, Vol. XIX, hal. 263-273.
- Byman, Daniel. 2014. *Survival : Global Politics and Strategy Sectarianism Afflicts the New Middle East*. Routledge, Global politics and Strategy, Vol. 56:1, hal. 79-100.
- Kamrava, Mehran. 2012. *The Arab Spring and the Saudi-Led Counterrevolution*. Elsevier (Foreign Policy Research Institute), Orbis, Vol. 56, hal. 96-104.
- Draege, Jonas Bergan. 2016. *The Formation of Syrian Opposition Coalitions as Two-Level Games*. Middle East Journal, Vol. 70, hal. 189-210.
- Byman, Daniel. 2015. *The Homecomings : What Happens When Arab Foreign Fighters in Iraq and Syria Return?* Routledge, Studies in Conflict & Terrorism, hal. 37-41.
- Shahid, Leila. 2002. *The Sabra and Shatila Massacres : Eye-Witness Reports*. Journal of Palestine Studies, hal. 36-58.
- Zuhur, Sherifa. 2015. *The Syrian Opposition : Salafi and Nationalist Jihadism and Populist*. Sage Publication, Contemporary Review of the Middle East, Vol. 2, hal. 143-163.

Artikel & Reportase

- ACRPS. 2016. *Lebanon's Awaited President : Alliances Crumble, Sectarianism Wins and Everything Stays the Same*. Doha : Arab Center for Research and Policy Studies.
- Alterman, Jon B. 2013. *The Age of Proxy Wars*. Middle East Program, Centre For Strategic & International Studies (CSIS). Washington DC : CSIS.
- Bergenwall, Samuel. 2016. *The Assertive Kingdom Saudi Arabia's Threat Perception, Capabilities and Strategies*. Stockholm : FOI (Swedish Defence Research Agency).
- Cohen, Yoram and White, Jeffrey. 2009. *Hamas in Combat The Military Performance of the Palestinian Islamic Resistance Movement*. Washington Institute for Near East Policy. Washington DC.
- Tony Blair Faith Foundation. *If the Castle Falls: Ideology and Objectives of the Syrian Rebellion*. Religion and Geopolitics. Centre on Religion & Geopolitics.
- Freer, Courtney. 2016. *The Changing Islamist Landscape of the Gulf Arab States*. Washington DC : The Arab Gulf States Institute in Washington.

- Fulton, Will, Holliday, Joseph and Wyer, Sam. 2013. *Iranian Strategy In Syria*. Institute Study of War (ISW). Washington DC : ISW.
- Gause, Gregory III. 2014. *Beyond Sectarianism : The New Middle East Cold War*. The Brookings Institution. Washington, D.C. : Brooking Doha Centre Analysis Paper.
- Holmquist, Erika. 2015. *ISIS and Hezbollah Conduits of Instability*. Stockholm : FOI (Swedish Defence Research Agency).
- Ibish, Hussein. 2016. *What's at Stake for the Gulf Arab States in Syria?* Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW). New York : AGSIW.
- Khatib, Lina. 2012. *Hizbullah Image Management Strategy*. Los Angeles : USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg School University of Southern California.
- Koch, Christian. 2010. *The GCC as a Regional Security Organization*. Dubai : International Studies at the Gulf Research Center.
- Leverett, Flynt and Mann, Hillary. 2015. Saudi Arabia's Yemen Offensive , Iran's "Proxy" Strategy , and the Middle East's New "Cold War".
- Makovsky, David and White, Jeffrey. 2006. *Lessons and Implications of the Israel-Hizballah War A Preliminary Assessment*. Washington DC : The Washington Institute for Near East Policy.
- Mikail, Barah. 2012. *Assad's fall: how likely, how desirable?* Barah. European Think Tank For Global Action.
- MONIQUET, Claude. 2013. *The Involvement Of Salafism/Wahhabism In The Support And Supply Of Arms*. European Strategic Intelligence and Security Center (ESISIC). Brussels, Belgium.
- Pollak, Nadav. 2016. *The Transformation of Hezbollah by Its Involvement in Syria*. Washington DC : The Washington Institute for Near East Policy.
- Rosiny, Stephan. 2014. *The Caliph's new clothes: the Islamic State in Iraq and Syria*. German Institute of Global and Area Studies (GIGA)..
- Sadjadpour, Karim and Ben Taleblu, Behnam. 2015. *Iran in the Middle East: leveraging chaos*. Stockholm : A European Think Thank For Global Action.
- Smyth, Phillip. 2015. *The Shiite Jihad In Syria And Its Regional Effects*. Washington DC : The Washington Institute for Near East policy.
- Sullivan, Marisa. 2014. *Hezbollah In Syria*. Institute for the Study of War. Wahington DC : ISW (Institute for the Study of War).
- Tadjbakhsh, Shahrbanou. 2013. *The Persian Gulf and Afghanistan : Iran and Saudi Arabia 's Rivalry Projected*. Peace Reasearch Institute Oslo (PRIO).
- Todman, Will. 2016. *Gulf States' Policies on Syria*. Centre For Strategic & International Studies (CSIS). Washington DC : CSIS.

Young, Karen E. 2013. *The Emerging Interventionists of the GCC*. London School of Economic and Political Science (LSE) Middle East Centre. London : (LSE) Middle East Centre.

Situs Internet

Aboudi, Sami. 2016. *Lebanese expats fearful as Gulf expels dozens accused of Hezbollah links*. Reuters. <http://mobile.reuters.com/idUSKCN0X51R2>. [Diakses pada: September 5, 2017.]

Al-Hatlani, Ibrahim. 2016. How far will the Saudis go against Hezbollah? *Al-Monitor*. <http://www.al-monitor.com/pulse/original/2016/03/saudi-arabia-gcc-ties-iran-hezbollah.html>. [Diakses pada: Juli 20, 2017.]

Al-Jazeera English. 2016. Saudi Arabia cuts diplomatic ties with Iran. *AlJazeera English*. <http://www.aljazeera.com/news/2016/01/saudi-arabia-severs-diplomatic-relations-iran-160103202137679.html>. Januari 2016. [Diakses pada: November 18, 2016.]

AlJazeera. 2016. GCC Declares Lebanon's Hezbollah a 'terrorist' group. *AlJazeera English*. <http://www.aljazeera.com/news/2016/03/gcc-declares-lebanon-hezbollah-terrorist-group-160302090712744.html> [Diakses pada: Juni 11, 2016.]

Aljazeera. 2016. Kuwait, Qatar join GCC allies in Lebanon travel warning - Al Jazeera English. *Aljazeera English*. <http://www.aljazeera.com/news/2016/02/kuwait-joins-gulf-allies-banning-travel-lebanon-160224161730185.html>. [Diakses pada: September 5, 2017.]

Al-Manar. 2016. Tunisia President Praises Hezbollah as National Resistance Movement. *Al-Manar*. <http://archive.almanar.com.lb/english/article.php?id=263228>. [Diakses pada: September 5, 2017.]

Brittanica. Arab Israeli Wars. *Brittanica*. <http://brittanica.com/event/Arab-Israeli-wars>. [Diakses pada: Oktober 22, 2016.]

Burke, Jason. 2012. Al-Qaida leader Zawahiri urges Muslim support for Syrian uprising. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2012/feb/12/alqaida-zawahiri-support-syrian-uprising>. [Diakses pada: Maret 15, 2017.]

Caruso, J.T. 2001. Al-Qaeda International. *The Federal Bureau of Investigation (FBI)*. <https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/Al-Qaeda-international>. [Diakses pada: Oktober 20, 2016.]

Cockburn, Patrick. 2017. Soldiers celebrate Isis's defeat in Mosul as Iraq's greatest battle in war against jihadis reaches bloody conclusion. *The Independent*. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-mosul-iraq-soldiers-celebrate-defeat-islamic-state-a7831256.html>. [Diakses pada: Agustus 10, 2017.]

Cordesman, Anthony H. 2015. America, Saudi Arabia, and the Strategic Importance of Yemen. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*. <http://www.csis.org/analysis/america-saudi-arabia-and-strategic-importance-yemen>. [Diakses pada: Mei 7, 2017.]

- Farmanfarmaian, Roxane. 2012. Redrawing the Middle East map Iran, Syria and the new Cold War. *Al Jazeera English*.
<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/11/2012111311424048459.html>.
[Diakses pada: Desember 30, 2016.]
- Fattah, H.M. 2006. Arab League criticizes Hezbollah for attacks.
http://www.nytimes.com/2006/07/17/world/africa/17iht-arabs.2224812.html?_r=0.
[Diakses pada: Mei 10, 2017.]
- Fattah, Hassan M. 2006. Militia Rebuked by Some Arab Countries. *The New York Times*.
http://www.nytimes.com/2006/07/17/world/middleeast/17arab.html?_r=1&oref=slogin&pagewanted=print. [Diakses pada: Agustus 10, 2017.]
- France 24. 2016. Gulf States declare Lebanon's Hezbollah a terrorist group. *France 24*.
<http://m.france24.com/en/20160302-gulf-states-declare-lebanons-hezbollah-terroris-group>. [Diakses pada: November 18, 2016.]
- Ganji, Akbar. 2014. U.S.-Jihadist Relation, Part I: Creating Mujahedin in Afghanistan. *Huffington Post*. <http://m.huffpost.com/us/entry/5542757>. [Diakses pada: Februari 06, 2017.]
- Ganji, Akbar. 2014. U.S.-Jihadist Relation, Part II: Waging Jihad to Defeat Soviet Union. *Huffington Post*. <http://m.huffpost.com/us/entry/5553529>. [Diakses pada: Februari 06, 2017.]
- Hubbard, Ben. 2016. Saudis Cut Off Funding for Military Aid to Lebanon. *New York Times*. https://www.nytimes.com/2016/02/20/world/middleeast/saudis-cut-off-funding-for-military-aid-to-lebanon.html?_r=0. [Diakses pada: September 5, 2017.]
- Kechichian, Joseph A. 2016. We don't want arms to fall into Hezbollah's hands: Saudi minister. *Gulf News*. <http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/we-don-t-want-arms-to-fall-into-hezbollah-s-hands-saudi-minister-1.1684963>. [Diakses pada: Juli 27, 2017.]
- Levitt, Mattew and Pollak, Nadav. 2014. Hezbollah in Iraq A Little Help Can Go a Long Way. *The Washington Institute for Near East Policy*.
<http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-in-iraq-a-little-help-can-go-a-long-way>. [Diakses pada: Maret 16, 2017.]
- Mansour, Renad. 2015. From Militia to State Force the Transformation of al-Hashd al-Shaabi. *Carnegie Middle East Center*. <http://carnegie-mec.org/diwan/61986>.
[Diakses pada: Maret 16, 2017.]
- McKernan, Bethan. 2017. Iraq declares Isis's caliphate 'has fallen' after huge symbolic victory in Mosul. *The Independent*.
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-caliphate-destroyed-islamic-state-iraq-northern-mosul-raqqa-us-led-coalition-forces-a71814281.html&sa=U&ved=0ahUKEwig2oGrybzWAhUJMI8KHUB5C8AQFgggMAA&usq=AFQjCNF0PeyRxZ_otdCzqXF0QNOUDm7vA [Diakses pada: Agustus 10, 2017.]

- Meddi, Adlène. 2016. Algeria's Hezbollah stance 'reflects view on resistance, not terrorism'. *Middle East Eye*. <http://www.middleeasteye.net/news/algeria-risks-isolation-arab-league-over-hezbollah-stance-1870366475>. [Diakses pada: September 5, 2017.]
- Mroue, Bassem. 2013. Hezbollah chief says group is fighting in Syria. *Associated Press*. <http://news.yahoo.com/hezbollah-chief-says-group-fighting-syria-162721809.html>. [Diakses pada: Maret 16, 2017.]
- Mubaraz, Ahmed. 2015. Why Does ISIS Destroy Historic Sites. *Centre on Religion & Geopolitics*. <http://www.religionandgeopolitics.org/religion-geopolitics/commentaries/opinion/why-does-isis-destroy-historic-sites>. [Diakses pada: Maret 16, 2017.]
- Naylor, Hugh. 2015. Yemen is turning into Saudi Arabia's Vietnam. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/saudi-arabia-cant-find-its-way-out-of-yemens-messy-war/2015/11/12/4d70ce26-84e1-11e5-8bd2-680fff868306_story.html. [Diakses pada: Mei 7, 2017.]
- Press TV. 2016. Netanyahu Praises GCC blacklisting of Hezbollah. <http://www.presstv.ir/detail/2016/03/08/454447/ISrael-Benjamin-Netanyahu-Hezbollah-blacklist-Prime-Minister-Tammam-Salam>. [Diakses pada: Oktober 22, 2016.]
- PressTV. 2016. Some 3.000 Hezbollah-tied Account await freeze. *PressTV*. <http://www.presstv.ir/Detail/2016/06/11/469900/Lebanon-Hezbollah-United-States-Saudi-Arabia-Syria>. [Diakses pada: September 5, 2017.]
- Rizk, Ali. 2016. Hezbollah responds to GCC decision . *Al-Monitor*. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/lebanon-hezbollah-speech-saudi-arabia-gcc-terrorist.html>. [Diakses pada: Juni 11, 2016.]
- Saudi Press Agency. 2006. The Official Saudi Press Agency. *Saudi Press Agency*. <http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=375383>. [Diakses pada: Agustus 10, 2017.]
- Saul, Heather. 2015. Isis mass graves Iraqi forensic teams begin excavating sites in Tikrit believed to hold bodies of up to 1,700 soldiers killed by militants. *The Independent*. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-mass-execution-soldier-describes-surviving-brutal-tikrit-massacre-by-playing-dead-10159320.html>. [Diakses pada: April 16, 2017.]
- Schreck, Adam. 2016. Gulf nations declare Lebanon's Hezbollah a terrorist group. *Associated Press*. <http://www.timesofisrael.com/gulf-nations-declare-hezbollah-a-terrorist-group/>. [Diakses pada: Juli 27, 2017.]
- Sikimic, Simona. 2016. Analysis GCC listing Hezbollah as terrorist a 'harsh blow' for Lebanon. *Middle East Eye*. <http://www.middleeasteye.net/news/analysis-gcc-declaration-hezbollah-terrorist-harsh-blow-lebanon-319844704>. [Diakses pada: November 18, 2016.]

- Sobelman, Daniel. 2015. Hezbollah's Friends in Yemen Are Trying to Lure the Saudis Into a Ground War. *Foreign Policy*. <http://foreignpolicy.com/2015/06/11/yemens-rebel-are-stealing-a-page-from-hezbollah-playbook-iran-saudi-arabia/>. [Diakses pada: November 18, 2016.]
- Solomon, Jay. 2011. Bahrain Sees Hezbollah Plot in Protest. *Wall Street Journal*. <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703907004576279121469543918>. [Diakses pada: November 18, 2016.]
- Strobell, Warren and Hosenball, Mark. 2015. Elite Iranian guards training Yemen's Houthis: US officials. *Reuters*. <http://www.reuters.com/article/2015/03/27/us-yemen-security-houthis-iranidUSKBNOMN2MI20150327>. [Diakses pada: Mei 8, 2017.]
- Sullivan, Kevin. 2012. Abdullah Lashes Out at al-Assad regime. *Gulf News*. <http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/abdullah-lashes-out-at-al-assad-regime-1.1086562>. [Diakses pada: Juli 17, 2017.]
- Warrick, Joby. 2016. ISIS fighters seem to be trying to sell sex slaves online - The Washington Post. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/isis-fighters-appear-to-be-trying-to-sell-their-sex-slaves-on-the-internet/2016/05/28/b3d1e4ea-24fe-11e6-9e7f-57890b612299_story.html. [Diakses pada: Oktober 21, 2016.]
- Weiss, Stanley. 2016. Five Saudi Imperial Projects the West has Slept Through. *Huffington Post*. <http://m.huffpost.com/us/entry/8983356>. [Diakses pada: Oktober 21, 2016.]
- Wilson, Centre. 2016. GCC and Arab League Declare Hezbollah a Terrorist Organization. *The Woodrow Wilson International Centre for Scholar*. <https://www.wilsoncenter.org/article/gcc-and-arab-league-declare-hezbollah-terrorist-organization>. [Diakses pada: Juli 27, 2017.]
- Worth, Robert F. 2006. Blast Destroys Shrine in Iraq, Setting Off Sectarian Fury. *The New York Times*. <http://www.nytimes.com/2006/02/22/international/middleeast/blast-destroys-shrine-in-iraq-setting-off-sectarian.html>. [Diakses pada: Agustus 10, 2017.]

Dokumentasi Film & Video

- Al-Manar. 2015. *Hassan Nasrallah: The War in Yemen Announces the end of the Saudi dynasty*. <https://youtu.be/JYTfT49imqM>
- Al-Mayadeen. 2016. *Documentary Film Hezbollah in Syria – The Necessary Option*. 2016. <https://youtu.be/T4zzy5U4Dw>
- Maula TV. 2016. *GCC, Organisasi Pengecut*.
- Maula TV. 2016. *Pesan Sayyid Hasan Nasrullah Untuk Rakyat Yaman*.